



VOLUME 1 NO 1 | APRIL 2016

# mediaBPP

*Jendela Informasi Kelitbangan*

IDEALISASI  
BPP

LAPORAN KHUSUS

## RAKORNAS KELITBANGAN 2016, KUPANG, NTT

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)  
dalam Implementasi Inovasi Daerah  
dan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman

<http://litbang.kemendagri.go.id>  
Majalah Dwi Bulanan  
ISSN 2503-3352



9 772503 335002

# Korupsi sama dengan bunuh diri

Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2015  
masih berada pada peringkat ke-88 dari 167  
negara menurut data *transparency international*  
*the global coalition against corruptions*



**M**aret lalu, kami disibukkan dengan serangkaian kegiatan

Penyusunan Program (Sungram) 2017 dan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan 2016 di Kupang, NTT selama tiga hari berturut-turut. Ratusan peserta hadir dari berbagai daerah untuk merencanakan nasib BPP Daerah yang saat ini memang diharapkan eksistensinya.

Terlebih, rencana penggolongan BPP Daerah menjadi BPP bertipe A, B, atau C berdasarkan Pasal 219 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penggolongan itu membuat 'ketar-ketir' para pengelola BPP Daerah yang masih belum didukung oleh SDM, Manajemen, dan Keuangan Daerah.

Sebagai induk dari BPP Daerah, BPP Kemendagri mencoba merumuskan dan mencanangkan jalan keluar demi keberlangsungan BPP Daerah sebagai lembaga think tank di daerah dan membangun kesejahteraan daerah. Perjalanan rumusan jalan keluar serta rencana jangka panjang itu kami rangkum dalam Laporan Utama Media BPP edisi April 2016. Tidak hanya itu, kami juga menyajikan cuplikan sekilas

perjalanan di Kupang, NTT yang ternyata memiliki potensi alam dan maritim yang melimpah.

BPP Kemendagri juga mempunyai serangkaian kegiatan yang terus aktif dalam mengembangkan potensi peneliti yang kami laporkan dalam rubrik Aktivitas. Setidaknya ada 111 program yang nantinya akan dipilih dalam program 2017 mendatang. Selain itu, dalam penentuan kualitas dan idealisasi BPP, juga dilihat dari produk hasilnya, yaitu jurnal.

JBP (Jurnal Bina Praja) milik BPP Kemendagri juga berusaha terus meningkatkan kualitasnya dengan mengadakan Rapat Koordinasi Jurnal secara Nasional dan mendaftarkan ISSN agar terindeks di *Google Scholar* dan DOAJ, sehingga pada masa yang akan datang JBP akan menjadi jurnal bereputasi internasional. Perjalanan itu kami rangkum juga dalam rubrik Aktivitas dan Daerah.

Tentunya, sebagai lembaga think tank kami akan terus senantiasa berkembang untuk menjadi lembaga penelitian dalam negeri yang ideal, sebagai dasar lahirnya kebijakan berbasis riset.

## mediaBPP

Diterbitkan oleh  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Media BPP menerima Opini dan Surat Pembaca.  
Kirimkan Opini dan Surat Pembaca Anda  
melalui surel kami ke alamat di bawah ini.

Alamat Redaksi  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
mediabppkemendagri@gmail.com

PELINDUNG	MENTERI DALAM NEGERI Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB	Domoe Abdie
PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDKATUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Syabnikmat Nizam Subiyono Rochayati Basra Indrajaya Ramzie
PENYUNTING	Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy Niyen Nurin Ridha Putri
PELIPUTAN	M. Saidi Rifki Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	Elpino Windy

### Tingkatkan Kualitas e-Journal

Kewibawaan sebuah instansi kelitbangan dapat dilihat dengan adanya jurnal ilmiah terakreditasi yang dikelola. Jurnal Bina Praja dalam bentuk cetak sudah terakreditasi sejak 2011. Seiring berkembangnya teknologi informasi, mulai April 2016 penilaian akreditasi jurnal versi cetak sudah tidak berlaku, dan setiap pengelola jurnal diharuskan untuk beralih dari versi cetak ke versi elektronik/online atau biasa disebut *e-journal*. *E-journal* memiliki kelebihan juga kekurangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bagi peneliti. Namun, tidak semua peneliti *familiar* dengan penggunaan *e-journal*. Untuk itu kami selaku pengelola jurnal, senantiasa membuka pintu lebar-lebar menerima hasil karya peneliti.

**Niyan Nurin R.P**

**Unit Layanan Administrasi Publikasi dan Jurnal Ilmiah**



Terimakasih atas informasi Sdri. Niyan. Terhitung 1 April lalu, seluruh jurnal akan beralih ke jurnal elektronik, hal itu juga berlaku pada JBP (Jurnal Bina Praja) milik BPP Kemendagri. Perjalanan lahirnya keputusan itu juga pernah dikupas

dalam Laporan Utama Media BPP pada Februari lalu. Sdri. Niyan dan Tim Pengelola JBP juga selalu mengajak para peneliti dalam Call for Papers yang selalu tampil di sampul belakang majalah kami. Dengan pintu yang sangat terbuka lebar, pengelola JBP juga menerima naskah dalam bentuk Bahasa Inggris. Semoga informasi dari Sdri. Niyan bisa membantu para peneliti untuk terus mengasah dan mengembangkan kualitas penulisan para peneliti.

Redaksi

### Senam Pagi

Kegiatan senam pagi yang dilakukan rutin setiap Jum'at di BPP Kemendagri kurang mendapat respons dari warga BPP. Masih ada yang tidak sempat, malu, atau enggan melakukan olahraga yang saat ini pesertanya bisa dihitung dengan jari. Saya rasa perlu dilakukan sosialisasi lebih mendalam lagi bagi seluruh pegawai BPP Kemendagri tentang betapa pentingnya berolahraga dengan senam pagi. Senam pagi tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan tetapi juga

mampu memupuk rasa kekeluargaan di antara para pegawai BPP.



**Rahayu Kelana**  
**JFU Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi**

Ya benar sekali Sdri. Ayu, olahraga memang sangat penting untuk melenturkan otot yang tegang selama bekerja. Saat ini memang mayoritas yang melakukan senam pagi hanya segelintir ibu-ibu yang itu-itu saja. Semoga dengan masukan dan saran dari Sdri. Ayu bisa menggugah persepsi para pegawai BPP Kemendagri akan pentingnya olahraga dan menjaga kesehatan.

Redaksi

### Sistem Satu Pintu

Kebanyakan surat masuk untuk Plt. Kepala BPP atau Sekretaris BPP tidak melewati proses TU (tata usaha) Pimpinan. Namun, ada juga yang langsung diproses ke TU Sekretaris BPP. Hal inilah yang seringkali membuat rancu akan pengelolaan surat masuk. Begitu pula dengan surat keluar, baik nota dinas atau surat tugas dari unit pengolah belum tertata sesuai tata kelola arsip yang benar. Sehingga surat sering menumpuk, dan tidak tertata sesuai dengan kode klasifikasi. Sebaiknya, semua surat harus melewati TU Pimpinan terlebih dahulu, agar semua surat dapat terkontrol satu pintu.

Selain itu masalah penomoran surat, unit pengolah sering meminta bon nomor dan memberikan arsip dalam bentuk *copy-an* (bukan asli) bahkan sering kali kertas sudah dilubangi. Sebaiknya untuk tata tertib administrasi yang baik, bon nomor arsip harus diserahkan berkas yang asli, belum dilubangi, dan bukan nomor mundur.

**Aris Apriyadi**  
**JFU TU Bagian Umum**

Terima kasih atas informasinya, semoga seluruh karyawan menjadi tambah paham bagaimana tata kelola surat masuk dan keluar. Semoga masukan Sdr. Aris dapat segera ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

Redaksi

3	<b>PENGANTAR &amp; SUSUNAN REDAKSI</b>
4	<b>SURAT PEMBACA</b>
	<b>LAPORAN UTAMA</b>
6	Mempertanyakan Eksistensi BPP
10	Berkaca pada Litbang Media
13	Solusi atas Masalah Kelembagaan BPP
15-21	<b>AKTIVITAS</b>
	<b>LAPORAN KHUSUS - RAKORNAS KELITBANGAN 2016</b>
22	Peran BPP dalam Pemanfaatan Inovasi di Daerah dan Potensi Kemaritiman
25	Sinergi Litbang dan Kemaritiman
26	5-7-7 Trio Komisi Rakornas
27	Hasil Rapat Komisi
	<b>DAERAH</b>
30	Sepenggal Kisah - Negeri 1001 Pulau
34	Secuplik Narasi dari Palasari
32-33	<b>JEPRET</b>
36	<b>KOMIK - Bang Pepe Jadi Wartawan</b>
	<b>LEBIH DEKAT</b>
37	Robert NaEndi Jaweng: "Peneliti Harus Punya Pemikiran Berbeda."
	<b>PROFIL BALITBANGDA - Balitbangda Provinsi NTT</b>
39	Inovasi IPTEK untuk Menumbuhkan Keunggulan Daerah
41	Menambah Kesejahteraan Petani Melalui Program P3A
42	Idealisme BPP Provinsi NTT
	<b>RESENSI</b>
44	Buku
46-47	Film
	<b>OPINI</b>
48	Implementasi Nilai Kebangsaan, Dasar Revolusi Mental
50	Memperkuat Manfaat Kartu Identitas Anak
52	<b>KILAS BERITA</b>
	<b>SASTRA</b>
53	Di Hening Subuh
55-57	<b>GAYA HIDUP</b>
58	<b>CATATAN</b>



**LAPORAN UTAMA**  
Berkaca pada Litbang Media



**LAPORAN KHUSUS**  
RAKORNAS KELITBANGAN 2016



**DAERAH**  
Sepenggal Kisah - Negeri 1001 Pulau



**GAYA HIDUP**  
Melaney Ricardo:  
Nyaman Hamil  
di Usia 30-an.

# IDEALISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



# MEMPERTANYAKAN EKSISTENSI BPP

*Dalam Pasal 219 UU No 23 Tahun 2014 mengamanatkan pendirian Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) sebagai penunjang Pemerintah Daerah. Namun seiring perkembangannya, BPP seringkali dipertanyakan eksistensinya selaku lembaga think tank. Baik itu di daerah maupun yang di pusat.*

**P**asal 209 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan, perangkat daerah provinsi dan kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Yang dimaksud Badan pada pasal tersebut kemudian dijelaskan pada Pasal 219 Ayat 1, salah satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP). Artinya, pasal tersebut mewajibkan setiap daerah provinsi dan kabupaten untuk mendirikan BPP sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, keberadaan BPP merupakan *conditional sine qua none by law* (sesuatu yang harus ada berdasarkan undang-undang). Namun kenyataannya, tidak semua Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki BPP.

## Nasib BPP Daerah

Dalam catatan Rapat Koordinasi Kelitbang di Kupang (14-16 Maret 2016), tidak semua BPP yang ada memiliki kemampuan tinggi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas penelitian dan pengembangan. Dari sisi organisasi, belum semua fungsi litbang diwujudkan dalam bentuk BPP Daerah. Bahkan, dari 34 provinsi hanya 21 provinsi yang sudah terbentuk. Sedangkan lainnya masih bergabung dengan Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup.

Padahal, sejatinya penguatan BPP Daerah menjadi penting diperjuangkan sehingga segala sesuatu yang terkait dengan kemajuan pembangunan daerah, bisa dilakukan perkiraan sesuai potensi, hambatan, dan kendala yang ada. Seperti halnya BPP Sleman yang masih bergabung dengan Bappeda. Menurut Sri Nurhidayah, Pengelola Bidang Litbang Bappeda Sleman mengatakan, di tempatnya tidak memungkinkan untuk berdiri sebuah BPP mengingat Kota Yogyakarta adalah kota pendidikan.

“Sudah banyak universitas dan banyak peneliti di Yogyakarta, jadi kebutuhan akan BPP dirasa tidak terlalu penting,” imbuhnya.

## Miskin SDM dan Produk

BPP yang ideal adalah BPP yang memiliki fungsi yang tertera dalam Permendagri No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri serta Permendagri No 20 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai pelaku penelitian sekaligus pengkaji kebijakan pemerintahan dalam negeri. Tetapi faktanya, keberadaan BPP Daerah saat ini jauh dari idealisme peraturan tersebut. Banyak masalah yang kemudian muncul pada sebagian BPP di daerah. Seperti kelengkapan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur penunjang penelitian pun masih jauh dari harapan. Perekrutan tenaga peneliti pun mendapat tantangan besar, minimnya peminat menjadi tembok penghalang kemajuan BPP.

Sementara BPP dituntut untuk menghasilkan produk penelitian sebagai salah satu asumsi penilaian BPP daerah selama ini. Menurut Rosmawaty Sidauruk, anggota Komisi II dalam Rakornas Kelitbang 2016 mengatakan, bahkan ada BPP Daerah yang tidak memunyai peneliti.

“BPP Daerah, ada yang hanya memunyai 1 sampai 5 peneliti, bahkan ada yang tidak punya peneliti. Cara mereka melakukan penelitian biasanya bekerja sama dengan pihak ke-3, seperti universitas atau LSM,” jelasnya.

Namun, tidak semua BPP Daerah miskin SDM. Keterbatasan SDM sejatinya bukanlah alasan untuk tidak berkembang, hal ini bisa dibandingkan dengan BPP Kalimantan Timur yang memunyai 22 peneliti. Bahkan Endro Utomo, Plt. Kabid Pemasarakatan BPP Kaltim



**Endro Utomo**  
Plt. Kabid Pemasarakatan  
BPP Kaltim

Pemasarakatan setempat mengklaim BPP Kaltim memiliki paling banyak peneliti dari seluruh BPP Daerah di Indonesia.

“Tadinya kita nomor dua setelah Jawa Timur, tapi menurut Kemendagri karena kita banyak inovasi jadi nomor satu,” katanya.

BPP Kaltim yang baru saja didirikan pada 2000, sudah mempunyai 5 doktor yang didapat dengan cara bekerja sama dengan BKD untuk merekrut terbuka melalui media massa.

“Kita rekrut sebagai calon peneliti lalu kita keluarkan SK nya, sebenarnya kami perlu 45-50 peneliti di berbagai bidang,” ujarnya.

Penilaian suatu BPP yang ideal sejatinya juga dapat diukur pada produk penelitian yang diterbitkan dengan seberapa kali penelitian yang dilakukan. BPP Kaltim bisa dikatakan cukup produktif dengan melibatkan peneliti tidak hanya aktif di jurnal ilmiah tetapi juga buletin internalnya.

“Untuk jurnal, kami terbit dua kali dalam setahun, namun, belum terakreditasi. Untuk buletin, kami



**Latifah**  
Kabid Litbang Sumatera Barat

terbitkan sebulan sekali dan yang mengelola peneliti. Kami punya kebiasaan wajib menulis di mana pun, agar peneliti kami terbiasa menulis,” ujarnya.

Tidak hanya selesai di masalah SDM dan produktivitas, masalah angka kredit dan tunjangan peneliti kerap menjadi kendala. Rosmawaty bahkan mengatakan banyak peneliti di BPP Daerah yang tidak tahu jika sebenarnya ada SK untuk menambah tunjangan peneliti.

“Nah, jadi banyak peneliti di daerah yang tidak tahu jika mereka punya SK untuk tunjangan, biasanya ini dilatarbelakangi dari pemerintah daerah setempat yang tidak paham,” terangnya.

#### **Klasifikasi BPP**

Permasalahan lain muncul, ketika UU No 23 Tahun 2014 tersebut mengklasifikasikan BPP Daerah ke dalam beberapa tipe, sehingga menambah benang kusut BPP Daerah. Tipe tersebut, misalnya, tipe A dengan beban kerja yang besar, tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang, serta tipe C yang dibentuk dengan beban kerja yang kecil. Sementara penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas.

Dalam audiensi bersama Sekjen Kemendagri dan Plt. Kepala BPP Kemendagri, beberapa pengelola BPP Daerah mempertanyakan alasan tersebut di tengah eksistensi BPP yang kian meredup. Kepala BPP Provinsi Banten, M Ajak Moeslim, mengatakan, harus ada indikator yang jelas tentang kewajiban pendirian sebuah BPP.

“Akan lebih baiknya pembagian tipe tidak berdasar pada penilaian yang dititikberatkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, atau keuangan daerah, tetapi dengan lembaga penilai semacam akreditasi BPP,” ujar Moeslim.



**M. Ajak Moeslim**  
Kepala BPP Provinsi Banten

Moeslim mengeluhkan, dengan indikator tersebut, maka BPP Provinsi Banten akan berubah menjadi tipe C. Sejalan dengan Moeslim, Kabid Litbang Sumatera Barat, Latifah pun mengungkapkan hal yang sama, persyaratan dan penilaian tersebut tidak akan memungkinkan Bidang Litbang Provinsi Sumbar menjadi BPP Bertipe A. Alasannya, keuangan daerah Provinsi Sumbar tidak mencukupi untuk sebuah BPP bertipe A. Selain itu, Bidang Litbang yang ada saat ini juga masih berada di bawah BAPPEDA, sehingga anggaran untuk BPP akan semakin kecil.

“Anggaran dana untuk BPP pun akan semakin kecil, karena beberapa dinas, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan akan lebih diprioritaskan, sementara BPP dituntut untuk mengawal inovasi daerah yang diamanatkan UU,” keluh Latifah.

Klasifikasi tipe BPP ini tertuang pada Pasal 29 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2014. Namun sayangnya, pihak BPP Kemendagri dan Daerah masih menunggu hasil revisi draft PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Musababnya, klasifikasi tipe badan seperti ini sebelumnya tidak tertuang dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menerangkan peran perangkat daerah.

Pada UU tersebut, dalam Pasal 120 Ayat 1 dinyatakan perangkat daerah provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis. Yang dimaksud dengan Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam



**Yuswandi Temenggung**  
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah (RSUD).

Pada Pasal 29 draft RPP OPD misalnya, baru secara jelas digambarkan mengenai RSUD berkelas A, B, C, atau D. Tetapi belum ada secara jelas mengklasifikasikan BPP bertipe itu. Tentu ini menjadi kewaspadaan sekaligus kebingungan bagi para pengelola BPP di daerah. Beberapa BPP di daerah yang sudah produktif dan memunyai peneliti terancam turun level, hanya karena misalnya letak geografis yang tidak mencukupi jumlah penduduknya

Hasil kriteria itu kemudian dinilai oleh KemenPAN-RB dengan beberapa indikator. BPP yang mempunyai nilai 400 dari indikator akan mendapat label BPP tipe C, yang tentu dengan mendapat jatah anggaran sedikit sebelum pengklasifikasian. “Untuk itu kami mengusulkan bagi BPP dengan skor 400 tetap dikatakan Badan, namun dengan BPP tipe C,” kata Heriyandi Roni, anggota Komisi II Rakornas Kelitbang 2016.

Tidak hanya selesai di masalah SDM dan produktifitas, masalah angka kredit dan tunjangan peneliti kerap menjadi kendala. Banyak peneliti di BPP Daerah yang tidak tahu jika sebenarnya ada SK untuk menambah tunjangan peneliti.

Menanggapi hal itu, Yuswandi Temenggung, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menjawab santai semua keluh kesah para pengelola BPP Daerah.

“Tidak perlu takut soal jabatan, dan anggaran yang sedikit, karena Saudara-saudara di sini

tidak selamanya di BPP. Semua orang akan berpindah, yang terpenting adalah menanamkan kebiasaan dan budaya baik,” kata Sekjen yang pernah berkarier selama 15 tahun di BPP itu. **(IFR/MSR)**

.....

*BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) ideal bisa dilihat dari aktivitas kelitbang yang dilakukan, berbicara idealitas sebuah BPP kita juga patut berkaca pada beberapa lembaga Litbang yang dikelola oleh media, baik dari segi pengelolaan, kelembagaan, maupun aktivitas yang dilakukan.*

.....

**T**im Media BPP beberapa waktu lalu mengunjungi beberapa Litbang media cetak nasional yang ada di Jakarta, di antaranya Litbang Kompas, Litbang Media Indonesia, dan Litbang Koran Sindo.

Litbang media sangat berperan penting terhadap setiap pemberitaan media. Mereka bertugas melakukan pendalaman teks, memperkaya (*enrichment*) berita sehingga bisa mengungkap cerita di balik berita. Litbang juga berfungsi sebagai penunjang kinerja redaktur agar bisa menghasilkan berita yang lengkap, akurat, dan terpercaya.

### Litbang Kompas

Lantai empat redaksi koran Kompas tampak rapih dan bersih, semua data disajikan secara visual dan elektronik di dekat lobi Litbang Kompas. Tampak samping ada sebuah ruangan seluas 2x10 meter bertuliskan 'Ruang Polling'. Di dalamnya berjejer meja kursi dengan belasan karyawan muda sambil memakai *earphone* layaknya *teller* pada sebuah bank. Ada yang sibuk menelepon dengan suara seberang, ada yang sedang mengetik, dan ada yang sedang menghitung *polling*.

Litbang Kompas memang sudah tidak diragukan lagi dalam hal pengambilan dan pengelolaan data. Tidak main-main, jumlah peneliti di sini cukup banyak, berasal dari kalangan profesional bahkan General Managernya, F Harianto Santoso pun mantan wartawan senior Kompas, yang sudah pasti tahu standar data Kompas.

Ada 40 peneliti yang terbagi ke dalam beberapa kategori kepangkatan (*grading*). Peneliti muda, peneliti madya, dan peneliti utama. Kami diajak ke ruang peneliti, di samping perpustakaan

redaksi Kompas. Ruangannya padat, sama seperti meja redaksi beberapa media massa pada umumnya. Namun ruangan yang dipimpin oleh Ignatius Kristanto itu dipenuhi dengan nuansa warna-warni. Bukan hanya sebagai penyejuk mata, tetapi juga sebagai klasifikasi *grade* peneliti. Mulai dari hijau, kuning, cokelat, oranye, dan sebagainya. Bagian kanan saat membuka pintu, merupakan ruangan peneliti senior di Litbang Kompas, yang dihiasi dengan warna cokelat dan krem, sedangkan bagian kiri merupakan peneliti pemula yang dihiasi dengan meja berwarna cerah seperti hijau, kuning, dan sebagainya.

Menurut Harianto, proses perekrutan di sini cukup sulit. Mereka harus paham bahasa Inggris, aktif menulis terutama di organisasi pers mahasiswa.

"Untuk menjadi peneliti muda di sini, mereka diwajibkan melakukan pendidikan terlebih dahulu selama 6 bulan, kalau mau naik kelas mereka harus bikin *paper* yang akan disidang oleh 6 penguji. Kalau tidak lulus, ya mengulang sampai lulus," urainya.

Para peneliti di sini memelajari berbagai isu nasional seperti politik, sosial budaya, ekonomi, metropolitan, serta kewilayahan. Saat ini Litbang Kompas tengah mengembangkan portal Kompaspedia untuk peyajian data yang diolah sedemikian rupa dan bisa dimanfaatkan oleh pihak internal Kompas. Selain itu, Litbang Kompas



F. Harianto Santoso | General Manager Litbang Kompas

juga menjadi penyumbang utama data yang disajikan dalam Kompas TV. Mereka juga rutin mengundang tokoh dalam rangka mengangkat isu nasional, serta mencari jalan keluar dan solusi terhadap suatu permasalahan.

Untuk menjadi sebuah informasi yang akurat mereka melakukan *polling* secara rutin, terkait konten yang berhubungan dengan pemerintahan. Melalui wawancara langsung ataupun melalui telepon dengan sistem *random sampling* yang didapat dari *yellow pages*.

“Karena kebutuhan untuk koran setiap hari berbeda, proses biasanya dilakukan dalam jangka waktu tiga minggu mengangkat isu-isu yang sudah diwacanakan seperti pemilu. Tapi kalau isunya sedang *trend* dan butuh data cepat, kami menggunakan *random sampling* dari *yellow pages*,” paparnya.

Survei lapangan dilakukan setiap tiga bulan sekali biasanya mereka lakukan di 14 kota. Isunya bermacam-macam, bisa tentang pemerintahan atau *lifestyle*. “Bedanya kami persiapkan secara matang, kalau dengan telepon kadang kita bisa stress juga. Bayangkan dari 4 ribu telepon, mungkin hanya 400 yang sesuai. Itu kan mengacaukan juga,” terangnya.

Terkadang, untuk mendapatkan data yang lengkap Litbang Kompas juga membeli hasil penelitian dari beberapa lembaga yang harganya bisa mencapai ratusan juta. “Kami tidak hanya memanfaatkan *press release* yang didapat dari reporter, kami perlu konteks yang bisa dikaji lebih dalam untuk mendukung berita atau sebagai bahan peliputan,” jelasnya

Misalnya untuk mengetahui data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mereka membelinya dari lembaga semacam BPS/LIPI, lalu mereka telaah lebih dalam apakah inflasi bisa berhubungan dengan indeks harga konsumen, atau misalnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang saat ini mengalami perubahan, kemudian diolah berdasarkan 514 kabupaten/kota. Sementara dalam urusan bisnis, Litbang Kompas secara profesional bisa membedakannya.

“Kami memang hidup dari iklan, tapi litbang kami *pure* tidak ada intervensi dari mana pun. Kami membagi litbang menjadi dua,” tegasnya

Ada dua divisi dalam Litbang Kompas yaitu Divisi Bisnis dan *Newsroom*. Pada Divisi Bisnis, Litbang Kompas secara rutin melakukan riset dari sisi bisnis koran itu sendiri, seperti mengetahui seberapa banyak respon pembaca terhadap sebuah *brand* iklan tersebut. Sedangkan Divisi *Newsroom* berhubungan dengan tulisan dan keredaksian. “Divisi *Newsroom* juga melakukan evaluasi dalam kajian media agar tetap pada jalur yang benar, kita melihat apakah selama

ini pemberitaan Kompas melenceng atau tidak. Kita melakukan analisis terhadap berita Kompas, apakah kita masih netral atau tidak. Hasilnya kita laporkan ke bagian redaksi secara internal, agar kita tetap dalam porsi yang independen tanpa memihak,” ungkapnya.

Hari juga menegaskan, sejauh ini Kompas sangat independen dan tidak akan bisa diintervensi dari pihak mana pun baik dari politik, ekonomi, dan sebagainya. Anggaran dana yang tidak sedikit untuk biaya riset menjadi alasan utamanya. “Termasuk dalam proses pengolahan data dari mulai survei lapangan hingga menjadi sajian data yang lengkap itu semua menggunakan biaya internal,” ungkapnya.

Litbang Kompas juga memiliki beberapa fasilitas khusus yang digunakan, seperti ruang khusus peneliti, ruang PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi), ruang *Polling*, Perpustakaan, serta *database* yang memadai. Kompas bisa dikatakan menjadi salah satu perusahaan media yang menjadikan Litbang sebagai kekuatan untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas, Litbang Kompas juga rutin melakukan hitung cepat *quick count* (QC) pada saat pemungutan suara, selain itu hasil QC Kompas tercatat paling cepat dan presisi. Dengan demikian, tidak heran jika kemudian kalangan akademisi, politisi menjadikan hasil *polling* Litbang Kompas sebagai acuan dan rujukan manakala mereka membuat tulisan maupun mengambil kebijakan.

### Litbang Koran Sindo dan Media Indonesia

Sekadar komparasi, tim Media BPP juga mewawancari Manajer Litbang Sindo, Wiendy Hapsari. Menurut Wiendy, Litbang Sindo memiliki tiga sub divisi yaitu Divisi Riset, Divisi Pemberkasan, dan Divisi Pengembangan. Divisi riset bertujuan melakukan riset untuk kepentingan pemberitaan maupun evaluasi konten, pada divisi tersebut, Litbang Sindo mencari tahu sejauh mana kualitas Koran Sindo di mata pembaca. Sementara untuk survei dilakukan selama tiga bulan sekali. “Untuk survei dilakukan selama tiga bulan sekali, dari situ kita memanfaatkan setiap biro yang banyak tersebar di sembilan daerah seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja, Palembang, Makassar, Medan, Batam, dan Manado,” kata Wiendy.

Dalam melakukan survei, Litbang Sindo juga



Wiendy Hapsari  
Manajer Litbang Sindo

memanfaatkan *yellow pages*, dengan teknik *random sampling* khususnya untuk tema yang bersifat simpel dan menarik untuk dikonsumsi pembaca. Survei tersebut dilakukan secara rutin setiap minggu. Sementara untuk rubrik yang sifatnya *happening* seperti gejala politik, sosial, ekonomi, dilakukan sebulan sekali, Wiendy mencontohkan penggunaan plastik berbayar, bagaimana imbas penerapan kebijakan tersebut di masyarakat. “Selain imbas regulasi plastik berbayar juga biasanya yang terkait dengan momen khusus seperti pemilu DKI, nanti kita akan cari tahu siapa yang akan menjadi kandidat terkuat,” ujar Wiendy.

Selain itu Litbang Sindo juga aktif melakukan survei dengan kuesioner terkait konten pemberitaan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kepuasan pembaca terhadap pemberitaan maupun pelayanan Koran Sindo.

“Misalnya dari segi konten tingkat keakurasian beritanya bagaimana, apakah topiknya sudah *up to date* atau belum, dari sisi pelayanan distribusi koran apakah sudah sesuai harapan pembaca, semua aspek kita survei sehingga menjadi bahan evaluasi manajemen Koran. Data Litbang Sindo pun bisa dimanfaatkan untuk beberapa anak perusahaan MNC Group dan MNC News,” kata Wiendy.

Sindo diharapkan bisa memberi warna bagi media cetak di Indonesia. Menurut Wiendy, Koran Sindo memunyai *layout* atraktif sehingga tidak jarang Koran Sindo selalu mendapat penghargaan *Indonesian Prime Awards* untuk sisi visual. Selain itu, untuk memperkaya data, Litbang Sindo juga melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga swasta seperti CSIS, SMRC, terkait dengan hitung cepat pemilu, dan sebagainya.

Untuk Divisi Pemberkasan, Litbang Sindo mendokumentasikan semua arsip sejak pertama Koran Sindo terbit pertama kali pada 2005, menurut Wiendy, semua itu ia kelola dengan baik. Selain bertanggung jawab terhadap arsip, divisi tersebut juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan *website*, sosial media, dan perpustakaan.

Untuk Divisi pengembangan internal SDM, Litbang Sindo rutin mengadakan forum diskusi dengan mendatangkan CEO beberapa perusahaan ternama yang bertujuan untuk memperdalam pemberitaan yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat.

Litbang bertujuan menyajikan data yang menarik dari berbagai hal, baik dari sisi ekonomi, politik, dan sebagainya

Seperti baru-baru ini Litbang Sindo mendatangkan Nadiem Makarim salah satu pendiri Gojek untuk diskusi resep sukses perusahaannya.



**Heru Prasetyo**  
Redaktur Research Media Indonesia

Litbang Sindo saat ini memiliki tujuh tim inti yang terbagi ke dalam beberapa bagian pemberkasan, pengembangan, pengunggah, dan pengolah data. Menurut Wiendy, saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan melalui penyimpanan data digital yang bisa digunakan oleh pihak internal MNC Group.

Sama halnya dengan Litbang Koran Sindo, Litbang Media Indonesia (MI) juga menangani khusus penyajian data untuk harian MI. Menurut Heru Prasetyo Redaktur Research MI, Media Group saat ini sedang mengembangkan lembaga riset yang akan digunakan seluruh anak perusahaannya yaitu *Media Research Center* (MRC). MRC nantinya bisa digunakan baik oleh MI maupun Metrotv.

Sama halnya dengan dua lembaga litbang media sebelumnya, Litbang MI juga bertujuan untuk memperkaya sebuah berita, sehingga berita yang disajikan bisa memberikan manfaat kepada para pembaca. “Selain itu juga litbang bertujuan menyajikan data yang menarik dari berbagai hal, baik dari sisi ekonomi, politik, dan sebagainya,” ujar Heru.

Staf Research MI, Dika Winata menambahkan, untuk sebuah data, Litbang MI juga memanfaatkan dari pihak luar, seperti Populi Center, CSIS, dan sebagainya, dan juga memanfaatkan narasumber yang diwawancarai oleh reporter.

“Kita mengandalkan *release* dari pihak luar, selain itu mengandalkan reporter, jika reporter bertemu narasumber sebisa mungkin informasi tersebut kita gali lebih dalam, dan itu lebih efektif,” kata Dika.

Namun untuk rubrik-rubrik tertentu, Litbang MI juga bekerja sama dengan pihak lain seperti rubrik teknologi, mereka mendapatkan data dari lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dari karya ilmiah peneliti yang kemudian diubah ke dalam bahasa yang lebih populer dan jurnalistik. Selain itu, Litbang MI juga rutin menggelar *Focused Group Discussion* (FGD) yang bertujuan menampung seluruh informasi dari narasumber. **(IFR/MSR)**

# SOLUSI

## ATAS MASALAH KELEMBAGAAN BPP

**D**ari sisi kelembagaan, permasalahan utama Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang paling mencolok adalah manajemen pengelolaan BPP itu sendiri. Kesuksesan sebuah BPP tersebut juga bisa dilihat dari sejauh mana hasil kelitbangan bisa dibuktikan dan diimplementasikan dalam setiap kebijakan pemerintah. Jurnal ilmiah adalah salah satu bukti konkret hasil kelitbangan sebagai media aktualisasi para peneliti dalam menyampaikan ide dan gagasan hasil penelitiannya, terlebih jika jurnal tersebut bereputasi internasional.

Jika kita menilik kementerian lain, Kementerian Agama, Misalnya, BPP Kementerian Agama sudah memunyai beberapa jurnal terakreditasi. Setidaknya ada tujuh jurnal yang mereka kelola bersamaan dengan Badan Diklat. Pada saat wawancara eksklusif kami dengan Kepala BPP dan Diklat Kementerian Agama, Abd. Rahman Mas'ud mengatakan, secara aktif BPP dan Diklat Kementerian Agama mengeluarkan beberapa produk dengan konsekuen. Hal itu terbukti dari salah satu jurnalnya yang sudah terakreditasi sebagai jurnal internasional yaitu Jurnal Lektur. Selain Lektur BPP dan Diklat Kemenag juga mengelola beberapa jurnal antara lain Jurnal Harmoni, Jurnal Edukasi, dan Jurnal

Dialog.

“Pada jurnal edukasi kita membahas terkait isu-isu agama secara luas, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengangkat masalah hubungan umat beragama,” paparnya

Dari sisi manajemen pengelolaan, BPP dan Diklat Kementerian Agama juga memunyai wakil di beberapa daerah. Menurut Mas'ud, ada tiga BPP Kemenag yang tersebar di Jakarta dan Semarang, ditambah Balai Diklat di 14 provinsi, dan mayoritas aktif menerbitkan jurnal.

“Semua itu tergantung manajemen, saya termasuk yang rewel jika terlambat terbit. Disini kami semua bekerja secara maksimal dan terpenting mematuhi jadwal,” imbuhnya.

Pekerjaan peneliti di Kemenag juga tidak hanya sekadar menerbitkan hasil penelitian, tetapi mereka juga membuat Laptah (Laporan Tahunan) yang mengangkat isu-isu agama setiap tahunnya. Laptah menjadi bahan refrensi kebanyakan peneliti baik tingkat mahasiswa, maupun peneliti utama. Bahkan, Laptah mulai dilirik oleh beberapa kolega Mas'ud di luar negeri sebagai sumber penelitiannya. “Jangan sampai instansi kalah produktif dengan LSM,” jelasnya.

Selain Kemenag, patut kiranya berkaca juga pada manajemen pengelolaan BPP Kementerian Keuangan, BPP dalam kementerian ini bermuara pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang memunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. “BKF dapat disebut sebagai *think tank* di lingkungan Kemenkeu. Kami memunyai jargon *research based policy*, setiap pengambilan kebijakan dirumuskan melalui proses riset ilmiah yang kami lakukan,” kata Hidayat Amir, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Kementerian Keuangan.

Produknya, BKF memunyai Jurnal Ilmiah Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) sebagai media *sharing knowledge* dalam bidang ekonomi dan Keuangan.

“KEK menjadi *output* bagi diseminasi proses ilmiah pengambilan kebijakan dan ruang diskusi ilmiah dalam isu-isu ekonomi,” ucapnya.

BKF sendiri memiliki 553 pegawai, dengan fungsional peneliti sebanyak 38, ditambah peneliti yang



Abd. Rahman Mas'ud  
Kepala BPP dan Diklat

merangkap jabatan sebagai pejabat struktural sebesar 11 orang. Ini berbeda dengan di Kementerian Agama yang memunyai 171 peneliti tanpa ada yang merangkap jabatan. Menurut Mas'ud, di Kementerian Agama tidak ada peneliti yang merangkap sebagai pejabat struktural, karena dapat memengaruhi produktivitas peneliti dalam meneliti dan menulis.

### Solusi kelembagaan BPP

Manajemen pengelolaan BPP pada kementerian lain bisa menjadi salah satu contoh yang bisa di tiru oleh para pengelola BPP di daerah dalam rangka menghasilkan sebuah produk kelitbangan yang bermanfaat.

Di sisi lain, peran BPP Kemendagri sebagai lembaga pembina utama BPP di daerah sangat diharapkan demi terciptanya sinergitas kelembagaan yang mengarah pada kualitas hasil-hasil kelitbangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Koordinasi bersama para pengelola BPP Daerah harus terus digalakkan agar mampu menjadi pelaku riset, dalam bidang strategi sosial atau politik, dan sebagainya (*think tank*).

Koordinasi kelitbangan yang dibangun secara rutin setiap tahun diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung BPP Pusat dan Daerah. Rakornas Kelitbangan 2016 sebagai salah satu bentuk koordinasi BPP lalu telah menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai solusi permasalahan manajemen pengelolaan kelembagaan selama ini. Hal tersebut turut disampaikan



**Teguh Winarno**  
Kepala BPP Provinsi Jawa Tengah

pula oleh Teguh Winarno yang mewakili BPP Provinsi Jawa Tengah.

Di antaranya perlu adanya ketegasan Menteri Dalam Negeri tentang kewajiban pembentukan BPP Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Badan dengan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) yang diatur dalam PP tentang OPD. "Untuk itu, kami perlu kesamaan nomenklatur Balitbangdanovda Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan perumpunan unit sekretariat, bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang inovasi daerah, serta bidang data dan publikasi," kata Teguh.

Selain itu ia mengatakan dalam rangka mengatasi kuantitas SDM juga perlu diatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Balitbangnovda yang berbasis fungsional. "Jadi organisasi yang miskin struktur tapi kaya fungsi," imbuhnya.

Saran lain, perlu adanya penambahan formasi fungsional peneliti, perekayasa, dan analisis kebijakan pusat dan daerah. Tidak hanya itu, ketegasan Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan fungsional peneliti juga dinanti.

Rekomendasi selanjutnya adalah ketersediaan anggaran itu perlu ditegaskan dalam APBN dan APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk program kelitbangan, SDM, dan manajemen (pengusulan, pengajuan, pengangkatan menjadi peneliti, dan kenaikan pangkat) dalam rangka kesejahteraan peneliti. **(IFR/MSR)**

Perlu adanya ketegasan Menteri Dalam Negeri tentang kewajiban pembentukan BPP Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Badan dengan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) yang diatur dalam PP tentang OPD.



## PUSLITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BPP KEMENDAGRI GELAR FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA)

**JAKARTA** - Kesiapan pemerintah daerah dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi pilihan topik dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri yang dilaksanakan di Aula BPP, (31/3).

FDA menghadirkan narasumber dari berbagai instansi. Narasumber tersebut di antaranya Sukoyo, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemendagri, Himawan Estu Bagjo, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wirman Syafri Saliwa, Guru Besar Administrasi Negara Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), dan Moh. Ikhsan. FDA dipandu oleh moderator Moh. Ilham A. Hamudy, peneliti dan Kasubag Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi BPP Kemendagri.

Salah satu latar belakang dilaksanakannya FDA adalah

beragamnya daya saing dalam menghadapi MEA yang masih menimbulkan berbagai masalah terkait kesiapan di daerah mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, birokrasi yang kurang responsif, regulasi daerah yang menghambat, keterbatasan SDM Pemda, perencanaan dan penganggaran yang kurang sinkron, serta masih kurangnya inovasi pemerintah.

Moh. Ikhsan salah satu narasumber yang membahas peluang dan tantangan pemerintah daerah dalam memasuki era MEA mengatakan, perlu adanya pembenahan terkait beberapa permasalahan tersebut. Selain itu diperlukan kesungguhan dan kerja keras dari pemda terkait kesiapan memasuki MEA.

"Antara Pemda dan Pusat harus sinergi, Pemda jangan menganggap hal tersebut merupakan kewenangan pusat atau sebaliknya," ujar Ikhsan.

Moderator FDA Moh. Ilham A Hamudy mengatakan, terselenggaranya acara tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesiapan kelembagaan Pemda, SDM Pemda, dan regulasi yang dibuat pemda dalam memasuki MEA.

"Selain itu diharapkan juga dapat diperoleh rekomendasi sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah dalam memasuki era MEA," kata Ilham. **(MSR)**

## PENGELOLA JBP SAMBANGI LIPI BANDUNG

**BANDUNG** - Pada 23 Maret 2016 lalu, pengelola Jurnal Bina Praja (JBP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri mengunjungi Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (Puslit Telimek) LIPI, Bandung, Jawa Barat. Kedatangan pengelola JBP disambut langsung oleh Tinton D Atmaja salah satu pengurus sekaligus editor *Mev Journal*.

Selain untuk berdiskusi mengenai *Open Journal System (OJS)* yang saat ini tengah dikembangkan pengelola JBP, kedatangan juga dalam rangka untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan e-journal yang dimiliki JBP sejak tiga bulan terakhir.

Moh. Ilham A Hamudy, pengelola JBP mengatakan, JBP telah eksis sejak sepuluh tahun terkakhir, dan pada 2016 ini telah terakreditasi untuk yang ketiga kalinya. Selain itu, JBP yang sebelumnya terbit empat kali dalam setahun kini berubah menjadi dua kali dalam setahun dengan porsi yang sama.

Selain itu, JBP selama tiga bulan terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan



perkembangan akreditasi jurnal dengan sistem *online* yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. Perkembangan tersebut kemudian memaksa JBP harus berpindah haluan ke dalam versi *online* (*e-journal*).

"Perkembangan pun terlihat ketika jumlah artikel yang masuk dalam kurun waktu dua bulan terakhir yang mencapai sekira 60-an artikel, ini menjadi tantangan tersendiri, selain harus sudah saatnya mengarah kepada Jurnal Internasional bereputasi, JBP juga sebisa mungkin harus terindeks minimal di *google scholar* dan DOAJ," kata Ilham.

Ilham menambahkan, sebagai satu-satunya jurnal milik Kemendagri, JBP saat ini bisa dikatakan sebagai kepala untuk semua jurnal yang dikelola oleh BPP di daerah, dengan demikian berkewajiban untuk membimbing dan memberikan pengetahuan terkait pengelolaan jurnal milik BPP di daerah.

Kedatangan tersebut juga dalam rangka untuk mempelajari bagaimana pengelolaan OJS yang baik dan benar, ia berharap pengelola *Mev Journal* yang saat ini selalu menjadi kiblat jurnal-jurnal di Indonesia tidak terkecuali JBP, bisa memberikan asistensi terkait pengelolaan jurnal yang baik serta gagasan untuk membantu pengelola Jurnal BPP di daerah.

Sementara itu, Tinton cukup mengapresiasi terkait *e-JBP* yang sudah ada saat ini, menurutnya JBP sudah sangat memungkinkan untuk dapat terindeks di DOAJ dan *Google Scholar*, dan diharapkan dapat menjadi Jurnal Internasional pada waktu yang akan datang.

"Dari segi tampilan *website* JBP ([www.binaprajajournal.com](http://www.binaprajajournal.com)) sudah sangat baik, bahkan lebih atraktif dan kreatif, seperti adanya penambahan *slide* dan beberapa slot, serta *online board* yang cukup mewakili, dan itu akan menjadi nilai tambah ketika didaftarkan di DOAJ nanti," kata Tinton.

Tinton menuturkan, *e-JBP* hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan agar bisa terindeks di DOAJ, seperti perlu mendaftarkannya di LIPI untuk mendapat *e-ISSN* sekaligus melakukan proses *Digital Object Identifier* (DOI) sebagai sarana untuk melakukan verifikasi tulisan ilmiah.

JBP selama tiga bulan terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan akreditasi jurnal dengan sistem *online* yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

"DOI adalah sebuah cara untuk memberi identitas (digital) bagi sebuah proyek, yang dalam hal ini adalah tulisan ilmiah. Sebagai pengidentifikasi, sebuah DOI bersifat persisten begitu dipakai untuk mengidentifikasi sebuah dokumen, ia akan melekat pada dokumen tersebut, meski dokumennya diubah, berpindah lokasi, dan sebagainya. Semacam KTP," tutur Tinton.

DOI memiliki format yang sederhana dan terbagi menjadi dua bagian yaitu *prefix* dan *suffix*. Bagian *prefix* menunjukkan sebuah otoritas (lembaga) yang berwenang meng-*assign* DOI, sedangkan bagian *suffix* menunjukkan *identifier* yang diberikan untuk obyek dokumen tertentu.

"Hal tersebut merupakan langkah awal untuk didaftarkan di DOAJ, langkahnya memang terkesan rumit tetapi sebenarnya sangat simpel, pengelola JBP hanya perlu sedikit tenaga untuk menuju kepada hal demikian," kata Tinton. (MSR)

# MENUJU JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL

Seperiti yang digambarkan oleh Lukman salah seorang peneliti LIPI sekaligus pembicara dalam Rakor Pengelola Jurnal di BPP Kemendagri beberapa waktu lalu, ia mengilustrasikan *e-journal* layaknya moda angkutan berbasis internet yang menyenangkan, gampang dipanggil, relatif aman, mudah, dan murah. Keberadaan *e-journal* dianggap akan menghemat waktu dan biaya pengelolaan. Selain itu, *e-journal* bisa menjangkau lebih luas.

“Saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkan angkutan roda dua berbasis aplikasi *online*, tanpa mencegat di jalan, sama halnya dengan *e-journal*. Sistem *e-journal* akan sangat menghemat biaya cetak, dan bisa lebih bermanfaat karena bisa dibaca di seluruh dunia, ini salah satu berkah teknologi digital, membuat cepat dan mudah pelbagai urusan,” terangnya.

Kemudahan tersebut membuat tren pemakai *e-journal* mengalami peningkatan. Keberadaan *e-journal* di Indonesia pun juga semakin banyak. Hingga 2015 terdapat 9240 *e-journal* dibanding 2009 sejak pertama kali muncul yang berjumlah hanya 300an. Indonesia menjadi peringkat ke 14 di dunia dengan 229 jurnal di antaranya 170 jurnal perguruan tinggi dan 59 jurnal Kementerian dan Lembaga. Hal tersebut sekaligus menaikkan peringkat Indonesia di dunia dari peringkat sebelumnya 22.

Ketergantungan masyarakat akan teknologi tidak bisa dimungkiri, publikasi ilmiah berbasis internet akan sangat diminati. Data Asisoasi Penyedia Jasa internet Indonesia (APJII) menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Ini terlihat dari jumlah penggunanya yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2014 jumlah pengguna internet Tanah Air tumbuh sebanyak 16,2 juta orang dari 71,9 juta orang pada 2013 menjadi 88,1 juta orang pada 2014.

Atas dasar itulah, pengelola jurnal manual sepatutnya harus segera berbenah. Selain pengelolaan jurnal manual yang jauh dari ekspektasi. Dalam beberapa kasus proses penilaian akreditasi, jurnal manual sering dibumbui kecurangan baik dari artikel yang diterbitkan atau administrasi yang dilakukan.

Dengan *e-journal* dan Arjuna, proses bisa dilakukan se-transparan mungkin. Inilah yang sudah terjadi di sejumlah negara di dunia. Pengelola publikasi ilmiah memberikan pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat, tak terkecuali oleh peneliti dan akademisi di seluruh dunia untuk menunjang penelitian. Inilah yang sebaiknya sudah diberlakukan oleh seluruh pengelola jurnal.

Memutuskan bermigrasi menjadi jurnal bereputasi internasional sangat penting, karena hal tersebut akan sangat berperan sebagai media aktualisasi diri para peneliti dan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional. Lebih jauh lagi, jumlah jurnal internasional juga berperan meningkatkan harga diri suatu negara dalam bentuk diplomasi mutu pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Sebelum jauh melangkah menuju jurnal bereputasi internasional, sebuah jurnal wajib terakreditasi melalui sistem *online*. Kepada Tim Meda BPP, Tinton D Atmaja editor Mev Journal menerangkan tahapan akreditasi jurnal tersebut di antaranya sebuah jurnal harus (1) memiliki ISSN baik dalam versi elektronik (*e-ISSN*) dan atau cetak, apabila terbitan dalam dua versi, (2) mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman *website* jurnal (3) jurnal harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni, (4) terbitan berkala ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi, (5) frekuensi penerbitan berkala ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur, (6) jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika berbentuk monograf, dan yang terakhir (7) tercantum dalam salah satu lembaga pengindeks nasional (*Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)*, Portal Garuda, Pustaka Iptek dan/atau yang setara).

## Manajemen pengelola jurnal

Pengelolaan jurnal ilmiah dalam rangka mencapai target utama menjadi jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau jurnal yang bereputasi internasional memerlukan sistem manajemen dan pengelolaan jurnal yang efektif dan efisien. Sistem manajemen dan pengelolaan jurnal ini harus mengacu kepada instrumen-instrumen dan kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh akreditasi jurnal nasional dan lembaga pengindeks internasional.

Evy Kartini pengelola Jurnal Atom Indonesia mengatakan, salah satu yang sering ditemui dari manajemen pengelolaan jurnal adalah yang terkait dengan kelembagaan seperti masih terdapatnya nama jurnal berdasarkan program studi dan institusi

“Contohnya nama-nama jurnal seperti Jurnal Jurusan Ilmu Kimia, Jurnal Jurusan Geografi, dan sebagainya. Sehingga tidak memunyai kekhasan dan bersifat lokal,” kata Evvy.

Selain itu masih banyak jurnal yang terbit secara elektronik yang salah kaprah dengan meletakkan kata *e-journal* baik

---

di depan atau di belakang seperti *e-Journal* Kimia, *e-Journal* Matematika, padahal *e-journal* hanyalah format media dari cetak ke elektronik sehingga tidak perlu disebutkan kata tersebut jadi antara nama jurnal cetak dan elektronik harusnya tidak beda yang membedakan hanya ISSN saja.

Lebih lanjut kata Evvy, dalam hal mitra bestari, keterlibatan mitra bestari yang berasal dari luar instansi berdasarkan bidang keilmuan sangat minim. Ia berharap pengelola jurnal mulai mengundang mitra bestari dari luar instansinya sehingga dapat meningkatkan kualitas artikel yang diterbitkan.

Selain itu, dari sisi mutu penyuntingan, misalnya, sebagian besar pengelola jurnal tidak mengarsipkan setiap tahapan hasil penyuntingan sebagai bagian komunikasi antara mitra bestari, editor, dan penulis.

Menjadi jurnal bereputasi internasional adalah sebuah kebanggaan bagi pengelola jurnal. Keberhasilan tersebut tidak akan bisa ditempuh tanpa beberapa proses yang harus ditempuh dan sudah menjadi pedoman baku. Beberapa langkah tersebut di antaranya, menggunakan aplikasi *e-journal* sesuai standar penerbitan jurnal seperti (*Open Journal System*) OJS, melengkapi kebijakan ruang lingkup jurnal dan *publication ethics*.

Selain itu wajib memiliki nomor *e-ISSN*, melengkapi *back issue* (terbitan lama), mencantumkan alamat manajemen pengelola secara lengkap, mencantumkan *editorial board* beserta identitasnya termasuk di dalamnya sitasi dari editor pengelola jurnal, memasukkan pedoman penulisan dan *templatnya* serta penggunaan aplikasi referensi, menyediakan pedoman untuk editor, mitra bestari, penulis



“Bahkan catatan dari mitra bestari sebagian besar tidak memberikan komentar terhadap substansi, oleh karena itu perlu diupayakan untuk memberikan pelatihan kepada mitra bestari atau memberikan check list apa saja point yang harus diperiksa,” kata Evvy.

Di sisi lain, para pengelola jurnal yang sudah memiliki *Open Journal System* (OJS) yang ada saat ini, belum sepenuhnya menjalankan bisnis proses penerbitan secara online dari mulai proses pengiriman naskah, penyuntingan, penelaahan (*review*) hingga penerbitan.

dan pembaca, secara singkat, padat, dan mudah dimengerti, melengkapi setiap fitur yang ada, seperti statistik akses, hits/jumlah kunjungan unik, mendaftarkan DOI ke *Crossreff*, dan mengaplikasikan ke setiap artikel, mendaftarkan ke lembaga pengindeks umum seperti ISJD, *Google Scholar*, DOAJ, dan pengindeks khusus bidang, serta menampilkan lembaga yang sudah mengindeks dalam situsny.

“Seperti yang sudah saya katakan adalah menjalankan bisnis proses secara *online*, karena itu yang menjadi penilaian utama akreditasi, serta menyiapkan profil *Google Scholar* untuk setiap jurnal,” kata Tinton ketika di temui di Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik – LIPI, Bandung, beberapa waktu lalu. (MSR)



## JBP ADAKAN RAPAT KOORDINASI

**T**im pengelola Jurnal Bina Praja pada Rabu (28/3) lalu mengadakan Rapat Koordinasi Pengelola Jurnal Ilmiah di Aula BPP Kemendagri. Acara yang dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai pengelola jurnal seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian, dan Universitas itu mendapatkan antusias yang sangat tinggi dari peserta. Dari pagi pukul 08.00 acara dimulai hingga menjelang petang pukul 18.00 WIB peserta masih antusias mengikuti paparan narasumber.

### **Jangan mau kalah dengan ojeg**

Hadir dalam Rakor Jurnal pada sesi pertama Lukman dari PDII-LIPI yang memaparkan tentang Manajemen Pengelolaan Jurnal Ilmiah. Pada paparannya Lukman memberikan gambar contoh pasar tradisional dan modern untuk menganalogikan jurnal elektronik dengan jurnal cetak. "Mana yang kira-kira bapak ibu pilih? Dan mengapa?" tanyanya.

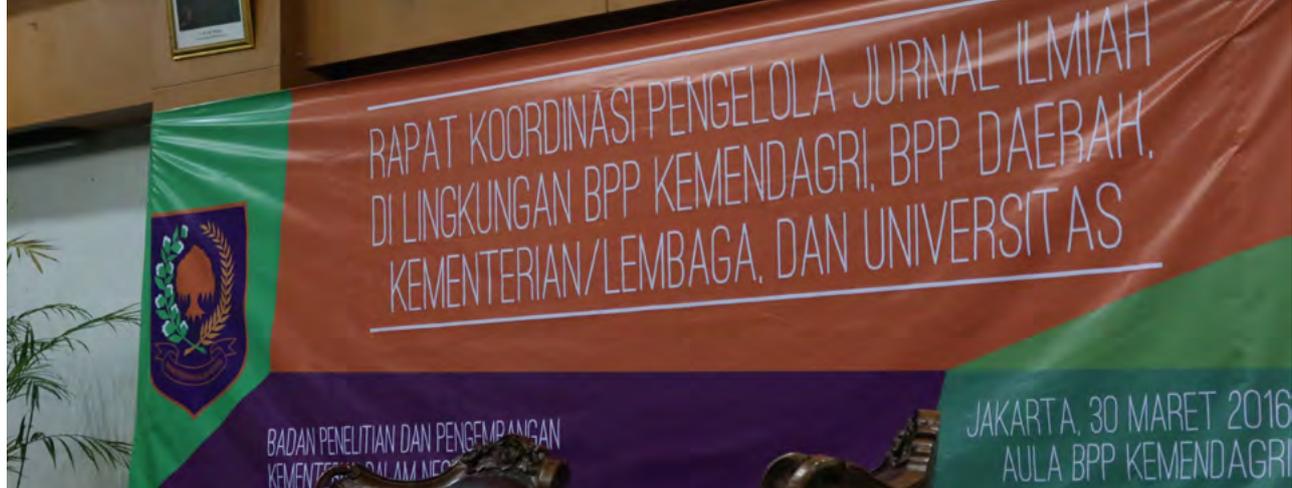
Seluruh peserta memilih pasar tradisional karena kualitasnya yang oke. "Kalau pasar tradisional ikan bisa sekali mati, kalau pasar modern ikan bisa tujuh kali mati karena disimpan dalam es. Sama halnya, jurnal juga harus seperti pasar tradisional dengan kualitas isi penelitian yang bagus, tapi dari segi manajemen harus seperti pasar swalayan, rapih, bersih, dan

terjangkau," jelasnya.

Lukman lalu menceritakan pengalamannya dengan aplikasi ojeg *online* yang sudah maju. Menurutnya, perkembangan terus maju, siapapun yang tidak mengikuti perkembangan akan tergilas dengan roda zaman. "Jangan mau kalah sama ojeg. Ojeg saja sudah *online*, masa jurnal masih cetak," cetusnya.

Menurut Lukman, dengan jurnal *online* para pengelola jurnal pun mendapatkan banyak keuntungan. Jurnal *online* bisa diakses siapa saja dan kapan saja, sehingga segmentasi pembacanya tidak hanya dalam negeri tetapi seluruh dunia. Selain itu, jurnal *online* juga menekan biaya cetak yang bisa mencapai miliaran setiap tahunnya. "Jurnal *online* juga memudahkan para lembaga akreditasi untuk memeriksa apakah penulisan dalam jurnal tersebut hasil karya orisinal atau tidak, karena semuanya sudah terdaftar dalam sistem *online*, tinggal dicari saja," untkapnya.

Mengingat per 1 April 2016 diterapkan jurnal *online*, sebaiknya para pengelola jurnal segera bergegas memperbaiki dan mengikuti regulasi yang ada. "Keberhasilan suatu jurnal itu ditentukan dari manajemen, infrastruktur, SDM, dan keuangan. Nah, dari segi manajemen ini dululah yang harus



diubah dengan cara disiplin dan komitmen," sarannya.

### Multijurnal

Masih di hari yang sama, Jurnal Bina Praja milik BPP Kemendagri yang sudah terakreditasi LIPI dan mempunyai *website* sendiri, disarankan oleh narasumber yang kedua, Evvy Kartini, untuk menjadi induknya multi jurnal. "Lebih baik bikin satu rumah (*website*), di dalamnya ada 20 kamar dari BPP Daerah yang lain," imbuhnya.

Manfaat *multiple journal* ini adalah memudahkannya akreditasi jurnal di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, mengingat banyaknya lembaga daerah seperti Bappeda atau BPP Daerah mempunyai hasil penelitian yang dimuat jurnal ilmiah. Jika jurnal terakses secara *online*, maka hasil penelitian akan dibaca semua orang, dan memudahkan tim penilai akreditasi untuk menilai

Salah satu keberhasilan jurnal dan tolok ukur suatu jurnal adalah banyaknya daftar sitasi (menjadi sumber referensi untuk jurnal lain) yang dipakai. Bahkan jika sudah terindeks di Google Scholar dan DOAJ, akan menjadi nilai tambah penilaian suatu jurnal. "Kalau yang mensitasi ada 25 orang, maka nilainya 5. Dengan sistem satu rumah ini, bisa saling sitasi satu sama lain. Tidak apa-apa, itu siasat untuk memajukan jurnal masing-masing. Asal penelitiannya sesuai dengan kajian yang kita miliki," paparnya.

### Tips menulis dan menyeleksi naskah

Meski begitu, sejatinya menjadi pengelola jurnal tidaklah mudah, banyak kendala yang biasanya dialami. Salah satunya adalah krisis naskah, akibatnya artikel penelitian yang tidak berkualitas pun menjadi salah satu pilihan terakhir yang masuk dalam jurnal suatu lembaga.

Obing Katubi, peneliti dari LIPI memberikan saran dan masukan kepada para pengelola jurnal. Ia menjelaskan, menjadi peneliti yang berkualitas, pertama adalah mengikuti karakteristik suatu jurnal. "Kalau jurnalnya bertema politik, ya menulis tentang politik jangan menulis tentang ekonomi," jelasnya.

Lalu untuk menulis jurnal berkualitas, peneliti harus menulis artikel dengan tema yang tidak terlalu luas. Fokuskan permasalahan yang akan diuji. "Biasanya artikel ditolak karena menyatakan pentingnya penilaian yang dianggap sempit tersebut, tidak memberikan contoh yang memadai, tidak memperkirakan tingkat pengetahuan audien secara tepat, dan tidak mengaitkan panjang artikel dengan topik. Jangan memanjangkan artikel dari pembahasan tema yang

sempit," jelasnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, kebanyakan artikel ditulis tidak berdasarkan kebaruan yang ada. Banyak peneliti yang terjebak dengan penelitian terdahulu sehingga tidak menemukan hal yang berbeda dan menghasilkan buah pikirannya sendiri. "Tunjukkan hal yang baru tentang bukti Anda. Berikan penjelasan apa yang beda dari penelitian terdahulu. *Review* analisis Anda. Jangan berhenti pada temuan," ungkapnya.

Terakhir, Obing menyarankan agar para peneliti lebih hati-hati dalam menulis. Kebanyakan penulis tidak membaca ulang tulisannya, sehingga banyak tata bahasa yang kurang huruf, tidak tepat atau biasa dibilang jorok. "Bayar saja editor untuk mengeditnya, itu sah," tutupnya.

### Tujuh poin manajemen bermutu

Selain masalah miskin naskah, beberapa kendala juga ditemukan oleh para pengelola jurnal utamanya dewan redaksi. Menurut Rachma Fitriati, setelah naskah masuk, sudah menjadi kewajiban dewan redaksi untuk menyeleksi naskah dan diserahkan pada mitra bestari. "Tapi kebanyakan dewan redaksi menyerahkan naskah mentah kepada mitra bestari. Kesalahan besar dewan redaksi adalah tidak membaca terlebih dahulu naskah yang akan diserahkan ke mitra bestari," ungkapnya.

Sebenarnya hanya butuh 7 poin agar bisa tercipta manajemen pengelola jurnal yang bermutu. Yakni manajemen harus berkomitmen dan bertanggung jawab pada saat pengumpulan/penerimaan artikel, proses evaluasi makalah oleh dewan redaksi, jika diterima harus mengacu pada gaya selingkung dan secara substansi secara umum disertai lembar disposisi makalah dan diseleksi dari *reviewer* (mitra bestari) mengacu keterbaruan. "Jangan terkecoh dengan judul artikel yang keren dan keterbaruan. Jangan langsung dikasih ke *reviewer*, baca dulu dan pilih teks yang memang layak," paparnya.

Lalu yang ketiga, pada proses revisi makalah, sebaiknya pada proses ini, ada tim khusus masing-masing yang menyeleksi. "Ada yang memeriksa per *item* seperti bagian metodologi, dan teori," imbuhnya.

Selanjutnya, sebaiknya ada pengeditan naskah yang telah dinyatakan diterima oleh dewan redaksi, dan lakukan pengiriman hasil penyuntingan makalah untuk penulis, agar penulis tahu kapasitas kepenulisannya dan segera memberikan permintaan *assignment of copywriter*, untuk segera menerbitkan jurnal ilmiah. (IFR)



## BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN NEGARA

**JAKARTA** - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Negara Anggaran Tahun 2016, Rabu (22/3) yang berlokasi di Hotel Bintang Griyawisata, Jakarta.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Domoe Abdie. Selain itu, acara juga dihadiri 81 orang peserta yang terdiri dari 55 orang peserta dari BPP dan 15 orang peserta dari Komponen lain. Acara juga diisi beberapa sesi.

Sesi pertama dengan tema Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Simulasi Aplikasi Persediaan, di sampaikan oleh Akhyar Gunawan dari Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Pada sesi berikutnya disampaikan oleh Heru Winarno dan M. Taufiq Abdullah perwakilan Kepala KPPN JAKARTA IV Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan

tema Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

Sesi ke-tiga disampaikan oleh Lukman Pramudi Kepala KPP Pratama Senen Ditjen Pajak, Kemenkeu dengan tema Penyajian Peraturan Dan Tata Cara Setoran Terbaru Perpajakan. Pada sesi terakhir membahas Pengawasan Pelaksanaan Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Sudarjo Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Domoe Abdie berharap setelah acara tersebut tidak ada lagi temuan-temuan terhadap administrasi serta tidak ada lagi persoalan keuangan yang masih tidak dimengerti.

"Informasi dan Peraturan selalu berkembang terus, jadi saya berharap tidak ada lagi yang berkata 'biasanya' ketika membuat pelaporan keuangan, sudah saatnya kita harus mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang ada," ujarnya. **(MSR)**

## PERAN BPP DALAM PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DAN POTENSI KEMARITIMAN

**KUPANG** - Bagaikan lautan batik, beragam pejabat dan peneliti daerah dari Sabang sampai Merauke berkumpul di Auditorium Hotel Aston, Kupang, NTT. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang berlangsung selama tiga hari (14-16 Maret 2016) itu mendapatkan sambutan antusias dari peserta. Plt. Kepala BPP Kemendagri, Domoe Abdie, mengatakan, tujuan diadakan Rakornas Kelitbangan 2016 ini adalah agar terwujudnya kesepakatan strategis kinerja BPP.

“Tujuan Rakornas ini adalah terwujudnya sinergitas lembaga kelitbangan yang kita harapkan terus menerus dari dampak inovasi kebijakan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah,” katanya.

Dalam sambutan yang ia bawakan serentak sebagai simbol dibukanya Rakornas Kelitbangan 2016 itu, Domoe berpesan kepada seluruh peserta agar bersinergi dengan kebijakan di daerah sampai dengan perdesaan, sebagaimana agenda Nawacita yang saat ini dalam poros pembangunan nasional dan daerah. “Melalui Rakornas Kelitbangan ini, diharapkan melahirkan kesepakatan strategis terkait inovasi daerah, yang pada hakikatnya masih berserakan. Baik di tataran birokrasi, masyarakat maupun di lingkungan swasta,” tambahnya.

### NTT sebagai tuan rumah

Sebagai tuan rumah Rakornas kali ini, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, sangat senang dan berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan BPP. “Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, saya berterima kasih banyak kepada Mendagri dan BPP yang telah memperkenalkan secara luas NTT kepada seluruh peserta. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta, ternyata masih ada Kupang di sini,” candanya.

Menurutnya, keberadaan BPP sangat penting untuk menunjang kemajuan pemerintahan dalam negeri. Terutama tema Rakornas Kelitbangan kali ini yang mengangkat tema Kemaritiman. Baginya, NTT sangat cocok dengan tema kemaritiman. Laut NTT lebih luas dari luas daratannya.



**Domoe Abdie**  
Plt. Kepala BPP Kemendagri

“Daerah kepulauan tentu berbeda dengan daerah kontinental, latar belakang dan tantangannya mesti berbeda. Secara *de facto* NTT bersama 7 provinsi lainnya diakui sebagai daerah kepulauan, tetapi secara *de jure* belum diakui. Kami berharap mendapatkan bantuan dari hasil Rakornas ini untuk mendorong secara yuridis NTT sebagai daerah kepulauan,” terang Gubernur yang baru-baru ini melantik Bupati dan Wakil Bupati di NTT itu.

NTT sendiri menurut Frans, terdiri dari 1192 pulau, berbatasan darat dengan Timor Leste dan laut dengan Australia. Dengan jumlah penduduk 5,6 juta berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) NTT dikenal dengan daerah miskin. “Ada 21 kabupaten tertinggal, karena disebut daerah tertinggal, banyak pejabat yang takut ditempatkan di NTT. Padahal kami tengah membangun NTT dengan kerja keras dari sektor ekonomi,” katanya.

Ia menceritakan, NTT tengah bertekad menjadi provinsi koperasi, mengingat banyak masyarakat di kampung yang daya tawarnya lemah sehingga perlu diwadahi dan memunyai daya tawar yang tinggi. “Dari dulu kami makan jagung, namun sejak ada kebijakan pangan akhirnya jagung ditinggal. Kami percaya jagung tidak salah jika dikonsumsi. Tidak ada penelitian yang mengatakan makan jagung bodoh. Kami juga banyak ikan di sini, tapi ikannya dibawa ke Surabaya dan Bali. Mereka tidak tahu, karena ikan tidak punya KTP,” celotehnya seraya berkelakar.

Ia menambahkan, banyak destinasi wisata menarik di NTT, seperti pulau Komodo. “Komodo hanya ada di NTT. Orang sering bilang NTT singkatan dari Nasib Tidak Tentu, tapi ada yang menghibur menjadi Nanti Tuhan Tolong. Tapi saya mau menciptakan NTT sebagai *New Tourism Territorial*,” tegasnya.

Terakhir, ia sangat berharap kehadiran para peserta Rakornas Kelitbangan 2016 ini bisa memberikan semangat bagi warga NTT untuk maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia. “Kita tidak boleh mengeluh, kita harus semangat membangun negara yang besar. Prinsipnya tidak hanya efisiensi, tapi dengan rasa nasionalisme. Tidak boleh ada diskriminasi di negeri ini, meski kami di perbatasan, kami tetap merah putih!” tutupnya.



Frans Lebu Raya  
Gubernur NTT

### Tiga agenda penting

Hadir pula dalam acara pembuka, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung mewakili Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir. Menurut Yuswandi, ada tiga agenda penting pada Rakornas kali ini. Pertama soal evaluasi kerja seluruh BPP di Indonesia.

“Kegiatan rutinitas dalam Rakornas kali ini mencoba *me-review* apa yang sudah kita lakukan dan dirumuskan tahun lalu. Jangan-jangan masih banyak hal yang tidak kita perhatikan dalam program tahun lalu,” kata pria asal Lampung itu.

Yuswandi berpesan agar para pejabat BPP betul-betul memanfaatkan momen tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran yang nantinya bermanfaat ketika kembali ke daerahnya masing-masing.

“Lalu yang kedua, dalam Rakornas tahun ini ada penekanan khusus terkait inovasi layanan publik. Saya kira, kita harus cermat dengan inovasi layanan publik nyata. Kadang-kadang kita sebagai birokrat tidak menyadari apa yang terjadi di lingkungan kita, sehingga kita tidak siap menyajikan rumusan program,” paparnya

Ia mencontohkan inovasi publik yang berkembang seperti bisnis aplikasi kendaraan *online* yang asetnya secara dunia bisa mencapai triliunan. “Bagaimana pemerintah mempersiapkan dan mengatasi kemajuan ini. Di sektor publik, sudahkah kita antisipasi itu? Kita harus lebih cepat dari kebutuhan masyarakat. Begitu banyak tuntutan layanan informasi pelayanan publik yang berkaitan dengan kelitbangan, tugas kita sekarang bagaimana memobilisasi SDM yang tersedia,” jelasnya.

Menurut Yuswandi, hal yang sering terlewat seperti yang dikatakan Gubernur NTT terkait potensi jagung. Koperasi yang ada padahal dijamin UUD dan dibutuhkan daerah terpencil seperti NTT, nyatanya koperasi tidak sampai ke tempat itu. “Dari unsur kelitbangan, ini saat yang tepat untuk berkumpul. Kalau fungsi itu tidak ada, mengapa kita adakan Rakornas. Cari unit kerja lain yang dibentuk. BPP dalam unsur manajemen perlu dibenahi. Sekali lagi, kecerdasan kita melihat fungsi kelitbangan manakala SDM nya cermat,” kata pria yang sudah 17 tahun berpengalaman di BPP itu.

Terakhir, agenda Rakornas yang tidak kalah penting adalah soal tema kemaritiman. Menurutnya, bicara



kemaritiman sangatlah luas. Namun hal itu bisa diakali dengan menumbuhkan bibit/magnet yang menjadi patokan majunya potensi kemaritiman daerah.

“Kalau dikatakan komodo daerah wisata nasional, daerah yang lain mestinya siap. Jika diikuti yang lain, saya rasa akan menimbulkan kebijakan pariwisata yang luar biasa. Fungsi bapak/ibu peserta di sini sangat penting untuk kemajuan daerah. Hilangkan dikotomi jabatan struktural dan fungsional. Bahkan kalau kita berpikir secara jernih, struktural sangat terbatas, sehingga akan memfokuskan kebijakan masing-masing. Memang butuh waktu, apalagi sebagai peneliti dibutuhkan ketekunan,” terangnya.

#### Suara daerah

Masih di hari yang sama, sesaat setelah pemukulan gong tanda dibukanya Rakornas Kelitbangan 2016, seluruh peserta dibawa ke ruang rapat lantai 3 Hotel Aston untuk audiensi. Beberapa pejabat BPP dipersilakan bertanya dan mengadukan semua masalah yang ada di daerah bersama Plt. Kepala BPP dan Sekjen Kemendagri satu per satu suara dari BPP Daerah itu mulai keluar.

Sebagai birokrat,  
kita harus cermat  
terhadap perkembangan  
inovasi layanan publik,  
kita sering tidak menyadari  
apa yang terjadi di lingkungan kita,  
sehingga kita tidak siap  
menyajikan rumusan program.

Adalah M. Ajak Moeslim dari BPP Banten yang pertama kali angkat bicara. Ia menanyakan soal klasifikasi BPP berdasarkan kriteria. “Sebaiknya klasifikasi berdasarkan akreditasi, bukan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah anggaran dsb,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dipertanyakan oleh Teguh Winarno, Kepala BPP Provinsi Jawa Tengah. “Kami masih kurang SDM. Hampir di semua provinsi tidak ada tenaga perekayasa. Sementara untuk melakukan kerja kelitbangan harus ada tenaga perekayasa,” tanyanya.

Taufik Rahman dari BPP Kalsel juga mengeluhkan pengklasifikasian BPP. Baginya, klasifikasi BPP harus didasarkan oleh kebutuhan masing-masing provinsi. Selain itu, kurang sinerginya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi salah satu kendala majunya BPP Daerah. “BPP Pusat harus sinergi dengan BPP Daerah. Selama ini kalau ada acara atau program kami tidak pernah dilibatkan, begitu pula dengan program daerah yang tidak pernah dihadiri BPP Pusat,” paparnya.

Semua pertanyaan dan keluhan ditampung lalu dijawab satu per satu oleh Yuswandi. Menurutnya, saat ini tengah digodok PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Nantinya daerah punya nomenklatur tersendiri yang seharusnya melihat struktur yang ada di nasional. Inti dari kelembagaan adalah urusan yang akan kita kerjakan dalam rangka pelayanan publik. Semua dipetakan dalam UU No 23 Tahun 2014 supaya memunyai sinergi,” jawabnya.

Terkait penambahan tenaga perekayasa, Yuswandi menjawab nanti akan didiskusikan oleh Kepala BPP. “Intinya harus ada alasan fungsional yang tidak didiskriminasi. Semua pegawai ada jabatannya, namanya JFU,” jawabnya.

Audiensi digelar hingga pukul 23.00 WITA dan ditutup oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri. “Saya rasa, pertemuan kali ini, kita cukup merasakan kegelisahan. Organisasi tidak selamanya tetap, masyarakat berubah, maka kita harus berubah lebih baik lagi,” tutupnya. **(IFR)**

# SINERGI LITBANG DAN KEMARITIMAN



Zudan Arif Fakrullah  
Dirjen Dukcapil Kemendagri

Jarum jam menunjukkan pukul 08.00 pagi WITA, matahari di negeri Kupang sudah mulai terik. Seluruh peserta sudah siap dengan hari yang padat agenda besar Rakornas kali ini. Hari kedua Rakornas Kelitbangan (15/03) masih dengan nuansa batik, seluruh peserta secara saksama menyaksikan paparan narasumber ahli yang didatangkan.

Panel diskusi pertama membahas mengenai inovasi daerah, kemaritiman, dan sistem nasional BPP pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Narasumber pertama memaparkan bagaimana pentingnya pendataan penduduk guna menunjang kinerja kelitbang. Adalah Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri yang membawakan materi perspektif model organisasi BPP Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah. "Dari sistem *data center* yang terhubung secara *online* dapat diketahui

segala informasi tentang penduduk satu per satu secara lengkap. Dari sinilah nanti bisa menunjang pendataan penelitian bapak/ibu sekalian. Misalnya di Kab. Mahrambu dalam satu kilometer hanya dapat ditemui 1 orang karena jarang ada penduduknya. Dari situ kita bisa lihat kebutuhan pelayanan publik, bagaimana alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, pencegahan kriminalisasi, dan demokratisasi," terangnya.

Materi kedua, dibawakan oleh Indra Sakti, Sekretaris BPP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membahas mengenai kemaritiman. Menurutnya hampir 80 persen wilayah Indonesia adalah perairan, banyak aktivitas di laut baik aspek ekonomi, sosial, dan politik. Banyak wisata di bawah laut dan di atas laut, observasi, penangkapan ikan, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. "Kami dari Kementerian Perikanan dan Kelautan membuat misi visi laut masa depan kita. Berbicara kemaritiman, kita bicara kedaulatan, yang selama ini dikuasai oleh pengusaha asing. Banyak ikan yang dicuri, bangunan laut yang ditinggal begitu saja. Nah, kita di sini harus bisa meningkatkan potensi laut. Misal, arus laut digunakan untuk membangkitkan satu sistem atau biota laut," paparnya.

Menurut catatannya, ada 117 kapal asing sepanjang 2016 yang berhasil ditenggelamkan karena *illegal fishing*. "Kita menjaga pintu-pintu masuk pelayaran, dan melarang kepiting bertelur ditangkap juga penjualan lobster di bawah 200 gram. Terkait kesejahteraan, anggaran kami ada 13 T, 80 persen untuk masyarakat 20 persen untuk kami," ungkapnya.

Wilayah Indonesia yang cukup luas, mengatur Indonesia mengelola laut. Kementerian Perikanan mengaturnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 2/Permen Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. "Seperti Laut Arafuru sangat moratorium, tidak bisa sembarangan pengusaha mengambil ikan di situ. Lalu masalah infrastruktur kami tambahkan kapal-kapal yang memonitor kapal nelayan di laut. Semua sistem di negeri ini kami sinergikan terutama masalah *illegal fishing*," jelasnya. (IFR)

## 5-7-7 TRIO KOMISI RAKORNAS

**KUPANG** - Masih di hari yang sama, hari kedua Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan 2016 di Kupang mulai memasuki agenda inti. Menjelang senja peserta dibagi menjadi tiga kelompok tiap komisi. Komisi I membahas mengenai Inovasi Daerah, Komisi II membahas Kelembagaan, dan Komisi III membahas mengenai Kemaritiman. Diskusi berlangsung selama tiga jam. Masing-masing komisi memaparkan hasil diskusinya pasca azan Isya berkumandang.

Dalam rapat Komisi I yang dikoordinasi oleh Rochayati Basra dan timnya Sugeng Harjono, Sitti Aminah, Asrori, Hasoloan Nadeak, dan Jonggi Tambunan, serta beberapa perwakilan BPP Daerah membahas mengenai substansi materi RPP Inovasi Daerah yang selama ini tengah digodok oleh BPP Kemendagri yang menghadirkan pakar hukum dan ahli. RPP Inovasi Daerah memunyai substansi mengenai kebijakan inovasi daerah yang mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab kebijakan pengembangan inovasi daerah. Lalu tentang penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan proses penyelenggaraan inovasi daerah, pengembangan budaya inovasi, dan pembinaan dan pengawasan.

Berada di ruang sebelahnya, rapat Komisi II yang dipandu oleh Heriyadi Roni dan Teguh Winarno (BPP Provinsi Jateng) mengatakan, ada banyak permasalahan kelembagaan BPP di pusat maupun di daerah. Pertama, terbatasnya sumber daya peneliti (SDM fungsional peneliti). Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk Indonesia tergolong kecil, hanya 4,7 per 10 ribu penduduk. Hal ini berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang tersedia 18 peneliti per 10 ribu penduduk. Demikian halnya dengan jumlah peneliti di instansi pemerintah yang belum memadai mendukung kegiatan litbang. Contohnya Kementerian Dalam Negeri yang memunyai 176 peneliti yang tersebar di pusat dan daerah.

Kedua, dukungan anggaran untuk aktivitas kelitbangan di Indonesia masih tergolong rendah. "Dukungan anggaran litbang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 2,6 persen dari PDB dan Malaysia 0,8 persen dari PDB. Sedangkan Jepang dan Korea masing-masing mencapai 3,4 persen dan 3,6 persen dari PDB," kata Teguh.

Pada saat yang sama, permasalahan anggaran litbang





Teguh Winarno  
BPP Provinsi Jateng

juga menyentuh aspek implementasi tunjangan jabatan bagi peneliti berdasarkan Peraturan Presiden No 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti yang menyatakan besaran tunjangan peneliti. “Faktanya di daerah banyak ditemukan peneliti yang belum dibayarkan tunjangan sesuai dengan aturan tersebut. Masih lemahnya pemahaman pengelola bidang kepegawaian dan keuangan tentang kewajiban membayar tunjangan sesuai dengan SK Pengangkatan dan besaran tunjangan fungsional peneliti sesuai aturan tersebut,” paparnya.

Hal itu lalu mendapatkan respons dari Roni yang mengatakan, sebaiknya daerah mematuhi ketentuan



perundangan tentang pembayaran tunjangan peneliti.

Di tempat lain, pada Komisi III yang membahas kemaritiman, **Subiyono** selaku koordinator mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi mengenai peran litbang dalam hal kemaritiman. Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak, yakni 18.110 pulau, juga sebagai negara yang memiliki wilayah laut mencapai dua pertiga dari luas wilayahnya. Indonesia juga menjadi negara terpanjang kedua di dunia dengan pantai sepanjang 95.181 Km. Dari sektor laut saja, Indonesia bisa memberikan lapangan kerja bagi 180 juta penduduk.

“Sesuai dengan pidato Presiden Jokowi dengan cita-citanya menjadikan negara kita sebagai negara maritim, dan sesuai dengan agenda Nawacita, maka peran BPP di sini menjadi penting sebagai lembaga perumusan UU berdasarkan penelitian,” imbuhnya.

Tepat pukul 19.00 acara kembali dimulai. Perwakilan komisi memaparkan hasil sidangnya. Setidaknya, ada 5 hasil sidang Komisi I, 7 hasil sidang Komisi II, dan 7 hasil sidang Komisi III. Atau untuk mudah dihafal, 5-7-7 trio komisi.

Pemaparan hasil rapat per komisi disepakati dengan baik tanpa ada pertanyaan atau intervensi lagi. Mereka sepakat, hasil sidang Rakornas 2016 itu sudah sejalan dengan seluruh pemikiran BPP se-Indonesia. Acara Rakornas Kelitbang 2016 ditutup dengan penandatanganan surat usulan hasil rapat per komisi oleh Domoe Abdi. “Kegiatan Rakornas yang sudah rutin, dan sudah kita tradisikan selama 9 tahun semoga menjadi pokok arah kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan cita-cita Nawacita,” kata Domoe

Jarum jam tepat menunjukkan pukul 23.00 WITA. Seluruh peserta merasakan kepuasan dan lega atas hasil musyawarah yang berjalan dengan lancar. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Gemu Famire. Meski lelah, mereka tetap bersuka ria dengan dendangan musik NTT lalu berfoto bersama. **(IFR)**

# RAKORNAS KELITBANGAN 2016



## HASIL RAPAT KOMISI



## INOVASI DAERAH

### INOVASI DAERAH

Substansi mengenai kebijakan inovasi daerah yang mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab kebijakan pengembangan inovasi daerah. Lalu tentang penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan proses penyelenggaraan inovasi daerah, pengembangan budaya inovasi, dan pembinaan dan pengawasan

### Penguatan Kebijakan Inovasi Daerah

- Perlu pengaturan tentang pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab kebijakan pengembangan inovasi daerah antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota
- Pengintegrasian kebijakan inovasi dalam dokumen perencanaan pusat dan daerah (RPJMND, RKP/D dan Rensta KL)
- Sistem inovasi daerah perlu diatur dalam RPP
- Perlu dipertimbangkan pelibatan lembaga pengawasan keuangan ketika kebijakan inovasi yang dilakukan tidak mencapai sasaran
- Perlu dipertimbangkan pengaturan diskresi dalam RPP

### Penguatan Kelembagaan

- Penataan peran lembaga inovasi mencakup pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat
- Penguatan jejaring dan bentuk kerja samanya
- Dalam rangka mendorong sinergitas dan keterpaduan kebijakan inovasi daerah dengan Badan Litbang Kemendagri sebagai koordinatornya
- Perlu dilibatkan Dewan Riset Daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah
- Penataan ketatalaksanaan organisasi
- Perlu kejelasan pengampu inovasi yaitu BPP Daerah

### Penguatan sumber daya

- Penguatan anggaran mencakup alokasi anggaran:
  - APBN/APBD untuk kelitbangan
  - Untuk pengembangan inovasi
  - Perlu bantuan pendanaan dalam mengembangkan techno park
- Pengembangan kapasitas SDM
- Penataan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa
- Perlu dipertimbangkan usulan jabatan fungsional inovator
- Pengembangan kepakaran dan keahlian peneliti dan perekayasa
- Penguatan infrastruktur dan sarana prasana IPTEK oleh Pemerintah dan Non Pemerintah

### Penguatan proses penyelenggaraan inovasi daerah

- Perlu penegasan:
  - Batasan atau definisi Inovasi Daerah
  - Prinsip-prinsip Inovasi Daerah
  - Sumber/Inisiator Inovasi Daerah
  - Bentuk Objek dan Kriteria
- Tujuan pelaksanaan inovasi daerah dalam kerangka inovasi daerah
- Penggunaan bahasa asing dihindari dari penyusunan RPP

### Pelaporan inovasi daerah kepada Kemendagri dikoordinasikan ke Gubernur

- Pengaturan peran pemerintah pusat di bidang pembinaan inovasi daerah (K/L dan Kemendagri)
- Pengaturan pengawasan meliputi:
  - Bentuk pengawasan
  - Pelaksana pengawasan

# KELEMBAGAAN BPP

Hasil Rapat Komisi II

Perlu ada ketegasan Menteri Dalam Negeri tentang kewajiban pembentukan BPP Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Badan dengan nama BPP Inovasi Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014



Perlu diatur dalam PP tentang OPD mengenai kesamaan nomenklatur BPP Inovasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan perumpunan unit:



- Sekretariat
- Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
- Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Bidang Inovasi Daerah
- Bidang Data dan Publikasi
- Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Bidang Inovasi Daerah

Perlu diatur dalam PP tentang OPD mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) BPP Inovda yang berbasis fungsional (organisasi dengan miskin struktur dan kaya fungsi)



Perlu surat Mendagri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penambahan formasi fungsional Peneliti, Perekrayasa, dan Analisis Kebijakan di pusat dan daerah.



Perlu penegasan Mendagri terkait pembinaan fungsional Peneliti, Perekrayasa, dan Analisis Kebijakan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



Perlu penegasan Mendagri kepada Pemerintah Daerah tentang Pemberian Tunjangan Fungsional Peneliti di Pusat dan Daerah sesuai Perpres Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Fungsional Peneliti



- Perlu penegasan ketersediaan anggaran dalam APBN dan APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk:
  - Program kelitbangan (penelitian, pengkajian, dan pengoperasian) dan inovasi
  - SDM (formasi, sertifikasi dan diklat lainnya)
  - Manajemen (Pengusulan, Pengajuan PAK, Pengangkatan menjadi peneliti, Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Peneliti)



# POTENSI KEMARITIMAN

Menghasilkan tujuh rekomendasi kemaritiman

## POIN 1 DAN 2

Melakukan Pemetaan Potensi Kemaritiman di Indonesia



Perlu diatur dalam PP tentang OPD mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) BPP Inovda yang berbasis fungsional (organisasi dengan miskin struktur dan kaya fungsi)

## POIN 3 DAN 4



Kemendagri sebagai koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Korbinwas) dalam Kemaritiman akan menginisiasi rapat koordinasi kelitbangan bidang kemaritiman dengan K/L dan Pemda

Grand Design Kemaritiman (Menko kemaritiman dan KKP) yang akan disenergikan dengan K/L (Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Kementerian Pertahanan), dan Pemerintah Daerah



## POIN 5 DAN 6



Melakukan Pemetaan Kapasitas Kelembagaan Litbang masing-masing K/L dan daerah



Identifikasi dan Inventarisasi masing-masing K/L dan daerah:  
Fokus dalam Alki (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 1,2,3, dan 4  
Program konkret, sislognas, zonasi wilayah, kawasan industri, program unggulan daerah, dana desa, dll

## POIN 7

Rencana tindak lanjut: (catatan refrensi MoU Alki II dan MoU Kemendagri dan Kementerian Desa MoU Kemendagri dan K/L terkait MoU antar-pemda Alki I : Lampung Alki III : NTT Alki IV : Papua Barat



# Negeri 1001 Pulau

Semilir angin dan terik panas matahari menyengat seluruh badan, jarum jam kala itu masih menunjukkan pukul sembilan pagi. Tapi keringat di kulit sudah mulai bercucuran. Sambil menunggu angkot di depan hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur kami berbincang dengan staf hotel menanyakan destinasi apa yang menarik di pulau yang menjadi salah satu keajaiban dunia itu. "Nanti kakak naik angkot saja, turun di Pertamina lalu sambung dengan angkot hijau, di sana ada Museum Negeri Kupang," katanya.

Sedikit tidak paham apa yang dia maksud dengan Pertamina, berbekal ke sok tauhan kami langsung saja menaiki angkot berwarna putih dengan kernet yang berteriak "Kupang-kupang". Dalam hati berkata, "Iya saya sudah tahu ini di Kupang, mengapa masih teriak jurusan Kupang."

Masuk ke dalam angkot kami disambut dengan dentum keras *speaker* di sepanjang kolong angkot. Ukuran angkot di sini memang lebih panjang dari angkot di Jakarta. Kalau di Jakarta bisa memuat sekitar 10 orang, disini bisa muat 12-15 orang. Berhimpit-himpitan dengan penduduk lokal yang hitam manis, sambil merasakan dentuman lagu rock Inggris



lawas yang samar-samar seperti bahasa planet entah berada. Bising, tentunya mengganggu pendengaran kami. Dentuman musik keras tidak hanya terasa di kedua telinga, tetapi sampai ke ulu hati.

Salah satu penumpang yang sadar akan ketidaknyamanan kami, meminta supir untuk mengecilkan volume. Di perjalanan angkot, kami sulit melihat pinggir jalan, karena kaca ditutupi oleh aneka stiker *rock and roll*. Ya sudah, kami akhirnya memutuskan untuk berhenti di pemberhentian terakhir karena tidak tahu maksud Pertamina dari arahan staf hotel tadi. "Ya Terminal Kupang, Kupang," kata kernet.

Kami tiba di Terminal Kupang yang berada di Kelurahan Lailai Bissikopan dekat terminal, ada pantai dan lipatan meja kursi. "Mungkin untuk orang berdagang di sore hari," gumamku. Kami bertemu dengan Rizky (22), mahasiswa Akuntansi Universitas PGRI, Kupang. Dia bilang, orang sini menyebut pom bensin itu sebagai Pertamina. "Oh, pantas saja tidak ada

kantor Pertamina yang kami lihat sepanjang jalan," kata ku. Rizky memang masih muda, bisa dibilang dia salah satu anak yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi di tengah keterbatasan wilayah tersebut. "Saya mau jadi guru kakak," ujarnya.

Kami berbicara seputar beberapa universitas di sini, dan seputar Kupang. Sebagai informan, dia cukup baik menerangkan semua hal yang disebut berbeda antara Kupang dan Jakarta. "Kalau mau ke museum, kakak naik angkot nomor 10 saja. Di sini angkanya tercantum di atas angkot," ucapnya.

Kami mencoba mengamati seluruh bagian angkot dari jarak jauh. Ternyata benar, untuk melihat nomor jurusan angkot, harus ditengok ke bagian atas. Di sana ada semacam plang angka yang berdiri tegak di atas bagian depan. Berbeda dari angkot Jakarta yang menempel stiker angka pada kaca depan.

Sebelum beranjak menaiki angkot, kami mengunjungi beberapa toko kerajinan dan oleh-oleh dekat terminal. Kami bertemu dengan Pak Andreas, salah satu staf toko kerajinan. "Tiara Art Shop" begitu plang nama toko itu terpampang. Mata sebelah kanan pak Andreas berwarna putih, tertutup katarak.

Beberapa sebelah mata orang-orang tua di tanah dengan 1.192 pulau itu memang kebanyakan putih akibat katarak. Mungkin karena kebanyakan melaut di tengah teriknya matahari negeri timur itu.

Di toko tempat Pak Andreas bekerja, menjual aneka ragam kerajinan terutama batu. "Ini fosil ikan, pada zaman dahulu Nabi Nuh tinggal di sini lalu dia membuat kapal dan

negeri ini tenggelam. Semua ikan mati tertimpa reruntuhan batu. Di sini kita belah batunya dengan cetakan ikan," jelasnya.

Tidak hanya ikan, di sana juga ada fosil cumi, dan udang. Harganya cukup fantastis. 100 ribu hingga 5 juta. Yang paling mahal batu besar yang dipercaya ada goresan sisik naga seharga Rp 5 juta. "Kalau kami jualnya utuh saja, kalau mau dibelah, belah sendiri kami tidak menyediakan alat untuk membelah," imbuhnya.

Di sepanjang etalase kami melihat aneka ragam kerajinan, mulai dari kain tenun, batu, fosil-fosil, gantungan, hingga miniatur alat musik khas NTT Sasando. "Itu harganya 20 ribu saja Bu, tinggal dua, sudah diborong sama orang Bandung," katanya.

Selesai membeli minatur Sasando, kami bergegas menaiki angkot 10 berwarna hijau. Sama seperti angkot sebelumnya, *full music* mengiringi perjalanan kami. Beruntung kali ini musik yang diputar musik pop Indonesia dengan volume sedang dan



Salah satu koleksi  
Museum Negeri Kupang

pas di telinga. Supir angkot melaju dengan kecepatan tinggi, tikungan tajam dia *terabas* persis seperti pembalap F1 Rio Haryanto. **S e l u r u h**

**p e n u m p a n g** dibuat geleng-geleng kepala atas perilakunya. Pantas saja, di dalam angkot ada besi untuk berpegangan semacam pegangan untuk penumpang bus yang berdiri di Trans Jakarta. Mual, pusing sudah barang tentu. Beruntung perjalanan ke museum dengan angkot itu hanya berlangsung cepat. Kami tiba di sebuah gedung bercat biru bertulis "Museum"

Penampakan depan sepi, seperti gedung tidak berpenghuni namun ada beberapa kendaraan seperti mobil dan motor terparkir, kami mencoba mencari pintu masuk. Di dalam kami disambut dengan gadis manis berkemeja putih dan celana panjang hitam. "Silakan masuk," sapanya.

Kami diperkenalkan dengan penjaga museum senior bernama Agus Rukmana, pria asal Bandung yang sudah 27 tahun menetap di Kupang. "Di museum sini sangat sepi, bahkan saat liburan pun sepi. Minat warga di sini sangat kurang," kata pria berkacamata itu.

Menelusuri barisan etalase koleksi Museum Negeri Kupang hanya kami bertiga saja pengunjungnya, kami dikenalkan beragam khas NTT. Pertama soal tradisi memining di Kupang. Pak Agus bilang, gadis NTT di sini mahal. Untuk memining gadis di sini, keluarga mempelai pria harus membawakan gading gajah dan moko Makassar. Sama seperti adat di Makassar, moko yang terbuat dari perunggu itu sebagai simbol dari kelas sosial masyarakat. Semakin banyak moko atau gading gajah yang dibawa, semakin tinggi derajat kekayaannya. "Mungkin karena ada semacam istilah barter dan pertukaran budaya, adat Makassar dengan kami," kata Agus.

Untuk mendapatkan gading gajah dan moko butuh uang yang tidak sedikit, satu gading gajah bisa Rp. 7 juta. Belum lagi moko yang bisa mencapai belasan juta. "Biasanya pihak mempelai laki-laki membawa 5 moko yang terbuat dari gading," urainya.

Karena saking mahal mahar, kebanyakan pasangan kawin lari dari NTT. Mereka hanya mengadakan pesta nikah adat saja lalu pulang-pulang sudah membawa anak. "Kalau orang yang tidak mampu, mereka kawin lari dan kembali setelah punya anak," cerita pria berkumis itu.

Memasuki ruangan lain, kami menemukan tiga buah guci Tionghoa, satu guci tertutup rapat dan berukuran sebesar pot bunga. "Di dalam guci itu ada tengkoraknya," ungkap Agus. Sontak bulu kuduk kami sedikit tegang. Apa benar ada

tengkoraknya? Ternyata guci tersebut peninggalan adat Tionghoa untuk mengubur mayat menggunakan guci. "Waktu pembangunan jalan di sini, warga menemukan guci dari bekas kuburan Tionghoa. Kalau ditanya takut atau tidak, kami di sini tentu takut, di dalamnya masih bersemayam tengkorak kepala manusia. Apalagi kalau waktu sudah malam, jangan ditanya," ceritanya.

Penasaran benar atau tidaknya, saya meminta pak Agus untuk membukanya, namun sayang kami tidak diperbolehkan. Lalu kami dibawa ke ruangan budaya orang Flores. Katanya, setiap 6 bulan dalam setahun (Juni-Desember), orang Flores memunyai kebiasaan berburu ikan Paus. Ada lebih dari 18 jenis ikan paus di Kepulauan NTT menjadi santapan warga. "Kalau lagi panen, sehari kami bisa berburu 4-5 ikan paus dengan berat 32 ton," terangnya.

Mulai dari anak kecil, remaja, dan orang tua berbondong-bondong mencicipi daging ikan pemangsa itu. Pada pagi dini hari mereka bersiap ke laut membawa dua kapal dengan jumlah kru 20 awak kapal. Hanya berbekal tombak dan jaring mereka berburu ikan yang bisa menelan seluruh awak kapal tersebut. "Tidak jarang ada yang mati juga, tapi kita punya trik," selorohnya.

Biasanya, mereka mengincar bagian kepala ikan paus yang diikat ujungnya dengan tali. Bagi nelayan yang tidak kuat memegang ikatan tombak, maka akan tertarik ke bawah berenang bersama paus yang sekarat itu. "Kedalaman lautnya tidak ada yang tahu, makanya tidak jarang ada juga yang mati," katanya.

Mereka mengandalkan kerja sama dan kepercayaan, setelah paus telah *klenger* dengan serangan tombak di kepalanya, paus mati. Mereka menggeret dengan jaring ke permukaan pantai. Para ibu siap menukarkan sayur mayur belanjaan pasar dengan seongkok daging. "Kami biasa memasak dengan kuah asin, kalau di Jakarta harga sangkuk kecilnya Rp 500 ribu," imbuhnya.

Sayang sekali, saat ini bulan Maret. Kami tidak sempat menyaksikan langsung serunya berburu ikan paus bersama warga lokal. "Tapi kami punya aturan, kami tidak boleh memangsa ikan betina yang sedang hamil," jelasnya.

Begitu kaya lautan Nusa Tenggara Timur itu, bahkan sejak dahulu warga sudah menerapkan budaya itu bertahun-tahun lamanya tak mengurangi jumlah ikan paus di sana. Namun sayang, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11.00 siang, pesawat yang kami tumpangi akan berangkat ke Jakarta pukul 13.40, kami harus segera bergegas kembali ke hotel dan bandara. Perjalanan negeri 1001 pulau yang singkat ini memberikan banyak pengetahuan kita akan budaya NTT yang unik, indah, dan kekayaannya yang luar biasa. Semoga sepenggal cerita perjalanan ini, mengingatkan kita akan kekayaan Indonesia yang tiada tara dan menjaga kelestarian Indonesia. **(IFR)**

Kupang, 16 Maret 2016



Perahu nelayan melintas di antara pulau di laut sekitar Kupang, NTT, di pagi hari. Meski mayoritas warga NTT bekerja sebagai petani, profesi pelaut pun sangat banyak. NTT pun dikenal dengan kekayaan dan tradisi laut yang mendunia. Terdapat 19 jenis ikan paus ganas di NTT yang sering diburu setiap tahun sebagai bentuk tradisi warga



## Secuplik Narasi dari Palasari

*Bandung tidak hanya menawarkan sejumlah destinasi wisata kota yang indah dan mewah. Di sana kita juga bisa mendapatkan beberapa tempat yang melegenda bahkan belum pernah ada dalam daftar wisata kota.*



**B**ursa Buku (BB) Palasari, Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu titik persinggahan kami dalam perjalanan sepanjang 150 kilometer Jakarta-Bandung. Sore itu bersama rintik hujan yang terus mengetuk-ngetuk atap kendaraan, kami akhirnya tiba di sisi barat Jalan Palasari, Bandung. Deretan toko buku seolah-olah menjadi pembatas di antara Jalan Buah Batu dan Jalan Lodaya di atas tanah yang memanjang dari utara ke selatan.

Melewati kios-kios layaknya lorong kami singgah di sebuah toko buku. Kami pun terpaksa melihat ribuan buku di antara rak-rak yang menjulang hingga ke atap. Di balik sana, ratusan pelanggan sibuk mencari referensi buku yang belum ia dapat.

Beberapa penjual di BB Palasari masih bertahan sampai puluhan tahun, salah satunya Budiyanto. Lelaki rantau asal Yogyakarta ini sudah berada di Bandung sejak 1993, hampir sepanjang hayatnya banyak dihabiskan dengan berjualan buku.

Budiyanto berjalan cepat di antara rak dan tumpukan buku menuju salah satu koleksi. Di satu rak buku setinggi lima meter, kepalanya mendongak, matanya menyipit, mengamati beberapa buku sastra yang menjadi permintaan pelanggan. Dia lalu memberikan salah satu koleksi sastra terbaru sembari sibuk menyeka keringat di dahinya. Rutinitas tersebut ia lakukan setiap hari di BB Paasari, tepatnya di sebuah toko buku Bandung Book Center, yang merupakan salah satu toko paling besar dan paling laku di sana.

Meski kesana kemari mencarikan buku untuk calon pembeli, tak terlihat rasa putus asa yang menghampiri pria yang akrab disapa Budi itu. Sambil sesekali menjawab pertanyaan kami, tatapan mata pria 45 tahun itu terpusat pada buku yang diminta pelanggannya.

Hadirnya pasar dan toko buku murah di Bandung, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat umum. Pendetang pun bukan hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga orang-orang sedang berwisata di Bandung. Mereka yang kutu buku, tentu saja lebih senang berwisata dengan berburu buku murah maupun langka. Palasari adalah kawasan legendaris Kota Bandung dalam hal bursa buku murah. Konon, nama Palasari sudah populer ke mancanegara, terutama negara-

negara Eropa dan Asia Tenggara.

"Awalnya para pedagang buku yang dulu pernah berjualan di kawasan alun-alun pada era 70-an. Setelah sempat pindah ke kawasan Banceuy, pada 1990 mereka selanjutnya pindah ke Palasari hingga sekarang," ujar Budi.

Budi menuturkan, sejak saat itu, Palasari menjadi salah satu tempat favorit para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk mencari buku, hingga sekarang. Pasalnya, selain kelengkapan koleksi buku, juga diskonnya yang lumayan besar 20 hingga 30 persen.

"Rata-rata buku yang dijual di Palasari berdiskon 20 hingga 30 persen. Misalnya, harga buku yang seharusnya dijual secara umum 120.000/eksemplar, di BB Palasari bisa berharga 85.000/eksemplar," tutur Budi

Penjualan buku di BB Palasari terbilang murah, selain diskon yang besar hal demikian juga dikarenakan para penjual di BB Palasari hanya mengambil keuntungan sekitar 5 persen. Selain itu, mereka juga dibebaskan sewa tempat. Para pedagang hanya dipungut biaya retribusi sebesar lima ribu rupiah per tiga kios saban harinya.

BB Palasari buka mulai pukul 08.00 dan tutup pukul 17.00. Setelah berjalan puluhan tahun, BB Palasari tidak hanya dihuni oleh pedagang asal Jawa Barat, tetapi juga asal Minangkabau, kekerabatan yang erat antarwarga yang berasal dari Minang terbentuk oleh sejarah. Menurut Budi orang Minang datang ke Bandung sejak 1980, tidak heran jika beberapa toko buku masih dimonopoli oleh satu keluarga.

Keberadaan BB Palasari harus tetap dilestarikan di tengah maraknya toko buku *online* serta kemudahan mencari referensi di internet, budaya tersebut telah mengakibatkan konsumsi akan buku semakin berkurang. Lebih lanjut, Budi mengatakan menurunnya daya beli masyarakat sangat terasa sejak 2010.

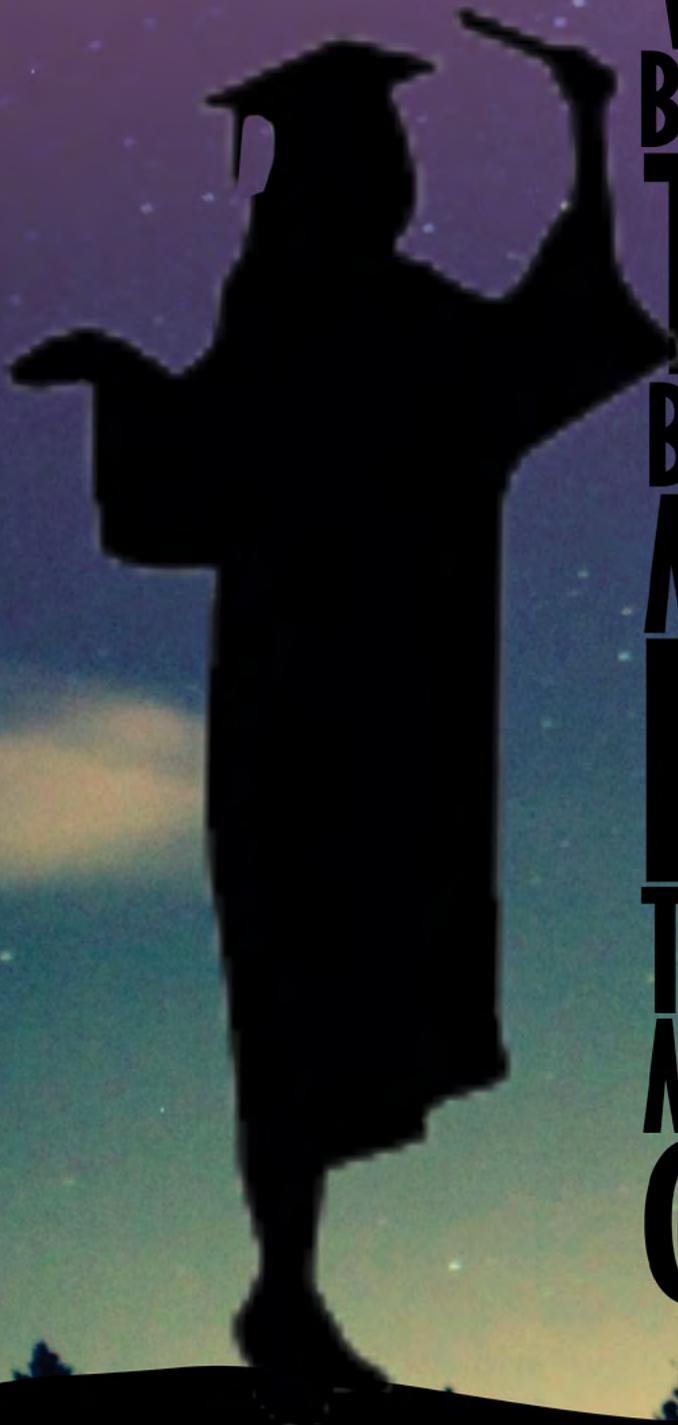
"Dulu sebelum tahun 2010 pembeli bisa mencapai 500 setiap harinya, saat ini paling banyak 200 hingga 300 orang setiap harinya," kata Budi

Terkait rencana pembangunan pasar modern di Palasari saat ini, Budi berharap BB Palasari tidak diubah, apalagi dipindahkan. Pasalnya, BB Palasari sudah memiliki ciri khas tersendiri yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Bandung.

Matahari senja perlahan-lahan luruh ketika mobil membawa kami ke salah satu hotel. Semburat sinar merahnya yang lembut menjadi background gedung-gedung hotel. Suasana senja di Bandung saat matahari mulai tak terlihat di ufuk barat terasa begitu menggetarkan. **(MSR)**



**WANITA  
BERPENDIDIKAN  
TINGGI  
BUKAN UNTUK  
MENYAINGI  
LELAKI  
TAPI UNTUK  
MEMBANGUN  
GENERASI**



# Jadi Wartawan Bang Pepe

Mulai tebar pesona.....



WAH..  
PESANG PETAHANA  
BAKAL SERU NIH



Cari Dukungan



PEMIMPIN  
KORUP & KASAR  
GAK MENCERMINKAN  
BUDAYA KITA!!

KPK HARUS  
SEGERA TETAPAN  
PETAHANA  
TERSANGKA

YAKIN  
PETAHANA BERSALAH??



BEBERAPA HARI KEMUDIAN...



TANGKAP TANGAN KPK  
KASUS SUAP RAPERDA  
REKLAMASI TELUK  
JAKARTA



sang KAKAK angkat bicara...

Bagaimana jika anda  
menjadi tersangka juga



LARI....

TOLONG...

WUSH....



ROBERT NA ENDI JAWENG

◆

## PENELITI HARUS PUNYA PEMIKIRAN BERBEDA

*Saat reformasi, mahasiswa menuntut tiga hal penting. Yakni, hapus dwi fungsi ABRI, hapus KKN, dan Otonomi Daerah. Setelah 18 tahun berakhir, banyak aktivis mahasiswa '98 yang terjun di dunia politik. Tetapi tidak bagi Endi. Ia mengambil langkah berbeda dari aktivis lainnya, ia justru melibatkan diri sebagai peneliti yang memusatkan kajian di bidang otonomi daerah. Langkah ini dia ambil karena menurutnya, negara seharusnya bisa maju melalui daerah. Cita-cita yang tidak mudah meneruskan semangat tuntutan reformasi kala itu. Tetapi langkah ini tetap ia jalani dengan sepenuh hati demi mencapai kesejahteraan dan demokratisasi daerah.*

**T**umpukan ratusan buku sesak memenuhi ruangan berukuran 3x4 meter itu. Bagaimana perpustakaan pribadi, berbagai judul buku saling berhimpitan di lemari, dan meja kerja Direktur KPPOD (Komite Pemantau Pelaksana Daerah), Robert Na Endi Jaweng.

Sambutan telapak tangan gemuk, diulurkan menyambut salam dan menyapa dengan senyum manis dan pipinya yang mengembang. Pria berpostur tubuh gemuk, dan berkaca mata itu mulai bercerita perjalanannya sebagai seorang peneliti dan Direktur KPPOD. "Kita mulai dari latar pendidikan saya ya," imbuhnya.

Sambil sesekali menghela napas karena sesak, Endi begitu ia disapa menuturkan bahwa sejak di bangku SMA dirinya memang senang berbicara. Pria kelahiran Flores, 17 November pada 40 tahun silam itu mengaku lebih senang mengambil jurusan IPS dibanding IPA. "Karena IPS itu ilmu yang berpikir kreatif, saya tidak suka IPA karena terlalu ketat dengan aturan dan rumus," ungkapnya sambil membenarkan kacamata yang mulai turun.

Kemantapan di ilmu sosial mulai mantap kala Endi tamat SMA. Dia memutuskan untuk mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Begitu banyak jurusan ilmu pemerintahan dan politik di berbagai universitas, tetapi UGM menjadi pilihannya karena berbagai pertimbangan. "Saya memilih UGM, karena ilmu pemerintah di sini menyiapkan mahasiswanya menjadi pemikir bukan pekerja di pemerintahan/administrasi negara. Satu hal lagi, karena di Jogja banyak aktivis, dan budaya

diskusi dan membacanya masih kental,” katanya.

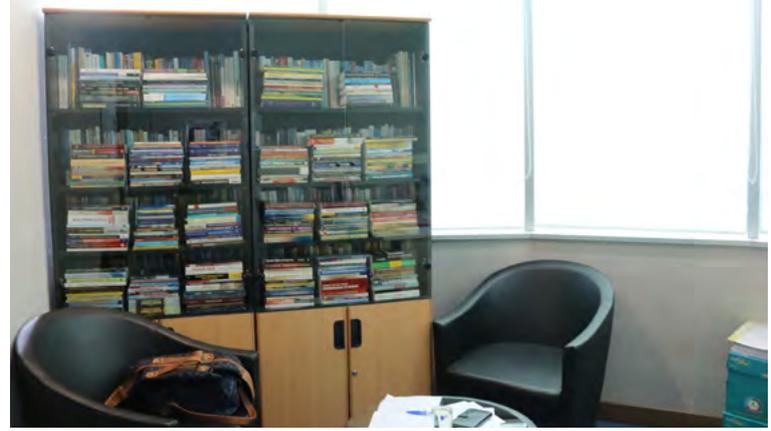
Masuk kuliah pada 1995, di masa peralihan orde baru dan reformasi kala itu belum banyak mahasiswa yang progresif terhadap politik pemerintah. Teman-teman Endi banyak yang bergabung pada himpunan jurusan yang banyak dipantau oleh birokrasi kampus. Endi malah memilih organisasi ekstra kampus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. “Saya pilih organisasi ekstra kampus karena dinamikanya lebih kencang dibandingkan dengan organisasi internal,” jelasnya.

Aktif di dunia mahasiswa, membuatnya bertemu banyak pemikir dan aktivis mahasiswa dari jurusan bahkan universitas lainnya. Seperti HMI, GMNI, PMII dan sebagainya. Endi mulai memetakan isu terkait untuk menuju masa reformasi. Sebagai aktivis ‘98, Endi merumuskan beberapa isu yang menjadi krusial di masa peralihan itu. “Selain menumbangkan Soeharto, kami mahasiswa memunyai tuntutan penting. Pertama: hapus dwi fungsi ABRI. Kedua: hapus KKN, dan ketiga: otonomi daerah,” imbuhnya.

Gerakan mahasiswa secara massif di beberapa kota termasuk Yogyakarta, tempat Endi menuntut ilmu bisa dikatakan berhasil. Banyak teman-teman seperjuangan dulu juga terjun di dunia politik atau lembaga anti korupsi seperti ICW. Tetapi, tidak bagi bagi Endi. Dia memutuskan mengambil langkah beda, langkah meneruskan tuntutan aktivis mahasiswa kala itu yang kurang mendapatkan perhatian.



Selesai mengenyam pendidikan sebagai sarjana ilmu pemerintah UGM, Endi ke Jakarta dan bertemu dengan berbagai elemen untuk mendirikan KPPOD. KPPOD sendiri dibentuk dari inisiasi 3 komponen dan 7 institusi berdasarkan hasil seminar pada 2006 tentang menyelamatkan otonomi daerah. Tiga komponen itu terdiri dari pelaku usaha: Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) melalui KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional), lalu komponen dari media massa: Suara Pembaruan, The Jakarta Post, dan Bisnis Indonesia, dan ada komponen dari akademisi seperti CSIS, dan LPM UI. “Bagi saya suatu kebanggaan, tiga komponen



Ruang kerja Robert Na Endi Jaweng

dari seluruh lapisan masyarakat bersatu peduli terhadap otonomi daerah,” paparnya sambil tersenyum lega.

Berdiri sejak akhir 2000 lalu mulai berkembang pada 2001, KPPOD memunyai tiga misi utama sebagai lembaga yang fokus membantu peran pemerintah. Endi sendiri mengaku tugas otonomi daerah tidak boleh terfokus pada pemerintah saja, harus ada lembaga yang mengawasi otonomi daerah. Pada awal berdirinya KPPOD bahkan sudah menandatangani MoU bersama Ditjen Otda Kemendagri kala itu sebagai *partner* pemerintah. “Makanya *tagline* kami *partner in progress*, namun kita juga melakukan kritik dan pengawasan melalui tekanan dari dalam dan membantu dari dalam tentang perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Tidak banyak memang kolaborasi antara komponen masyarakat dengan lembaga daerah yang bisa bersatu dengan capaian bagus. Berbagai hasil penelitian mengenai kemajuan daerah seperti potensi ekonomi setiap daerah pun mulai dipetakan oleh Endi dan kawan-kawan. Karena banyak berlatar belakang pemikir ekonomi, pusat kajian KPPOD mengambil kajian ekonomi daerah. “Kita memilih ekonomi daerah karena ini menjadi penting tapi terlupakan,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah banyak berpusat pada ekonomi pusat, padahal sebagai potensi pembangunan negara ada di daerah-daerah. “Coba Anda bayangkan, banyak pengusaha asing datang ke daerah yang memunyai banyak potensi, tapi penduduk lokalnya tidak tahu potensi kekayaan daerahnya sendiri,” katanya.

Sebagai peneliti, Endi berharap pemerintah bisa lebih memerhatikan daerah. Seperti izin usaha seperti UMKM. Catatan KPPOD mengatakan izin usaha di seluruh Indonesia sudah mencapai 1.200 jenis izin, namun sebagian besar (518 izin) berpusat di ibukota. “Regulasinya harus jelas, perdesaan jangan diberikan sanksi. Tapi diberikan fasilitas,” ucapnya.

Saat ditanya bagaimana sebaiknya lembaga litbang dalam negeri sebaiknya mengambil langkah, dirinya berharap sebagai lembaga *think tank* pemerintahan sebaiknya regulasi lahir dan bermitra dengannya yang banyak terjun ke lapangan langsung. “Ada 500 perda yang kami *review*, dan 20 persen di antaranya bermasalah. Kami berharap Kementerian Dalam Negeri bisa bermitra lebih luas dengan kami dalam mendukung kesejahteraan ekonomi daerah,” harapnya. **(IFR)**

# INOVASI IPTEK UNTUK MENUMBUHKAN KEUNGGULAN DAERAH

*Sejak berdiri kembali sebagai sebuah institusi mandiri pada 2014, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi NTT terus berevolusi sejalan dengan perkembangan daerah dan perkembangan teknologi informasi global.*

**B**PP Provinsi NTT telah berdiri sebagai SKPD sejak 2014. Kehadiran UU No 23 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar yang menguatkan eksistensi dan peran BPP Provinsi NTT sebagai lembaga kelitbang pemerintah daerah. Kehadiran UU No 23 Tahun 2014 juga menjadi salah satu dasar bagi BPP Provinsi NTT untuk terus meningkatkan kualitas serta kontekstualitas hasil-hasil penelitian berbasis inovasi.

“Kehadiran UU tersebut juga dapat menjadi acuan sekaligus rujukan bagi BPP Provinsi NTT untuk membina instansi kelitbang di kabupaten/kota se Provinsi NTT agar dapat menjadi SKPD yang terpisah dari Bappeda,” jelas Kosmas D Lama, Kepala BPP Provinsi NTT.

Tahun 2016 merupakan momentum persaingan setiap daerah dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat, momentum tersebut menjadi salah satu motivasi setiap BPP di daerah untuk terus meningkatkan kualitas penelitian serta menjadi salah satu lembaga penting pendukung pembangunan daerah.

BPP Provinsi NTT tahun ini terus berbenah dengan melakukan penyusunan berbagai program dan kegiatan secara terencana yang diarahkan pada kegiatan inovasi IPTEK. Kosmas mengatakan, inovasi IPTEK merupakan program kegiatan dalam rangka menumbuhkan dan menunjang, serta mengembangkan keunggulan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang ada. Selain itu, perhatian penelitian juga diarahkan untuk mengatasi beberapa persoalan di



**Kosmas D. Lama**  
Kepala BPP Provinsi NTT

bidang kesehatan seperti penanggulangan penyakit malaria dan pengujian tanaman obat tradisional bagi penyembuhan penyakit hepatitis dengan basis dan karakter inovatif.

Program pengembangan inovasi IPTEK juga menjadi program kegiatan BPP Provinsi NTT pada 2015. Program tersebut di antaranya dengan melakukan uji keamanan (toksisitas akut dan kronis/sub kronis) tanaman faloak sebagai obat tradisional penyakit hepatitis viral, pengembangan irigasi tetes, pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen produk industri pangan berbasis



jagung, indeks epidemiologi malaria kepulauan untuk kader kesehatan dalam pengendalian malaria, serta dampak kapitalisasi pedesaan terhadap perekonomian desa di Provinsi NTT.

“Penelitian tersebut memang direncanakan dengan mementingkan asas kebermanfaatan. Misalnya penelitian uji keamanan (toksisitas akut dan kronis/sub kronis) tanaman faloak sebagai obat tradisional penyakit hepatitis viral dan pengembangan irigasi di NTT. Pembangunan Irigasi pada masa mendatang program-program tersebut akan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat NTT terkait pemanfaatan air bagi usaha pertanian di lahan kering. Sedangkan, pemanfaatan tanaman faloak bertujuan untuk mengetahui kadar atau dosis keamanan dalam mengkonsumsi tanaman faloak sebagai obat tradisional penyembuh penyakit hepatitis,” ujar Kosmas.

#### **Produk kelitbangan**

Dalam rangka mendukung program inovasi daerah, BPP Provinsi NTT juga turut aktif, salah satunya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Ristek dan Dikti dalam usaha pengembangan SIDA (sistem inovasi daerah). Selain itu setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh BPP Provinsi NTT juga dipublikasikan dalam bentuk jurnal. BPP Provinsi NTT saat ini juga memiliki Jurnal Flobamora yang dikelola sendiri oleh BPP Provinsi NTT.

Jurnal Flobamora memuat seluruh hasil penelitian, kajian, dan pemikiran ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan provinsi NTT di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup. Jurnal tersebut terbit empat kali dalam setahun yaitu pada Maret, Juni, September, dan Desember, menurut Kosmas, yang juga pemimpin redaksi, Jurnal Flobamora terbit pertama kali pada 2015 dengan

memuat 5 karya ilmiah.

“Jurnal ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Jurnal itu sangat penting dan bisa menjadi komunikasi antara para peneliti untuk mengetahui perkembangan terkini ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam multi bidang baik ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, IPTEK, dan lingkungan hidup,” kata Kosmas.

Kosmas mengakui, saat ini beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BPP Provinsi NTT masih belum mendapatkan tempat yang tepat sebagaimana mestinya dalam sistem perencanaan program kegiatan. Hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi BPP Provinsi NTT dan setiap elemen yang terkait di dalamnya untuk terus membina dan meningkatkan koordinasi, konsultasi dengan berbagai *stakeholders*. Selain itu, BPP Provinsi NTT juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas SDM kelitbangan, kualitas penelitian serta meningkatkan kadar inovasi berbasis keunggulan daerah dalam setiap penelitian.

Kepala BPP Provinsi NTT juga tidak menampik sejauh ini belum ada hasil-hasil riset yang bisa dimanfaatkan secara signifikan oleh masyarakat. Kendati demikian, menurutnya asas manfaat selalu menjadi acuan dan pedoman peneliti dalam setiap penelitian sebagai motivasi dalam rangka membunikan hasil-hasil penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Asas manfaat juga mengharuskan setiap penelitian berdasar pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan pun dapat berupa penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat,” imbuhnya. (MSR)

## MENAMBAH KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM P3A

*Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menjadi solusi untuk mensejahterakan para petani yang terdapat di tujuh kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Timur. Tujuh daerah tersebut dipilih dikarenakan memiliki lahan persawahan yang cukup besar.*

**M**eski memiliki potensi perikanan laut sangat besar mencapai 388,7 ton setiap tahun, serta 5.700 kilometer garis pantai dengan wilayah laut sekira 200 ribu kilometer persegi, pertanian tetap menjadi dambaan masyarakat NTT. Dalam Rakornas

Sampah di Provinsi NTT, semua penelitian tersebut diarahkan untuk penemuan jalan ke luar bagi beberapa permasalahan masyarakat,” tutur Kosmas.

P3A memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mengetahui pola pemberdayaan P3A dan persepsi petani terhadap pengelolaan jaringan irigasi, untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan faktor produksi padi sawah, dan juga untuk mengetahui dan mengukur kesejahteraan petani P3A di Provinsi NTT.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BPP Provinsi NTT mengenai P3A tersebut, telah dihasilkan beberapa rekomendasi antara lain peningkatan luas fungsional dengan memerhatikan beberapa aspek penting yaitu ketersediaan air, sifat-sifat tanah di daerah aliran sungai yang airnya akan dimanfaatkan untuk irigasi, topografi daerah pengaliran, dan curah hujan di hulu sungai maupun di dataran rendah.

Dari segi peningkatan peran kelembagaan diperlukan koordinasi antara dinas terkait, yaitu Dinas PU dan Dinas Pertanian, dalam hal pendampingan dan pelatihan bagi kelembagaan pengelola irigasi, tenaga pendamping masyarakat, dan kelompok pemandu lapangan.

“Hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknik irigasi dilakukan oleh Dinas PU sedangkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknik budidaya dilakukan oleh Dinas Pertanian, selanjutnya perlu juga memberdayakan KPI, TPM dan KPL untuk melakukan tugasnya secara intensif bersama pengurus P3A.” ucap Kosmas.

P3A juga dapat mendorong kemudahan petani mendapatkan input produksi, meningkatkan pengetahuan petani melalui penyuluhan tentang pengaturan atau alokasi input, mempermudah pemasaran produk, dan memperkuat posisi tawar terhadap harga jual beras. Dalam hal ini Dinas Pertanian perlu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, berkaitan dengan pengadaan input dan pemasaran hasil.

“Rekomendasi selanjutnya adalah pemerintah melalui Dinas Pertanian sebaiknya tidak sebatas sosialisasi mengenai teknologi budi daya padi, tetapi juga melakukan pendampingan dan bimbingan melalui pembuatan kebun percontohan sehingga dapat meningkatkan efisiensi teknis,” kata Kosmas. (MSR)

Kelitbangan 2016 yang dilaksanakan di Kupang, NTT pada 14-16 Maret lalu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, NTT tetap berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan, Frans menyadari lebih dari 80 persen warga NTT bermata pencaharian petani dan tinggal di desa-desa.

P3A menjadi salah satu dari enam program penelitian 2015 BPP Provinsi NTT, menurut Kepala BPP Provinsi NTT Kosmas D lama, penelitian yang dilakukan lebih diarahkan pada penemuan jalan ke luar bagi beberapa permasalahan kemasyarakatan provinsi NTT.

“Penelitian tidak terbatas pada pemberdayaan petani, hal lain yang menjadi program BPP Provinsi NTT di antaranya mengenai Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pendekatan Budaya Dalam Pelaksanaan Perbaikan Daya Dukung Padang Pengembalaan di Pulau Timor, Efek Pemberitaan Media Massa Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi, Pola Penanganan TKI, serta Profil Pengelolaan



Kunjungan Kerja DPRD Komisi IV

## IDEALISME BPP PROVINSI NTT

**B**adan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi NTT saat ini memiliki 10 fungsional peneliti dan 7 orang calon fungsional peneliti (2 orang sedang diproses, 5 orang lainnya masih berstatus CPNSD). Fungsional peneliti dilibatkan secara aktif dalam semua rangkaian kegiatan kelitbangan pada BPP Provinsi NTT sebagaimana amanat Permendagri No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik sebagai ketua tim maupun sebagai anggota tim penelitian.

Keterlibatan aktif ini juga disesuaikan dengan bidang kepakaran masing-masing fungsional peneliti untuk memudahkan para peneliti tersebut memperoleh angka kredit. Para fungsional peneliti juga dilibatkan dalam berbagai ajang diskusi dan pembicaraan atau seminar regional juga nasional untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Dalam rangka menciptakan BPP ideal, BPP yang berada di Jalan Fetoer Foenay Kolhua, Kupang, secara sistemik, kelompok jabatan fungsional diketuai oleh seorang koordinator peneliti.

“Koordinator ini menjadi semacam wakil bagi para peneliti untuk urusan eksternal, baik dengan lembaga tempat naungannya maupun lembaga penelitian lainnya. Koordinator ini juga dipercayakan sebagai perwakilan para peneliti untuk urusan internal di antara sesama peneliti yang bertujuan untuk mempererat kerja sama, kesolidan, dan kredibilitas para peneliti,” ujar Kosmas

Upaya idealisasi BPP ditempuh dengan beberapa strategi, salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada. Kosmas mengatakan, peningkatan kualitas SDM kelitbangan tetap menjadi target yang terus diupayakan oleh BPP Provinsi NTT, menurutnya kualitas SDM peneliti sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil kelitbangan. Hal tersebut akan terus diupayakan di tengah beberapa kendala yang masih menghantui BPP Provinsi NTT saat ini, kendala tersebut di antaranya belum adanya tenaga fungsional perekayasa, belum tersedianya tenaga fungsional peneliti muda, madya dan utama. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang penelitian juga masih menjadi kendala BPP Provinsi NTT, serta belum optimalnya peran BPP Provinsi NTT sebagai lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, juga koordinasi program dan kegiatan kelitbangan antar-SKPD dan antar-BPP kabupaten yang belum berjalan secara baik.

“Di sisi lain belum terbentuknya Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota, belum dilaksanakannya analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan di setiap SKPD yang ada Pemerintah Provinsi NTT sehingga hasil-hasil penelitian dapat digunakan oleh setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT,” terang Kosmas.

Terkait Rakornas Kelitbangan 2016 yang dilaksanakan di Kupang beberapa waktu lalu, Kosmas berharap bisa dijadikan momentum dalam rangka penguatan lembaga BPP khususnya yang ada di daerah, terlebih NTT sebagai tuan rumah. Menurutnya, hasil pelaksanaan Rakornas Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri dan





pemerintah daerah akan diarahkan pada kepentingan pemerintah provinsi dan BPP Provinsi NTT, terutama yang berkaitan dengan isu kemaritiman, Rakornas juga sebagai momentum pengembangan segala potensi martim yang terkandung di dalamnya.

“Hasil Rakornas ini diharapkan akan menjadi media penyaluran dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah terutama juga BPP Provinsi NTT untuk mengembangkan potensi kemaritiman di NTT secara optimal melalui aneka kegiatan kelitbangan,” ujar Kosmas.

Rakornas yang mengusung tiga tema besar tersebut (Kelembagaan, Inovasi Daerah, Kemaritiman) menjadikan inovasi daerah dan kemaritiman sekaligus menjadi agenda besar BPP Provinsi NTT. Dua hal tersebut dipandang sebagai hal yang urgen dikarenakan BPP Provinsi NTT membutuhkan sebuah karakter inovatif dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Karakter tersebut kemudian akan menumbuhkan kontekstualitas hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan daerah dan masyarakat. Di lain pihak, Kontekstualitas tersebut membantu eksistensi BPP Provinsi NTT dalam meningkatkan posisi tawar dan nilai jual BPP terhadap pemerintah daerah dalam mata rantai kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

Isu kemaritiman juga menjadi penting bagi BPP Provinsi NTT. Kemaritiman yang menjadi salah satu isu nasional yang terkandung dalam Nawacita Presiden

Joko Widodo yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi salah satu dari enam konsentrasi program strategis Provinsi NTT. Isu ini juga sangat sesuai dengan kondisi geografis provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dengan luas laut lebih dari 200 ribu kilometer persegi. Kondisi geografis tersebut juga menyimpan beragam potensi kemaritiman yang perlu dikembangkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat NTT.

“Peran BPP Provinsi NTT ada pada titik tersebut. Isu ini menantang peran BPP Provinsi NTT untuk secara inovatif membantu mengembangkan aneka potensi kemaritiman provinsi NTT melalui berbagai kegiatan kelitbangan,” ungkap Kosmas.

Menurut Kosmas kerja sama dan koordinasi yang telah terbangun antara BPP Provinsi NTT dengan BPP Kemendagri perlu terus dibina dan dibangun ke tingkat yang lebih erat.

“Lebih saling mendukung dan lebih koordinatif dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan di tingkat pusat dan daerah. Peluang kerja sama pelaksanaan kegiatan kelitbangan antara BPP Provinsi NTT dengan BPP Kemendagri kiranya dapat terus dibuka secara lebih luas. Peluang tersebut dibuka dengan tujuan untuk menanggapi berbagai persoalan yang mengemuka di daerah. Selain itu peluang kerja sama ini bertujuan untuk menemukan langkah-langkah pemecahan sekaligus untuk meningkatkan peran dan eksistensi BPP di daerah,” tutup Kosmas. (MSR)

# MENCARI PEMIMPIN YANG TIDAK TUNTAS

JUDUL Change Leadership Non-Finito

PENULIS Rhenald Kasali

PENERBIT Mizan dan Rumah Perubahan

TAHUN TERBIT Desember 2015

JUMLAH HALAMAN 376 halaman

HARGA Rp 109.000,-

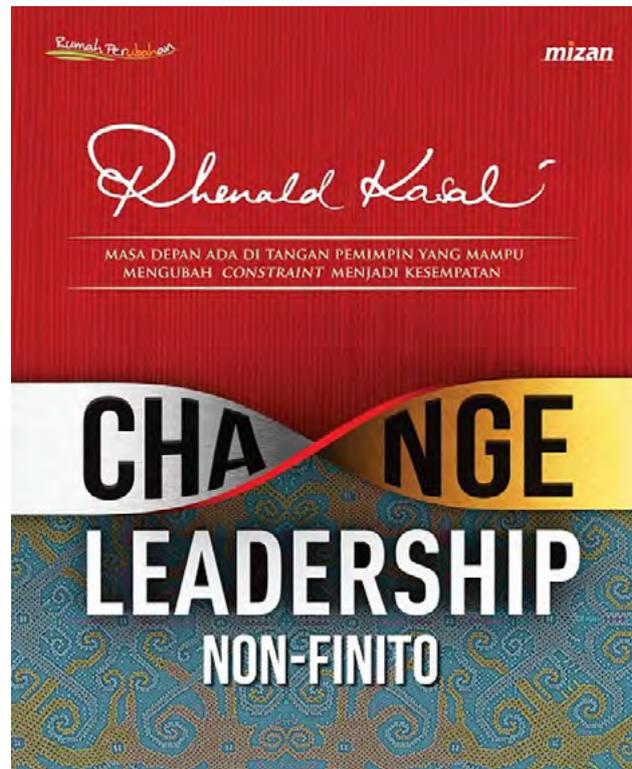
**M**elihat judul di atas, mungkin seringkali kita menemukan sosok pemimpin yang tidak tuntas. Mengerjakan visi-misinya atau meneruskan visi misi terdahulu yang tidak selesai. Menuntaskan hasil kerja memang menjadi tekanan tersendiri. Itulah *legacy* yang seakan-akan harus ditinggal oleh setiap pemimpin. Terlebih lagi para pemimpin perubahan.

Namun, melakukan perubahan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak resiko yang harus dibayar. Berbahaya, bahkan tidak jarang mengancam jiwa. Seperti karya hebat patung karya Michelangelo, misalnya, atau yang biasa dikenal dengan nama *The Naked Slave*. Dalam manajemen perubahan karya seni itu dikenal dengan filosofi *Non-Finito* atau karya seni yang tidak tuntas.

Apakah para ahli mengkritik Michelangelo? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dengan bangga memajang karya tersebut di museum, meski karya tersebut belum tuntas, masyarakat dari berbagai negara berduyun-duyun datang ke museum.

Lalu apa hubungannya dengan pemimpin? Dalam buku ini Rhenald mengatakan, pemimpin besar adalah pemimpin yang mampu keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan meski *non-finito*.

Sebut saja beberapa pemimpin seperti Jamil Mahuad (Presiden Ekuador), yang saat pencalonan dirinya, keadaan ekonomi Ekuador mulai membaik, tapi saat dia menjadi presiden suasana berubah. Harga minyak dunia turun drastis, inflasi melonjak hingga 60 persen, bencana kekeringan dimana-mana. Lalu Mahuad memanggil para pakar ekonomi untuk bangkit dari keterpurukan, semuanya memberikan masukan



teknis yang menakjuban. Tetapi masukan teknis itu terlalu rasional, sementara krisis adalah sebuah gejala sesaat yang penuh emosional. Dari kesulitan itu, dia mengambil langkah beda. Ia mengajak 'kelompok kaya' untuk menandatangani badan-badan dunia untuk mendapatkan bantuan. Kelas menengah harus membayar pajak lebih besar, menunda konsumsi, membiasakan hidup lebih tertib, memangkas subsidi energi, dan sebagainya.

Akibatnya, harga ikut-ikutan naik dan mengakibatkan 9 dari 40 bank di negeri itu gulung tikar. Belum setahun, rakyat sudah berubah haluan, popularitas Mahuad merosot dari 70 menjadi di bawah 20 persen. Ketidakpastian dan gejolak ekonomi mengancam. Januari 2000, Mahuad didemo dan dikudeta, ia melarikan diri ke luar negeri. Waktunya sudah habis.

Menurut catatannya, harusnya dia tidak melakukan pendekatan teknis. Sebaik apapun formula ekonomi tersebut, ada hal yang seringkali dilupakan oleh pemimpin. Kelas menengah menghasut rakyat, mengatasnamakan rakyat untuk melawan, semata-mata mereka tidak mau membayar kenikmatannya.

Di Indonesia juga, misalnya, terkadang kita takjub dengan pemimpin yang dulu dibesar-besarkan namanya, mendapatkan banyak penghargaan tiba-tiba tersandung kasus korupsi. Seperti Untung Wiyono, Bupati Sragen dan I Gede Winasa, Bupati Jembrana. Keduanya mendapatkan penghargaan *Leadership MDGs Award 2009* karena berhasil membuat pelayanan



satu atap, membangun tata kelola, merampingkan anggaran, *e-government*, merubah sistem dan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya pemberitaan tersebut menjadi episode berbahaya manakala buih-buih *Arousal* berada di titik bahaya.

*Arousal* adalah gejala psikologis yang membuat manusia bergairah, tertantang, dan melangkah maju. Manusia membutuhkan *arousal* sampai tahap tertentu, dan terjadi ketegangan atau stress. Namun stress tersebut terdiri dari dua jenis, stress yang berakibat baik, dan stress yang berakibat buruk. Apabila manusia sampai tahapan tertentu, *arousal* bisa mendorong kinerja yang dihasilkan melalui *good stress*, namun jika sudah melampaui relatifnya, akan berkebalikan, *arousal* akan beralih ke arah negatif, karena yang bekerja adalah hormon-hormon *bad stress*.

Namun apakah *non-finito* adalah cemooh yang tidak dianggap melakukan perubahan? Bagi Rhenald, itu salah besar. Apa pun teorinya, sebuah karya perubahan besar meninggalkan sebuah jejak dan pesan meski tidak tuntas. Adanya sebuah keadaan *constraint* (keterpaksaan) yang kini amat menggejala, yaitu ketidakpastian selalu dihadapi oleh pemimpin. Mau tidak mau, siap tidak siap. Pemimpin perubahan akan mengalami ketidakpastian yang menghambat jalur perubahan dia untuk keluar dari zona nyaman.

Rhenald menyarankan dua hal, pertama hadapi ketidakpastian tersebut. Jangan menunggu hingga rencana lengkap baru bergerak. Lalu kedua, pahami keempat hal ini dalam konteks ekonomi baru, yakni *Where Are Things? When Do Things Happen? Why Do Things Happen? And What Is True, What Is False?*

Apa maksudnya? Pertama cara memandang tempat kita secara fisik. Tengoklah konsep telah berubah menjadi *cyber space*. *Boundary* atau batas-batas yang telah dirobohkan menjadi *boundaryless*. Ketika batas-batas sudah tidak relevan lagi, maka Anda harus membentuk komunitas baru yang benar-benar baru. Lalu soal waktu, waktu yang singkat harus dipersiapkan secara berkala dan disiplin.

Selanjutnya bicara tentang *why*, Rhenald menghubungkan sebab-akibat. Sebaiknya para pemimpin membuat semacam poling, mengukur rating berdasarkan survei dari tindakannya lalu dikoreksi orang lain dan lawan-lawannya. Terakhir, mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Dari sini Rhenald bicara soal persepsi dan perspektif. Selama pemimpin miskin perpektif, maka pemimpin itu akan mudah menolak. Namun jika kaya perspektif, maka dia akan mencoba menahan diri, karena mampu melihat sudut pandang dari jauh.

Dalam buku ini, Rhenald mengajarkan betapa tidak seharusnya masyarakat mencemooh atau menghujat para pemimpin perubahan yang tidak rampung menuntaskan visi misinya, bukan hal yang mudah memang. Apalagi pengalamannya yang banyak mendampingi pemimpin daerah melalui Rumah Perubahan yang digagas olehnya. Banyak pemimpin yang bercerita tentang gesekan dan intervensi dari lawan politik dan situasi 'ketidakpastian'. Di epilog, dia mencotohkan betapa banyaknya pemimpin perubahan yang tidak bernasib baik, seperti Galileo Galilei, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela dan masih banyak lagi.

Jatuh bangun dalam memimpin sudah pasti harus menjadi santapan pokok para pemimpin, sebagai warga yang baik hendaknya masyarakat banyak melihat dari perpektif dan kacamata yang lebih luas. Kalau kata Bung Karno JASMERAH "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah". Setiap pemimpin yang meninggalkan jejak perubahan meski belum tuntas karena terhambat *deadline* atau desakan intervensi adalah pemimpin yang mampu mengubah *constraint* menjadi perubahan.

Namun sayangnya, dalam buku ini Rhenald tidak bisa menyajikan beberapa contoh dan gaya pemimpin yang berhasil mendecak kagum para pembacanya. Kacamata Rhenald seringkali memberikan contoh pemimpin yang memunyai ikatan kedekatan dengannya. Seperti Awang Faruk Ishak, Gubernur Kaltim yang terus disorot karena melakukan pembatasan eksploitasi Kalimantan. Meski begitu, Rhenald berusaha menyuguhkan contoh pemimpin yang tidak terlihat oleh sorot mata kamera media, dan memberikan perspektif baru tentang pemimpin perubahan.

Ia dengan tegas mengatakan, pemimpin perubahan adalah pemimpin yang bisa memperbaiki hidup, bangsa dan keturunan. Bukan hanya menggunakan jabatan untuk mengimpresi, pamer kekuasaan, apalagi mewariskan kerusakan. Seorang *change leader*, tidak pernah takut dan menyerah akan banyaknya resiko. Ia akan terus berjuang mewujudkan karya dan impian, meski harus menghadapi ketidakpastian (*non-finito*), kekurangan biaya, kekurangan dukungan masyarakat, ketidakpastian perekonomian, dan kehabisan waktu. (IFR)

Memasuki April, sebagian masyarakat Indonesia menantikan karya besutan Riri Riza dalam film *Ada Apa Dengan Cinta 2* (AADC 2). Film yang mengisahkan dua insan remaja SMA, Cinta dan Rangga pasti membuat seluruh masyarakat penasaran atas kisah cinta mereka yang terputus selama 14 tahun lebih. Tidak hanya AADC 2, bukan sekadar cinta di bulan April juga dikemas dalam nuansa perjuangan dan tokoh inspiratif perempuan, RA. Kartini. Film yang diproduksi dari MNC Picture itu mengajarkan penontonnya bahwa seenggok daging yang disebut manusia memang tidak pernah luput dari cinta, sejauh dan sehebat apapun orang itu. Kedua film ini, menyajikan kisah cinta yang bukan sekadar cinta. Bukan dua insan muda-mudi yang saling mengaitkan kelingking dan berjalan bergandengan, tetapi tentang perjuangan cinta yang luar biasa. Seperti apa? Yuk saksikan resensi di bawah ini.



## ADA APA DENGAN CINTA 2

**SUTRADARA** Riri Riza

**PRODUSER** Mira Lesmana

**PENULIS NASKAH** Mira Lesmana & Prima Rusdi

**PEMAIN** Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Titi Kamal, Adinia Wirasti

**RILIS** 28 April 2016

**S**empat hadir dalam mini drama pada ajang promosi LINE, menurut sang sutradara, Riri Riza cerita dalam film ini berbeda sekali dengan mini drama.

Melepaskan kepenatan hiruk pikuk Jakarta, Cinta and The Genk berencana berlibur ke Jogja. Latar belakang Kota Jogja yang ramah, penuh dengan budaya lokal, dan berpendidikan menjadi pilihan yang tepat bagi Cinta (Dian

Sastro) Milly (Sissy Priscillia), Maura (Titi Kamal), Karmen (Adini Wirasti), dan Mamet (Dennis Adiswara) menghabiskan waktu bersama-sama.

Keadaan sudah berbeda dari 14 tahun yang lalu, Maura sudah menikah dan memunyai anak. Dalam film AADC 2 ini, suami dan anak Maura adalah suami asli Titi Kamal sebagai pemeran Maura, yakni Christian Sugiono dan Arjuna Zayan Sugiono. Sementara Milly tengah hamil anak Mamet teman SMA *cupu* yang dulu sempat menyukai Cinta. Karmen masih betah dengan status *single*. Lalu Alya yang dulu dikisahkan paling dekat dengan Cinta itu, dikisahkan sudah meninggal karena dia sedang menempuh pendidikan di luar negeri dan tidak bisa ikut bermain peran di AADC 2. Sementara Cinta? Dia sudah memunyai tunangan.

Saat mereka berlibur di Jogja karena sudah lama tidak kumpul, tiba-tiba Cinta bertemu dengan Rangga (Nicholas Saputra) yang mendapat tugas ke Yogyakarta sekaligus menjenguk ibunya yang tinggal di Jogja. Menurut Mira Lesmana, film kali ini sebenarnya berceritakan tentang kisah cinta sederhana antara Cinta dan Rangga. Yang membedakan adalah *gimmicks* dua insan yang berpisah selama ratusan purnama. Pada film pertama, Rangga berjanji akan kembali pada satu purnama yang dia tuliskan pada buku puisi yang diberikan pada Cinta. Dalam *trailer*-nya tidak banyak bocoran cerita yang diberikan oleh sang sutradara maupun penulis. Adegan Cinta hanya tergambar oleh sebuah percakapan dengan Rangga. "Rangga, apa yang kamu lakukan pada saya itu. JAHAT!"

Selama 14 tahun tidak bertemu, hanya kata itu yang dilontarkan Cinta pada Rangga. Meski berat, Cinta tidak tahu harus bagaimana. Sahabat Cinta selalu memberikan motivasi dan pundaknya untuk bersandar kala luka dan perasaan itu harus hadir kembali. Rahasia cinta memang tidak pernah ada yang tahu. Selain drama percintaan, adegan tidak terduga dari perjalanan persalinan Milly juga diceritakan dalam kisah cinta yang dibumbui humor ini. Bahkan sang penulis Mira Lesmana, merasa bingung mau dibuat apa cerita ini. "Banyak masukan, dan versi yang berbeda dari mini drama, sinetron AADC. Tapi kisah AADC 2 ini sama sekali bebas dari kisah-kisah terdahulu," katanya.

Lantas, mampukah Cinta dan Rangga kembali menjalin cinta seperti dahulu atau Cinta tetap memilih tunangannya? Saksikan jawabannya pada 28 April 2016.

## SURAT CINTA UNTUK KARTINI

**SUTRADARA** Azhar Kinoi Lubis

**PENULIS NASKAH** Vera Varidia

**PEMAIN** Chicco Jerikho, Rania Putri, Ayu Dyah Pasha, Maya Putri, Ence Bagus, Keke Harun, Ahmad Rosadi, Melayu Nichole

**RILIS** 21 April 2016

Film Surat Cinta untuk Kartini yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan penulis naskah Vera Varidia ini menceritakan sekelumit kisah perjalanan hidup Kartini yang dimunculkan secara audio visual. Diceritakan melalui sosok fiktif seorang tukang pos bernama Sarwadi (Chicco Jerikho) yang merupakan perwakilan mata masyarakat Indonesia memandang dan mengagumi Raden Ajeng Kartini.

Sarwadi jatuh hati pada sosok Kartini (Rania Putri). Kartini adalah perempuan yang cantik dan sangat peduli dengan rakyat kecil. Namun Sarwadi bingung. Setiap orang yang ia temui mengatakan, Kartini adalah sosok yang aneh karena ingin mendobrak tradisi patriarki. Bahkan, sahabat Sarwadi sendiri, Mujur, mengatakan, Kartini adalah sosok yang aneh, melenceng dari adat istiadat Jawa, dan bermimpi terlalu tinggi memajukan perempuan agar menjadi pandai dengan bersekolah.

Kebingungan Sarwadi sirna saat tahu Kartini ingin mendirikan sekolah bagi kaum pribumi. Sarwadi bangga bisa mencintai Kartini yang pantang menyerah. Kartini bahkan mengajak anaknya, Ningrum, untuk belajar di sekolah miliknya. Kecintaan Sarwadi semakin bertambah dengan Kartini yang begitu dikaguminya. Meski Sarwadi merasa dirinya hanya seorang tukang pos sementara Kartini adalah anak priyai yang sangat disegani, dirinya tetap mencintai Kartini dan pantang menyerah mengejar cintanya melalui surat-surat yang dia tulis.

Namun sayang, hati Sarwadi mulai hancur saat mengetahui Kartini dilamar oleh seorang Bupati Rembang yang telah beristri tiga. Kartini dijodohkan oleh orang yang sama sekali tidak dia cintai.

Kegigihan Sarwadi tak pernah padam, ia terus mengejar cintanya meski tahu dirinya tidak sepadan dengan Kartini. Dalam film ini, penonton akan banyak mendapatkan pelajaran bagaimana cinta itu harus dikejar dan diperjuangkan sampai



kapun pun, meski badai menghadang sekalipun. Perjuangan perempuan hebat seperti Kartini, juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia untuk berdiri kokoh mewujudkan cita-cita meski dianggap 'aneh'.

Dua kisah Kartini dan Sarwadi, diakui menjadi tantangan baru oleh Chicco Jerikho dalam film 'Surat Cinta untuk Kartini' ini. Kesulitan pun kerap dialami aktor peraih Piala Citra ini. Dia juga mengatakan "Kebetulan Rania cantik jadi saya tidak susah-susah amat, buat kagum sama dia," ujar Chicco.

Bagaimana perjuangan Sarwadi mendapatkan cinta Kartini? Dan bagaimana dengan cita-cita Kartini memajukan perempuan Indonesia? Temukan jawabannya pada film Surat Cinta untuk Kartini yang tayang di bioskop Indonesia pada 21 April 2016. (IFR)

# IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN, DASAR REVOLUSI MENTAL



**M. Sofyan**  
Bekerja  
di BPP Kemendagri

**D**i tengah hingar bingar politik, sosial budaya dan pemikiran serba pragmatis saat ini sangatlah sulit menempatkan isu kebangsaan sebagai pedoman utama dalam proses pembangunan

bangsa. Padahal masalah kebangsaan merupakan masalah inti dari permasalahan bangsa ini. Dalam risalah politik Bung Karno “Mencapai Indonesia Merdeka”, dikatakan, membangun Indonesia merdeka tidak hanya melepaskan diri dari belenggu penjajahan asing, tetapi juga lepas dari segenap sistem penindasan yang mungkin dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri setelah negara ini merdeka. Inilah konsep kemerdekaan yang diimpikan oleh Bung Karno jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sebuah konsep kemerdekaan yang meniadakan penindasan manusia atas manusia. Hal ini yang seharusnya terus diperjuangkan agar bangsa ini memiliki martabat di negeri sendiri dan memiliki wibawa di kancah dunia.

Saat ini Indonesia tengah menghadapi perubahan zaman di mana generasi bangsa dibesarkan di antara kecanggihan dunia maya dan media sosial, di mana interaksi sosial generasi bangsa didominasi oleh gawai dan tidak pernah merasakan semangat gotong royong secara fisik. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia di tengah semakin menguatnya

ego kelompok dan sektoral, sementara semangat dan pemahaman kebangsaan para generasi penerus cenderung pragmatis dan begitu cair. Permasalahan tersebut sepatutnya menjadi perhatian besar, karena jika terus dibiarkan, pelemahan kebangsaan akan terus membudaya di kalangan generasi penerus bangsa.

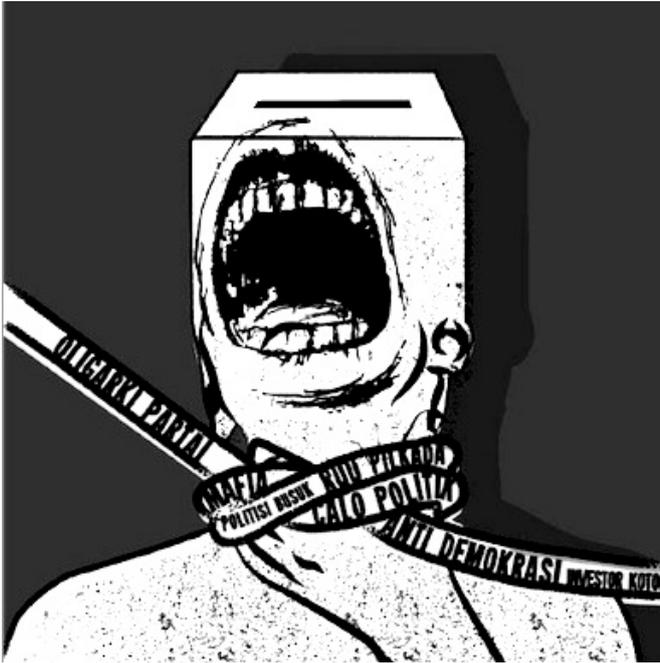
Untuk menetralsir pelemahan kebangsaan tersebut maka diperlukan semangat kebersamaan dan gotong royong yang berlandaskan cinta Tanah Air. Proses gotong royong pun hanya bisa dibangun berdasarkan proses komunikasi yang lancar dan penuh kekeluargaan. Hal inilah yang harus menjadi prioritas saat ini jika menginginkan arsitektur kebangsaan yang kuat dan kokoh.

Permasalahan bangsa tentu tidak dapat hanya dibebankan kepada institusi negara atau pemerintah semata dan penguatan kebangsaan tidak akan membawa pengaruh besar apabila tidak disertai dengan kebangkitan kesadaran politik masyarakat dan kesadaran tanggung jawab dari para elit pemimpin di berbagai tataran akan tugas dan tanggung jawabnya.

## Menanamkan pendidikan karakter

Presiden Soekarno menegaskan perlunya *nation and character building* sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Hal tersebut didasari oleh pemikiran karakter suatu bangsa yang kuat berperan besar dalam mencapai tingkat keberhasilan dan kemajuan bangsa. Bahkan seorang filsuf Yunani Aristoteles mengingatkan, sebuah masyarakat yang budayanya sudah tidak lagi memerhatikan pentingnya

Dalam rangka menumbuhkan karakter, sudah seharusnya bangsa ini sadar dan kembali meningkatkan pentingnya mengajarkan sejarah bangsa bagi para peserta didik.



pendidikan atau tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai suatu *good habits*, akan membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Martin Luther King mengatakan *Intelligence plus character, That is the goal of true education*. Kecerdasan yang berkarakter, adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya.

Dalam rangka menumbuhkan karakter, sudah seharusnya bangsa ini sadar dan kembali meningkatkan pentingnya mengajarkan sejarah bangsa bagi para peserta didik, dengan mengutip kata-kata Bung Karno "JASMERAH", jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebab, sejarah dan kebudayaan bangsa sangatlah penting. Beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea pun sangat menjunjung tinggi budaya dan sejarah bangsanya. Karena sesuatu bangsa tidak terlepas dari akar budaya bangsanya.

Lembaga pendidikan diharapkan menjadi pionir dalam membangun revolusi mental, yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan revolusi pancasila. Untuk memiliki karakter atau budi pekerti yang baik tentu melalui latihan yang serius dan terus-menerus. Meski manusia memiliki karakter bawaan, hal itu tidak berarti karakter itu tidak dapat diubah. Perubahan karakter dibaratkan sebagai suatu perjuangan yang berat, suatu latihan yang terus-menerus untuk menghidupi nilai-nilai baik.

Bangsa ini memiliki berbagai nilai-nilai luhur yang harus kembali ditumbuhkembangkan untuk menjadi karakter anak bangsa yang unggul, nilai luhur tersebut di antaranya religius, sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya adalah kejujuran, sebagai upaya menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

Tidak kalah pentingnya adalah sikap toleran, tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, kerja keras yang merupakan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, kreatif ide dan rindukan yang menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

Nilai luhur yang lain adalah mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung-jawab.

Karena itu, karakter yang baik lebih patut dipuji dibandingkan bakat yang luar biasa. Bakat adalah anugerah, sedangkan karakter yang baik tidak dianugerahkan. Karakter yang baik lahir dari latihan dan perjuangan yang keras, dan kontinyu. Mengutip perkataan Tolbert Mc Carrol, karakter adalah kualitas otot yang terbentuk melalui latihan setiap hari dan setiap jam. Otot karakter kita akan menjadi lembek apabila tidak pernah dilatih, sebaliknya akan menjadi kuat kalau sering dilatih. Ciri penting dari SDM berkualitas adalah pintar (*intelligent*), cerdas (*smart*), bijak (*wise*) dan bijaksana (*wisdom*), serta berkata dan bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain di alam semesta.

Pada dasarnya, esensi kebangsaan tidak pernah terpengaruh pada perubahan zaman maupun generasi, karena yang diperlukan adalah konsistensi pemahaman atas konsep kebangsaan yang diyakini suatu bangsa. Dari semua hal tersebut, yang terpenting adalah keteladanan yang tulus dari para elit pemimpin sebagai pembawa pesan-pesan kebangsaan dan bukan keteladanan yang bernuasa pencitraan belaka. Jika setiap anak bangsa mampu melakukan revolusi mental terhadap diri sendiri dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, maka pada saat itulah ukuran kebangsaan rakyat Indonesia bukan lagi tertuju kepada hitungan-hitungan ekonomis dan prestise semu, melainkan pada situasi dan kondisi yang saling percaya, melindungi, menjaga, dan saling percaya.



**Hari Prasetyo  
Sutanto**  
Peneliti  
di BPP Kemendagri

# MEMPERKUAT MANFAAT KARTU IDENTITAS ANAK

**M**e l a l u i  
Permendagri  
No 2 Tahun  
2016 tentang  
Kartu Identitas  
Anak (KIA), pemerintah

akhirnya memiliki aturan baru terkait identitas untuk anak. Aturan tersebut memberlakukan KIA sebagai kartu identitas resmi untuk anak sebelum memiliki KTP elektronik (KTP-el). Lahirnya peraturan tersebut juga tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik kepada setiap warga negara yang berstatus anak.

Salah satu upaya tersebut adalah mengamankan Dinas Dukcapil untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA melalui kerjasama kemitraan bisnis dengan pihak ketiga seperti tempat bermain, rumah makan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

Permendagri tersebut juga mengatur tempat pelayanan pengurusan KIA yang bisa dilakukan di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak, dan tempat layanan lainnya. Pemerintah memberlakukan blangko yang sama untuk KIA di seluruh wilayah Indonesia dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan yaitu material, fisik, teknologi printing, bentuk, dan komposisinya.

KIA juga memuat informasi tambahan nomor KK (kartu keluarga) dan nomor akta kelahiran, nama kepala keluarga, tempat penerbitan dan tandatangan kepala dinas selain informasi yang termuat dalam KTP-el dewasa.

Dalam Permendagri diatur, KIA dibagi menjadi dua jenis, yaitu KIA untuk anak berusia di bawah lima tahun dan KIA untuk anak usia 5 s.d 17 tahun. KIA ini bisa didapatkan bersamaan dengan pengurusan akta kelahiran, sedangkan bagi anak yang sudah memiliki akta kelahiran pengajuannya harus memenuhi persyaratan KTP-el orang tua beserta KK.

Kendati begitu, hadirnya program KIA ditanggapi pesimis oleh sebagian masyarakat, mengingat berbagai program kependudukan sebelumnya masih banyak yang mengecewakan masyarakat, seperti KTP-el dan akta kelahiran. Sejak diberlakukan pada 2011, KTP-el masih menyisakan permasalahan di antaranya terbatasnya alat perekaman dan blangko KTP-el, belum semua masyarakat terekam dan menerima KTP-el, hingga masih ditemukannya NIK ganda penyebab

kisruh kualitas Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) di beberapa daerah.

Demikian juga dengan masih banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab, seperti keterjangkauan terhadap pelayanan, rendahnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, dan kultur yang menganggap akta kelahiran belum penting untuk dimiliki.

## Praktik di negara lain

Senyatanya, KIA yang digagas pemerintah juga berlaku di negara-negara maju. Akan tetapi, di sana KIA hanyalah sebagai manfaat tambahan untuk anak. Selain untuk mendapatkan perlindungan, KIA juga dimanfaatkan untuk mendaftar ke tempat penitipan anak, taman kanak-kanak, sekolah, akses ke perpustakaan, dan transportasi bus sekolah. Kalau kita tengok, Amerika Serikat, Kanada, Hongkong dan lainnya, misalnya, KIA lebih bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada anak daripada keuntungan lainnya.

KIA berfungsi untuk melindungi anak apabila terjadi hal-hal yang membahayakan atau bersifat *urgent*, misalnya, apabila anak mengalami peristiwa penculikan atau anak memiliki penyakit/alergi yang bila tidak ditangani cepat akan membahayakan jiwa. Contoh lain, pada saat terjadi penculikan, orangtua atau keluarga akan dengan mudah memberikan informasi valid ke pihak berwajib atau bertanya sembari menunjukkan kartu kepada orang yang dimintai keterangan selama mencari. KIA juga untuk menjaga anak dari penyakit yang diderita, tempat penitipan anak, pengasuh, dan keluarga terdekat.

Pihak yang diberikan otoritas sementara menjaga anak juga dapat memanfaatkan informasi pada kartu ini. KIA pun dapat dipegang oleh beberapa pihak, seperti orang tua, pengasuh, keluarga terdekat, tempat penitipan anak, dan taman kanak-kanak, serta sekolah untuk perlindungan si anak. Informasi yang jelas dalam kartu ini juga akan bermanfaat saat dibutuhkan, misalnya foto yang *update*, sidik jari, ciri fisik yang identik (misalnya bekas luka atau tanda lahir), jenis alergi, nomor telepon darurat orang tua, pihak asuransi atau rumah sakit yang menangani si anak.

Pertanyaannya, apakah dengan berlakunya Permendagri No 2 Tahun 2016, akan serta-merta memberikan manfaat kepada anak di Indonesia? Tulisan ini tidak berpretensi memastikan bahwa KIA yang berlaku di negara maju itu juga akan sama dengan

---

KIA versi Kementerian Dalam Negeri. Ada banyak hal yang mesti dilakukan sebagai prasyarat KIA akan sukses diimplementasikan.

Setidaknya, pemerintah harus meminimalisasi beberapa permasalahan yang masih ada saat ini. Sinergitas dan komitmen pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program KIA tidak membawa masalah baru. Pemerintah perlu belajar dari kendala yang sudah terjadi pada program-program sebelumnya, agar cakupan KIA mencapai target yang diinginkan.

### Perlu diminimalisasi

Beberapa hal yang perlu diminimalisasi tersebut di antaranya dalam hal pendataan warga yang berstatus anak, misalnya, meski dalam pelayanan pengurusan nantinya akan dilakukan dengan jemput bola, perlu ada kemudahan dalam proses pengurusan, karena meskipun akan diurus oleh orang dewasa, banyak dari orangtua yang akan membawa anaknya untuk dilakukan perekaman. Pemerintah perlu memikirkan agar 'konsumen kecil' penerima KIA mendapatkan fasilitas penunjang yang nyaman dalam proses pengurusannya.

Selanjutnya perlu menghilangkan persyaratan 'ekstra' di tingkat pemerintah daerah yang cenderung mempersyaratkan surat pengantar dari RT hingga ke kecamatan, penyediaan beberapa loket pelayanan yang terpisah dari pengajuan dokumen kependudukan lainnya, hingga menyediakan ruang tunggu yang ramah terhadap anak. Dalam pengurusan kesediaan blanko yang terencana sesuai kebutuhan daerah, kecukupan alat cetak dan perekaman, jadwal dan lokasi pelayanan, dukungan ICT yang memadai, serta kecukupan dan kemampuan tenaga SDM di tingkat Dinas Dukcapil.

Dalam meningkatkan cakupan KIA, pemerintah tidak harus melulu berfokus pada cakupan pendataan dan pelayanan publik yang dicapai, tetapi juga perlu memerhatikan kemanfaatan dari KIA sendiri. Permendagri No 2 Tahun 2016 yang mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan perjanjian kemitraan bisnis dengan pihak ketiga di bidang taman bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku dan usaha ekonomi lainnya agar KIA memiliki nilai manfaat perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat agar manfaat dari KIA tidak dipahami terbatas dan hanya sekadar mendapatkan potongan membeli buku, diskon tiket rekreasi, atau potongan makan.

Selain menyasar cakupan pendataan dan menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerintah sebaiknya juga berfokus untuk meningkatkan kemanfaatan dari kepemilikan KIA ini agar masyarakat merasakan keuntungan dari program tersebut. Seperti contoh manfaat cepat yang dirasakan masyarakat adalah kemudahan saat *traveling* membawa anak. Orang tua

tidak perlu lagi harus menunjukkan akta kelahiran anak untuk berjaga-jaga seandainya perusahaan penyedia jasa transportasi menanyakan akta kelahiran atau dokumen yang memperkuat.

### Memperkuat manfaat

Di sisi lain, saat anak mengalami peristiwa penculikan atau hilang dari jangkauan orang tua, KIA dimanfaatkan untuk melapor ke pihak berwajib atau meminta informasi ke orang yang dimintai keterangan. Manfaat lain adalah saat mendaftarkan ke fasilitas taman bermain atau sekolah, rumah sakit, dan ke fasilitas lain yang dimanfaatkan anak setelah ada kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta penyedia layanan anak.

Demi memperkuat manfaat KIA pemerintah juga perlu memerhatikan elemen data yang saat ini tidak jauh berbeda dengan KTP-el. Adanya tambahan informasi nomor KK dan akta kelahiran, nama kepala keluarga, tempat penerbitan, dan tandatangan kepala dinas dinilai tidak cukup kuat dan kurang memiliki manfaat perlindungan anak. Mengingat KIA harus memiliki manfaat lebih luas yang tidak hanya sebagai identitas anak, tetapi juga memuat informasi penting saat anak berada dalam bahaya atau hilang dari orangtuanya.

Maka perlu penambahan beberapa informasi seperti ciri fisik spesial anak (misalkan luka atau tanda lahir), jenis alergi/penyakit penting yang diderita, termasuk nomor kontak 24 jam orang tua, nomor asuransi kesehatan atau BPJS atau kontak rumah sakit yang menangani apabila anak dalam keadaan genting.

Selanjutnya KIA sebaiknya juga memiliki desain bernuansa anak yang tidak terlalu formal, sehingga anak sebagai pemilik kartu akan cenderung merawat kartu 'sakti' yang dimilikinya. Desain kartu dinilai terlalu mirip dengan KTP-el yang dimiliki orang dewasa. Meskipun sama-sama menyandang kartu identitas, namun selayaknya KIA memiliki desain yang ramah untuk anak dan memuat informasi yang efektif. Misalnya, desain yang memuat gambar foto terbaru anak yang cukup jelas bila dilihat, tulisan yang lebih besar pada informasi vital seperti nomor telepon darurat, alergi yang diidap anak, dan ciri fisik yang identik.

Dengan belajar dari pengalaman dan mau melihat praktik KIA di negara maju, pemerintah sebenarnya dapat membuat keberhasilan dari program KIA dengan melihat manfaat sebenarnya dari kehadiran KIA. Manfaat KIA yang dirasakan di luar negeri harus dapat dirasakan juga di Indonesia, sehingga akan berimplikasi pada cakupan kepemilikan KIA sesuai harapan pemerintah.

## MENDAGRI TOLAK SYARAT CALON INDEPENDEN DIPERBERAT



**JAKARTA** - Kepada Media Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, hak calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen tidak boleh dibatasi. Pasalnya, itu merupakan hak politik warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pernyataan tersebut disampaikan terkait munculnya usulan Komisi II DPR untuk menaikkan syarat dukungan bagi calon perseorangan pada revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Tjahjo menambahkan keringanan syarat calon independen sebelumnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan syarat persentase 6,5 hingga 10 persen dukungan bagi calon perseorangan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Aturan tersebut juga telah tertuang dalam draf revisi yang disusun pemerintah dalam Pasal 41 Ayat 1 dan 2.

Selain itu, draf revisi juga menetapkan perbedaan rasio di setiap daerah. Untuk provinsi dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 12 juta harus didukung minimal 6,5 persen dan maksimal 50 persen kabupaten dan kota. Sedangkan untuk daerah dengan jumlah DPT sampai 2 juta penduduk harus didukung paling sedikit 10 persen.

Kepada Tempo, Mendagri menjamin syarat dukungan untuk calon perseorangan atau independen tidak akan berubah dalam revisi UU Pilkada.

"Tidak ada masalah, walaupun jumlah calon independen sedikit, tapi jangan diukur sedikitnya. Yang penting kesempatan diberikan," ujar Tjahjo

Terkait hal itu, presiden Jokowi pun angkat bicara. Saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri, Jokowi meminta agar rumusan pasal-pasal dalam revisi UU Pilkada tidak multi tafsir, perbaikan juga diharapkan tidak tambal sulam. Selain itu, perbaikan dari segi regulasi dan implementasi di lapangan pun harus dapat mengantisipasi kecurangan yang terjadi pada Pilkada serentak tahun lalu.

"Saya ingin pelaksanaan Pilkada mendatang lebih lancar, aman, dan disertai perbaikan," kata Jokowi. **(MSR)**

## PILKADA DKI JAKARTA LAYAK GUNAKAN e-VOTING



**JAKARTA** - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan pemungutan suara pemilu secara elektronik (*e-voting*) dapat meminimalkan manipulasi data atau kecurangan dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan *e-voting* sudah selayaknya di gunakan pada Pilkada

DKI 2017. Pemilu harus berubah sesuai standar tahapan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan dan akuntabel. Teknisnya, setiap pemilih yang menggunakan *e-voting* nantinya akan mengeluarkan struk sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Struk tersebut bisa dijadikan bukti hukum. Struk juga memiliki data optik yang bisa dibaca mesin (*barcode*) khusus dan bisa dibuktikan di pengadilan serta tidak bisa di cetak sendiri," kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru.

Andrari menambahkan, perangkat *e-voting* tersebut telah

dipersiapkan jauh-jauh hari termasuk dalam hal pengujian dan audit di lapangan sehingga bisa dibuktikan secara hukum. Selain itu, *e-voting* sendiri telah dibuktikan dalam pemilihan kepala desa di beberapa wilayah di Indonesia.

"Penggunaan *e-voting* juga sangat memudahkan dan tidak akan menelan banyak biaya, *e-voting* pun tahan terhadap serangan peretas (*hacker*) dan tidak memerlukan tenaga listrik (PLN). Penayangan hasil pemilu juga bisa dilihat secepat mungkin dan berjenjang, seperti jumlah suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap desa, kecamatan, provinsi bahkan pusat," ujar Andrari.

Selain itu, menurut Andrari saat ini BPPT telah menyediakan beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, selain *e-voting* BPPT juga tengah menyediakan penghitungan suara melalui perangkat elektronik (*e-counting*) dan rekapitulasi berbasis elektronik (*e-rekapitulasi*). Penggunaan teknologi tersebut diharapkan bisa memperbaiki permasalahan pilkada serentak yang sering terjadi berulang kali.

"Kalau pilkada menggunakan undangan, biasanya sering disalahgunakan, undangan bisa saja dijual oleh panitia, atau mungkin disalahgunakan oleh pemilik dengan diberikan kepada orang lain. Hal tersebut karena di TPS biasanya tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu," kata Andrari. **(MSR)**

# Di Hening Subuh

Oleh: Kurnia Indasah

**S**akit itu selalu datang menyergap setiap senja dan subuh.

Seusai maghrib sakit itu muncul dari balik sajadah, menghantamku yang baru saja bangkit dari sujud. Dia mengobrak-abrik, mengacak-acak, dan mengurasku sampai hampir tanpa sisa. Sakit itu bukannya mereda dengan kubacakan kitab suci. Dia justru mengamuk, menggedor-gedor urat syaraf, memaksaku tersungkur, tersujud kembali hingga adzan isya'.

Menjelang subuh sakit itu mengintip dari balik embun, lalu begitu saja masuk ke dalam raga, hingga menembus sampai ke tulang. Nyeri kurasa mencekik ulu hati, memaksaku mengeluarkan butiran panas dari mata. Satu tetes, dua tetes, tidak cukup. Sakit itu terus mencucuk matakku, menumpahkan semua airnya sampai badanku menggigil. Pagi terasa membekukan seluruh persendianku.

Aku masih ingat segalanya tentangmu. Semuanya. Rambutmu yang mengombak, matamu yang besar, tahi lalatmu yang berbarisan, dan tubuhmu yang tidak sampai 150 senti. Aku ingat semuanya. Juga, suaramu yang ringan seperti kapas, parfum melati yang biasa kau pakai, dan warna jilbab kesukaanmu. Aku hapal semuanya.

Aku dan kau punya hubungan yang unik. Kita adalah sahabat, bukan pasangan. Tapi yang pasti, aku mencintaimu. Dan aku tahu kau juga suka padaku. Tapi kita tak pernah menjalin asmara. Cinta hanya akan membuat sakit, entah pada salah satu atau kedua pihak. Sebuah prinsip yang akan kubantah mati-matian di kemudian hari.

Kita terbiasa bertukar kabar lewat lagu yang kita pesan lewat radio. Jika kau mengirim lagu *Matahariku* milik Agnes Monica, itu berarti kau sedang sedih. Aku akan langsung menelponmu untuk menanyakan apa kau baik-baik saja. Jika lagu yang kau pesan *Dua Cincin*, tandanya kau sedang cemburu. Lalu aku akan mengirim sms, mengatakan semuanya baik-baik saja. Dan kalau kebetulan kau request *Bongkar* dari Iwan Fals, kuartikan kau pamitan untuk demonstrasi.

Sakit ini kembali menghajarku, menjerat pembuluh-pembuluh darah dan meremas selaput otak, setiap senja dan subuh.

Kita adalah pecinta Indonesia, tulen, dan kita pun menjadi penikmat musik Korea. Kau selalu berkata, "apa salahnya menyukai musik orang, selama kita tidak membenci budaya sendiri?". Dan selalu kutambahi, "orang-orang itu boleh suka pada Justin Bieber, Rihanna, One Direction, Usher, tidak ada yang memprotes... mengapa kita tidak boleh suka Korea?"

Kau adalah Cassie<sup>1</sup> dan aku sendiri ELF<sup>2</sup>.

Aku sering mengirimimu lagu-lagu romantis seperti *What is Love*-nya EXO-K, *Tonight*-nya TVXQ, dan *It Has To Be You*-nya Yesung. Tapi, lagu yang paling kita sukai adalah *I Will Give You My Life* milik 2PM. Semacam ada kesesuaian yang aneh antara kau dan aku dengan lagu itu.

Malam-malam saat kebetulan kita tidak keluar, selalu aku kirimkan lagu itu. Liriknya seperti sebuah janji untuk sehidup semati, tapi tidak dengan kata-kata jengeng. Semacam ada kepasrahan untuk berkorban demi orang yang kita sayangi. *Naega neoreul saranghagiye, nae moksumkkaji geonda. In order to love you, I'm risking my life.* Untuk mencintaimu, aku mempertaruhkan hidupku.

Suatu hari, setahun yang lalu, dengan penuh kemantapan, aku bersiap memesan lagu Super Junior *Marry U* untukmu, berharap kau akan membalasku dengan *My Only One*. Tapi hari itu kau mendahului mengirim lagu T-Max berjudul *Fight The Bad Feeling*. Aku merasa seperti ada yang salah dengan kita. Dan ternyata, itu adalah lagu terakhirmu.

Sakit ini menusukku dari depan dan belakang, seperti merogoh ke dalam jantung, selalu setiap senja dan subuh.

Kau mati tertabrak kereta di depan matakku. Setahun yang lalu. Waktu itu hari beranjak pagi, puluhan kelelawar telah berkemas untuk pulang. Kau lebih dari sekedar mati. Kau hancur berserakan.

"Kau sudah dewasa, carilah hidup sendiri dan tak usah kembali," ucap bapakku hari itu. "Di rumah ini tidak boleh ada pemerkosa!"

Sakit yang menderaku ini bukan hanya karena aku kehilanganmu. Keluargamu membenciku, menorehkan segaris luka. Keluargaku membenciku, menyayatkan luka yang lebih dalam. Fitnah yang tak mampu kubantah itu, kutelan saja bulat-bulat, meletus di uluhati dan meninggalkan luka yang lain. Dan, cinta yang tak sempat terucap, seperti menggarami semua luka yang sudah panjang.

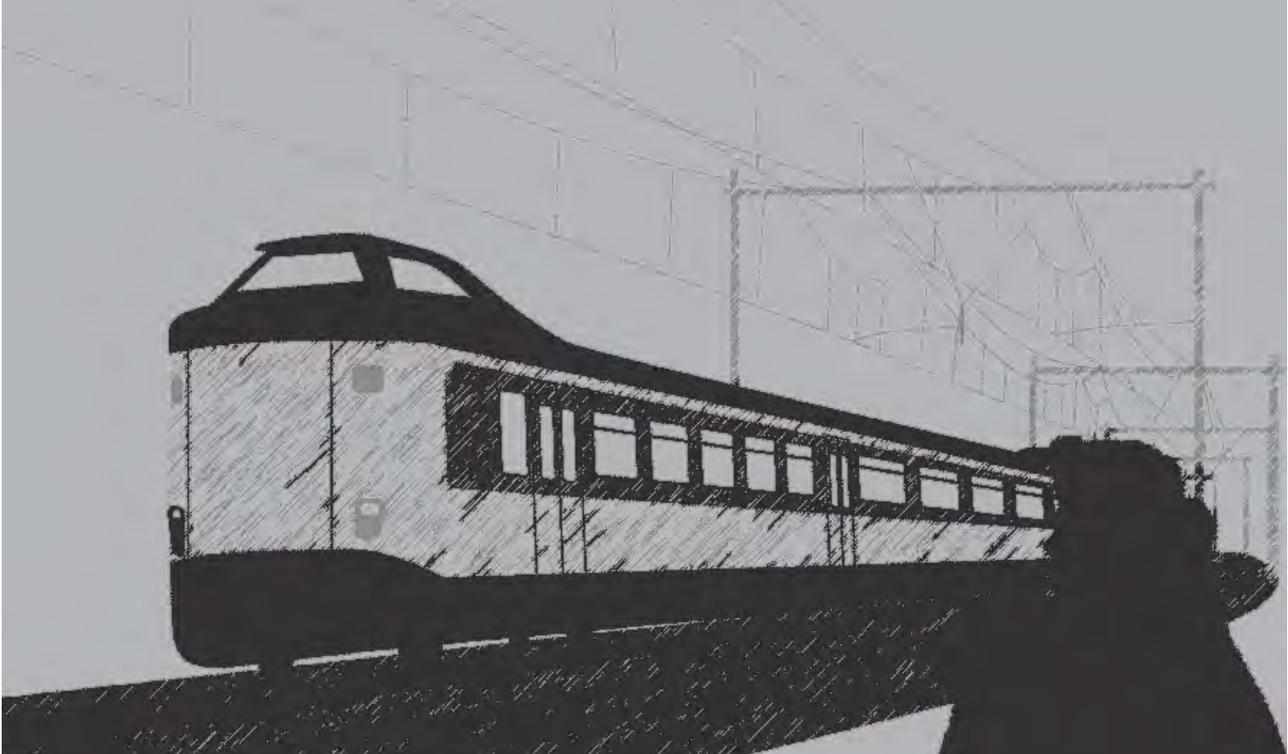
"Setelah membunuh anakku, kau datang untuk minta maaf?" bentak ayahmu dengan wajah merah kehitaman. "Beruntung kau, aku tidak mengirimmu ke penjara."

"Saya hanya ingin tahu dimana Syarifah dimakamkan."

"Untuk apa? Untuk kau injak-injak pusaranya?" suara ayahmu seperti petir yang meranggaskan kuncup-kuncup terakhir di hatiku. "Pergi dari sini, seumur hidup aku tak sudi melihatmu

1 Cassiopeia, nama fans TVXQ/DBSK.

2 EverLasting Friend, nama fans Super Junior.



menjinjak rumahku.”

Sakit yang tak mempan diagnosa dokter ini kurasakan sejak setahun yang lalu. Aku tak bisa pulang, aku tak tahu dimana kuburanmu. Namaku yang sudah terbenam lumpur tidak mungkin kubersihkan lagi. Semua yang serba gelap, pekat, sesak dan mencekik ini, hanya disebabkan satu hal. Ketololan.

Malam itu, satu tahun yang lalu. Aku mengajakmu ke sebuah pantai yang sepi di pinggir kota kecil kita. Senja yang terlalu indah untuk kita lewatkan. Aku menanyakan mengapa kau mengirim lagu *Fight The Bad Feeling* untukku. Kau menjawab bahwa saat itu perasaanmu sangat tidak enak, yang membuat tidurmu kurang nyenyak malam sebelumnya. Karena aku tahu kau bukan ahli firasat, aku tak berkata apa-apa lagi.

Aku mengantarmu pulang jam sembilan. Lalu sesuatu yang buruk terjadi. Kita dicegat oleh segerombolan anak muda mabuk. Mereka merampas semua yang ada pada kita, motorku, dompet, handphone, bahkan kehormatanmu nyaris mereka ambil. Aku melawan, belasan tinju menghujani wajah dan perutku. Saat beberapa detik kesempatan tiba, kuseret kau melarikan diri. Aku lari, kau lari. Aku sembunyi, kau sembunyi. Di tengah jalan aku kehilangan jejakmu.

Aku mencari-carimu sepanjang malam, sambil terus berlari. Hampir subuh kutemukan kau di belakang pasar, meringkuk di parit kering, menangis. Kau yang terlalu ketakutan, mengira aku salah satu pemuda mabuk yang mengejarmu. Kau berlari lagi, sambil berteriak “pemerkosanya... pemerkosanya...” di sepanjang jalan. Aku mengejar di belakangmu, berusaha menangkap dan menenangkanmu.

Kau terus berlari, mencoba melintasi dua jajaran rel kereta. Padahal saat itu portal sedang diturunkan. Aku ragu-ragu, terlambat menyadari kemungkinan terburuk yang sedang mengintai di ujung sana. Benar saja. Tak sampai tiga detik tubuhmu terpental, lumat oleh dorongan berton-ton besi yang melaju seperti angin. Potongan tubuhmu berhamburan di subuh yang hening itu. Aku menjerit sekuat kerongkongan. Orang yang kucintai, mati di depan mataku.

Aku dibawa ke kantor polisi. Aku dituduh sebagai lelaki yang akan memperkosa seorang gadis hingga menyebabkan

kematiannya. Bapakku dipanggil, ayahmu dipanggil. Polisi melepaskan aku lagi karena bukti tak mencukupi. Tapi tidak demikian halnya dengan bapak dan ayahmu. Aku diusir dari rumah, dan ayahmu merahasiakan pusaramu dariku. Sore harinya, koran-koran lokal memuat namaku.

Senja yang indah dan subuh yang hening, seperti telah berkonspirasi menghianatiku.

Aku tak tahan lagi dengan semua rasa sakit ini. Sakit ini seperti mengoyak-oyakku ketika senja, menyatukan lagi tubuhku ketika malam, mencabik-cabik lagi saat subuh datang, begitu seterusnya. Malam ini, kuputuskan akan mengakhiri semua penderitaan tak berujung ini. Subuh besok, aku akan sudahi sakit ini, dan mengucapkan selamat tinggal pada semua luka.

\*\*\*\*\*

Esoknya, pagi-pagi benar aku keluar rumah. Headset di telinga memainkan 2PM *I Will Give You My Life*, lagu yang pernah menjadi semacam candu bagi kita.

Di jalan besar, portal perlahan-lahan diturunkan. Manis seperti rencanaku. Aku terus melangkah dengan mantap. Di belakang portal, orang-orang ramai berteriak. Seorang petugas bertopi merah meniup peluit dengan kesetanan. Aku tak peduli. Aku tetap berdiri, menikmati subuh yang hening ini.

Sedetik kemudian, seekor ular besi raksasa mendaratiku dari kiri, mencaplok tubuhku. Aku terpental. Sempat kudengar orang-orang menjerit dari belakang portal.

Sakit itu masih terasa, tapi ini mungkin yang terakhir.

Aku masih mendengar seseorang menyanyikan lagu itu, samar-samar.

*Naega neoreul saranghagiye, nae moksumkkaji geonda. In order to love you, I'm risking my life.* Untuk mencintaimu, aku mempertaruhkan hidupku.

Yogyakarta, 5 April 2016



## AWAS JANGAN SALAH KONSUMSI OBAT DBD!

**D**BD atau Demam Berdarah Dengue memang tidak ada habisnya jika dibicarakan. Si makhluk kecil bernama Nyamuk *Aedes Aegypti* ini memang jago sekali membuat siapapun cemas akan kesehatannya, terutama kesehatan si kecil. Data dari Kementerian Kesehatan pun mencatat, pada Februari 2015 sudah ada 126 ribu kasus DBD dengan total kematian 1.200 orang, dan yang paling banyak terjangkit adalah anak-anak. Angka ini tentu menjadi kewaspadaan bagi orang tua untuk melawan DBD.

### DBD dalam angka

Ketua Umum IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Prof. DR. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K) mengatakan, DBD merupakan ancaman kesehatan besar yang pertumbuhannya cepat di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan yang lebih gawat lagi sebagian besar masyarakat dan orangtua tidak mengetahui gejala/tanda dan cara penanganan awal yang tepat, sehingga berdampak pada tingginya mortalitas/kematian, khususnya pada anak. "Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 600 juta merupakan daerah endemik DBD, dan Indonesia termasuk kategori A (endemik tinggi), yang menjadi alasan utama rawat inap dan salah satu penyebab utama kematian pada anak," imbuhnya.

Pada 2014, misalnya, terdapat 71.668 kasus DBD dengan 641 kasus kematian. Data tersebut tersebar pada 8 provinsi yang *insiden rate*-nya berada di atas target pemerintah yakni 51 kasus/100.000 penduduk. Delapan provinsi itu meliputi Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. "Nyamuk ini menggigit siapa saja, mereka tidak kenal masyarakat urban atau pedalaman, semua berpotensi tergigit," katanya.

### Pengertian masyarakat masih rendah

Dalam acara peluncuran gerakan "Bersama Melawan Demam Berdarah" yang diadakan oleh IDAI dan GSK Consumer

Healthcare Indonesia memaparkan, 97 persen dari 1.000 orang responden berusia 15-64 tahun yang tersebar di beberapa kota Indonesia hanya bisa menyebutkan tiga gejala dari demam berdarah yang umumnya menjawab panas dan ruam. Selain itu, sebanyak 65 persen responden tidak mengetahui obat apa yang patut dikonsumsi saat terkena demam berdarah, dikarenakan ada beberapa obat yang berpotensi meningkatkan resiko gangguan lambung dan pendarahan bagi anak yang terkena DBD.

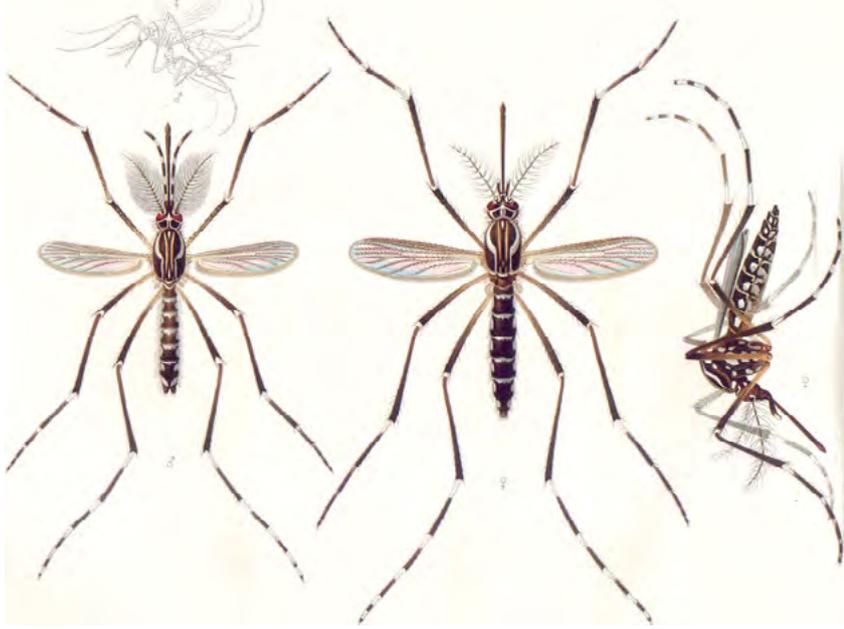
Fakta yang gawat lagi, 38 persen pasien dengan demam yang berusia 0-12 tahun mengonsumsi obat AINS ketika mengidap demam. Padahal AINS (Anti Inflamasi Non Steroid) merupakan obat *analgesic* yang mengurangi rasa sakit, peradangan seperti ibuprofen dan naproxen yang berpengaruh pada lambung.

"Hanya 10 persen orang Indonesia yang mengetahui obat-obatan AINS harus dihindari," jelasnya.

### Saat DBD, hindari obat ini!

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan mengatakan, parasetamol adalah satu-satunya obat yang disarankan untuk mengobati demam yang terkait dengan DBD. Prof. DR. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K) mengatakan obat yang harus dihindari adalah ibuprofen, asetosal, dan asam mefenamat. "Ketiga jenis obat tersebut akan merangsang asam lambung meninggi, sehingga sangat tidak cocok untuk penderita *maag*," imbuhnya.

Selain itu, beberapa jenis obat seperti *steroid*, atau yang biasa dikenal sebagai obat dewa karena dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit ringan seperti pegal-pegal, nyeri, asma, gatal-gatal justru jika dikonsumsi saat DBD akan menyebabkan penurunan sel darah putih atau leukosit. Padahal, jika terjadi DBD, bukan hanya trombosit saja yang harus diperhatikan, tetapi penderita juga harus memerhatikan leukosit dan hematokrit (kekentalan darah).



"Kalau seorang penderita DBD mengonsumsi steroid, maka leukositnya akan berkurang. Sementara saat DBD, leukosit dibutuhkan untuk memakan virus dan menjaga daya tahan tubuh," imbuhnya.

Bagaimana dengan antibiotik? *Nah*, tahukah Anda, menurut dr. Sri, antibiotik sebenarnya berlatar belakang untuk menangkal bakteri/anti bakteri. Sementara DBD disebabkan oleh virus yang dibawa melalui nyamuk *Aedes Aegypti*. "Jadi menurut saya tidak tepat penanganannya, obatnya harus tepat untuk virus bukan untuk bakteri. Kalaupun DBD disertai dengan penyakit yang disebabkan bakteri, seperti tifus, misalnya, itu harus dilihat dulu kadar imun pasien dan penyakitnya. Tapi itu sebenarnya sangat jarang sekali DBD disertai dengan bakteri," ujarnya.

Bagaimana jika seseorang sedang mengonsumsi obat-obatan tersebut lantas terserang DBD?

"Sebaiknya pasien tersebut segera mengonsultasikan kepada dokter, bagaimana sebaiknya memulihkan DBD tanpa efek samping dari obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi," jelasnya.

### Obat alami, amankah?

Terkait obat-obatan alami seperti angkak, jambu biji, dan hati kerbau yang konon bisa dengan cepat menaikkan jumlah trombosit pada penderita DBD. Ternyata menurut guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu, hal tersebut belum ada hasil penelitian yang mengatakan secara pasti. "Segala sesuatunya itu harus ada penelitian atau uji klinis yang tepat dan akurat, sejauh ini sumber alami tersebut hanya dipercaya untuk menambah vitamin atau kekebalan tubuh pasien," jelasnya.

Sebenarnya, buah-buahan atau makanan bergizi lainnya sama saja, semuanya baik dikonsumsi untuk penderita DBD, karena yang mereka butuhkan sebenarnya hanya cukup mengonsumsi cairan, dan makanan bergizi. "Jambu biji, mungkin dikonsumsi karena dipercaya mengandung vitamin C paling tinggi di antara buah yang lain. Vitamin C bagus untuk membantu memulihkan kondisi tubuh yang sedang sakit," paparnya.

Bagaimana dengan angkak? Dr. Sri dengan tegas mengatakan

angkak bukanlah obat melainkan jamu atau obat tradisional. "Saya tidak tahu pasti, bagaimana proses pembuatannya, obat alami boleh saja diberikan asal pasien doyan silakan saja," jelasnya.

Apapun jenis obat alaminya, Sri menyarankan sebaiknya pilih yang manis karena dapat memberi tenaga ekstra untuk pasien. "Seperti larutan elektrolit yang banyak mengandung natrium dan gula, itu sangat bagus sekali untuk pasien DBD," imbuhnya.

### Fakta menarik *Aedes Aegypti*

Tahukah Anda, ternyata jenis nyamuk yang menggigit manusia dan membawa virus *dengue* melalui air liurnya adalah jenis *aedes aegypti* betina. Nyamuk betina dewasa membutuhkan energi untuk bertelur sehingga mereka akan mengisap darah manusia berkali-kali hingga kenyang dan telur matang. Setiap satu nyamuk *aedes aegypti* betina, menghasilkan ribuan telur yang disimpan di dalam genangan air dan dinding tempat penampungan air. "Telur tersebut bisa bertahan 3-6 bulan menempel pada dinding bak mandi, siklus ini terjadi seminggu sekali. Untuk itu, sebaiknya para Ibu rutin menguras bak mandi paling tidak seminggu sekali dengan cara menggosok sampai bersih setiap sudut dinding tempat penampungan air," jelasnya.

Setelah telur itu menetas, maka akan ada ribuan calon nyamuk yang siap menggigit kita semua. *Nah*, berikut ini sifat nyamuk *aedes aegypti* betina yang harus Anda ketahui:

- Bersifat *antropophilic* (senang pada bau manusia), karena senang dengan bau manusia tersebut, biasanya mereka bersarang di balik gantungan baju yang sudah dipakai dan menimbulkan bau keringat. Sebaiknya, jangan biarkan baju yang kotor menumpuk digantung belakang pintu kamar.
- Umur nyamuk betina mencapai 2-3 bulan.
- Tiap 2 hari mengisap darah manusia untuk bertelur.
- Perkembangan telur menjadi nyamuk memerlukan 7-10 hari.
- Terbang pada siang dan pagi hari.
- Terbangnya tidak tinggi. Hanya lingkup RW (Rukun Warga) di satu lingkungan yang sama. *Nah*, karena terbangnya di satu lingkup yang sama, saat rumah Anda sudah dijaga betul-betul dari ancaman nyamuk *aedes aegypti*, namun belum tentu tetangga sebelah Anda juga menjaga kebersihan. Untuk itu, membersihkan lingkungan dari jentik nyamuk *aedes* ini merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya masalah personal. **(IFR)**



## NYAMAN HAMIL DI USIA 30-AN

*Hamil di usia yang cukup matang merupakan tantangan tersendiri. Peralnya, kesehatan reproduksi tak se-prima ketika usia 20-an. Kondisi fisik Bumil (Ibu Hamil) tentu akan semakin menurun. Meski demikian, kematangan psikologis dan ekonomi justru lebih siap. Ya, itulah plus-minus hamil di usia 30+. Seperti yang dialami oleh artis berdarah Batak satu ini, Melaney Ricardo. Kepada tim Media BPP, dia berbagi tip bagaimana menjalani kehamilan di usia 30+ dengan nyaman.*

### Rutin konsumsi vitamin

Ditemui di kediamannya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Mel begitu dia disapa, mengaku memang sangat berat merasakan hamil di usia 30+. Pada kehamilan anak pertama, isteri dari Tyson Lynch pelawak asal Australia itu sudah memasuki usia 31 tahun dan melahirkan buah cintanya Chloe Valentine Lynch yang kini sudah berusia empat tahun. Kini, di kehamilan keduanya Mel memasuki usia 35 tahun. "Berasa banget capeknya, apalagi aku kan pernah 'turun mesin' ya. Bener banget tuh nasihat orang tua, kalau ingin hamil sebaiknya sebelum usia 30 tahun," imbuhnya.

Meski demikian, ia mengaku memiliki 'amunisi' dalam menjalani kehamilannya. Kira-kira apa saja yah? Untuk mengatasi rasa capeknya tersebut, Mel lebih banyak beristirahat dan rutin mengonsumsi vitamin khusus ibu hamil. "Setiap hari aku wajib minum vitamin. Kalau terlewat begitu saja, badanku jadi lemas," terang BuMil yang usia kehamilannya sudah memasuki 8 bulan ini.

Mel biasanya rutin mengonsumsi kalsium. "Kata dokter kalsium sangat diperlukan oleh ibu yang sedang hamil. Apalagi calon *baby*-ku ini laki-laki. Katanya sih, anak laki-laki lebih banyak menyerap kalsium ketimbang anak perempuan," ujarnya.

### Jaga asupan makanan

Selain vitamin, Mel juga menjaga betul makanan yang ia konsumsi. Selama hamil, Mel ia lebih sering memasak sendiri dan menghindari jajan di luar. "Kalau masak sendiri kan lebih terjaga kualitasnya. Seperti minyaknya aku ganti pakai *sunflower oil*, nasi putih aku ganti nasi merah, gulanya gula jagung, roti diganti roti gandum, dan sayurannya dipilih yang organik," terangnya.

Hamil anak kedua ini, dirinya sangat menjaga ketat dan mengubah pola makannya. Mengingat kondisinya yang sudah tidak se-prima saat usia 20-an. Disinggung soal *budget* khusus untuk makanan yang lebih sehat, bagi Mel *budget* bukanlah masalah untuk menerapkan hidup sehat, tapi konsistensi dalam menjaga kesehatan, baik bagi dirinya sendiri maupun janin yang ada di dalam perut. "Lebih mahal sedikit *nggak* apa-apa, yang penting sehat," tegasnya.

Bahkan Mel mengatakan dengan tegas jika tidak ada uang untuk membeli itu semua, sebaiknya BuMil usia 30+ sepertinya lebih memilah-milih makanan bergizi ketimbang jajan di luar. "Aku suka banget sama gorengan, tapi aku lebih

percaya buat gorengan sendiri di rumah lalu dibawa ke tempat shooting," paparnya.

Rupanya memilih makanan sehat ini juga di-support betul oleh Tyson, sang suami. Justru, Tyson sangat *protect* sekali dalam pemilihan makan. "Dia kan dulunya atlet basket. Makannya sangat dijaga banget. Makan cokelat aja kalau *nggak dark cokelat* *nggak* mau, jajanan gorengan *nggak* mau. Jadi aku terpengaruh sama dia, *nggak* kenal lagi deh yang namanya tempat nongkrong atau tempat makan yang enak-enak," selorohnya

### Rutin olahraga

Selain dari dalam, Mel juga menjaga kondisi tubuh selama hamil dengan rajin berolahraga. "Sejak positif hamil aku sudah *nggak gym* lagi. Sebelum hamil aku masih *boxing, cycling*. Pas tahu hamil langsung berhenti, olahraganya diganti dengan berenang. Karena di awal kehamilan aku keluar flek, jadi aku takutnya pas *treadmill* keluar, karena pada saat awal kehamilan itu belum aman untuk olahraga berat. Jadi aku langsung berhenti, dan mulai olahraga lagi pada bulan ke-3. Aku pilih olahraga renang, yang tidak terlalu berat," jelasnya.

### Sempat trauma hamil

Baik hamil pertama maupun kedua Mel mengalami *morning sickness* (mual-muntah) parah. Bahkan ia sempat mabok berat hingga memasuki usia kehamilan 5 bulan. Bukan hal yang mudah bagi artis kelahiran 24 Februari 1981 untuk melewati fase tersebut. Berbagai cara telah ia lakukan. Mulai dari makan yang asam-asam, hingga vitamin khusus penghilang mual dari dokter khusus. "Aku hamil pertama dan kedua sama saja. Udah makan ini-itu, sampai dikasih vitamin B1 dan sebagainya tetap saja mual. Setelah makan selalu muntah," paparnya.

Keadaan tersebut sempat menyurutkan niat Mel untuk hamil lagi. Ia bahkan pernah berniat mengadopsi anak lantaran tidak tahan dengan mual-muntah pada trimester awal kehamilan. "Aku sempat trauma untuk hamil karena tidak tahan dengan *mabok*-nya, malah aku sempat mau adopsi anak bule. Aku cari-cari anak bule di Australia, tapi ternyata di sana *nggak* ada yang buang anak, *nggak* kayak di Indonesia banyak yang buang anak," terangnya.

Namun, niatnya untuk mengadopsi anak urung lantaran wejangan dari sang mama.

"Kata mama, akan beda anak kandung sama anak adopsi. Apalagi pembagian kasih sayangnya. Nanti malah kasihan anak adopsinya. Nasihat mama itu yang membuat aku tidak jadi adopsi dan memilih hamil lagi," jelasnya. (IFR)

## Perpustakaan untuk DPR

**D**efinisi perpustakaan menurut Pasal 1 UU No 43 Tahun 2007 adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan juga dapat diartikan secara umum dengan definisi luas sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis, untuk dipergunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan.

Belakangan ini, terminologi perpustakaan makin sering dibicarakan. Keberadaannya dianggap sangat penting, padahal menurut hasil penelitian, meskipun penelitian lawas, menunjukkan minat baca masyarakat kita tidaklah tinggi. Berdasarkan indeks nasional, tingkat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01. Sedangkan rata-rata indeks tingkat membaca di negara-negara maju berkisar antara 0,45 hingga 0,62.

Merujuk pada hasil survei United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada 2011, indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, hanya ada satu orang dari 1000 penduduk yang masih "mau" membaca buku secara serius (tinggi). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi 124 dari 187 negara dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski perpustakaan dibuat bagus dan lengkap, belum tentu warga masyarakat mau memanfaatkannya.

Adalah petinggi dan beberapa anggota DPR RI yang kembali mewacanakan pembangunan gedung baru DPR yang salah satunya merupakan gedung perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara. Rencananya, akan ada sekira 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Angka itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku. Namun, dicurigai rencana tersebut hanya upaya akal-akalan yang dilakukan karena rencana pembangunan gedung baru DPR yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 miliar dalam APBN 2016 banyak mendapat penolakan dari publik.

Tidak bisa dimungkiri, perpustakaan memang sangat penting. Terlebih lagi untuk para anggota DPR. Mereka bisa menggunakan fasilitas perpustakaan dalam meriset dan mengoptimalkan data sehingga keputusan atau sikap DPR bisa lebih tepat, relevan, berbasis data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak lagi hanya mengandalkan data minimal atau pikiran *common sense*.

Persoalannya, apakah benar perpustakaan terbesar itu krusial bagi DPR sekarang ini? Apakah anggota DPR sudah benar-benar melek perpustakaan lengkap dalam mendukung kerja mereka? Inilah yang jadi tanda tanya besar. Terlebih lagi, perpustakaan bukan tidak ada di DPR. Koleksinya pun bukan sekadar ada. Perpustakaan di Gedung Nusantara II itu memiliki koleksi 105.381 eksemplar. Ada buku, majalah, surat kabar, serta arsip-arsip tua peninggalan Belanda.

Namun, perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi terbitan dalam maupun luar negeri tersebut cenderung sepi. Pengalaman saya semasa masih bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR, dan saya yakin keadaan itu tidak banyak berubah, anggota DPR yang berkunjung, apalagi benar-benar memanfaatkan, ke perpustakaan itu terbilang minimal. Pengunjung yang sering ke perpustakaan adalah peneliti dan analis Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data



Informasi (P3DI) DPR. Memang anggota DPR punya alasan, seperti disampaikan salah seorang anggota DPR bahwa telah mendapatkan referensi yang cukup lewat perpustakaan daring.

Barangkali memang banyak anggota DPR yang memanfaatkan teknologi sekarang yang cukup *browsing* atau *googling*, tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Namun, kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya justru banyak anggota DPR yang tidak melakukannya (via internet), apalagi mau datang ke perpustakaan, bukankah perpustakaan terbesar itu akan menjadi sia-sia.

Kalau pun nantinya dibuka untuk umum, kehadiran perpustakaan megah itu akan jadi proyek sia-sia karena, seperti diurai di atas, minat baca masyarakat juga masih rendah. Sebagai tambahan informasi, hasil penelitian United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan hanya satu dari seribu penduduk Indonesia memiliki minat membaca. Tidak mengherankan bila studi yang dilakukan John Miller dari Central Connecticut State University, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dari bawah untuk urusan membaca. Di antara 61 negara, posisi Indonesia hanya satu tingkat lebih baik dibanding Botswana.

Ketimbang repot-repot membangun perpustakaan megah seperti National Library di Singapura atau Library of Congress di Amerika Serikat, alangkah baiknya bila para wakil rakyat memaksimalkan perpustakaan yang sudah ada. Agar perpustakaan bisa diakses banyak orang, biro urusan rumah tangga DPR harus mulai mengonversi buku kumuh yang dibiarkan teronggok di perpustakaan menjadi buku digital.

Di era kemajuan teknologi, keterbatasan koleksi buku di perpustakaan lama DPR, seperti yang dikeluhkan para anggota DPR, sebenarnya bisa disiasati dengan menyediakan perpustakaan digital yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Cara ini jauh lebih murah dan efektif ketimbang membangun perpustakaan megah. Selain masalah anggaran, urgensi pembangunan perpustakaan juga patut dipertanyakan. Rencana pembangunan perpustakaan tidak bisa didukung argumentasi yang jelas. Lagi pula, kalau memang ingin membangun perpustakaan, kenapa harus di gedung DPR. Toh, masih ada lokasi lain yang patut didirikan perpustakaan, tidak mesti di gedung DPR.

Adalah menggelikan bahwa yang tersirat pertama kali adalah kebanggaan semu jika DPR memunyai perpustakaan terbesar se-Asia. Kebutuhan perpustakaan tentu akan didukung jika perpustakaan yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung anggota DPR yang datang membaca. Yang terjadi saat ini, DPR jarang sekali mendatangi perpustakaan. Bukan karena perpustakaan tidak memadai, tetapi karena mental malas membaca yang bisa jadi memasukkan seluruh anggota DPR. Ini kesannya hanya gagah-gagahan penampilan fisik semata!

● Moh. Ilham A. Hamudy

# LIBRARY

---

BECAUSE NOT  
EVERYTHING ON  
THE INTERNET  
IS TRUE



JURNAL  
BINA  
PRAJA

# CALL FOR PAPERS

Researchers, lecturers,  
and public administration experts  
are invited to contribute  
their scientific papers  
to Jurnal Bina Praja

THEME

Home Affairs Governance

## SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy  
Politics and Public Administration  
Territorial Administration  
and Rural Governance

Population and Civil Registration  
Regional Election and Regional Innovation  
Regional Fiscal Policy and Development  
Other Issues in Public Administration

TERMS & CONDITIONS - Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 7000-8000 words in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper  
on the theme of Home Affairs Governance  
to [jurnalbinapraja@yahoo.com](mailto:jurnalbinapraja@yahoo.com)

Published by:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Indexed by:



Accredited No. 531/AU1/P2MI-LIPI/04/2013